

PERATURAN BUPATI BANDUNG

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

SALINAN

BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 101 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pegendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Penganggaran Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2023 Nomor 12);
17. Peraturan Bupati Bandung Nomor 92 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 92);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bandung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran PD.
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanan Perangkat Daerah untuk peride 1 (satu) tahunan.

12. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan sub kegiatan suatu PD, serta pagu anggaran sementara yang didasarkan atas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan PPAS APBD.
13. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahunan.
14. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah atau Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil *(outcome)* program PD.
15. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil terukur sesuai dengan tugas dan fungsi PD.
16. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran *(output)* dalam rangka mencapai hasil *(outcome)* suatu program.
17. Sub Kegiatan adalah bentuk aktivitas dan layanan dari kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB II
RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Renja PD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun berkenaan yang memuat penjabaran dari RKPD Tahun 2025 dan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.

Pasal 3

Dokumen Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sekurang-kurangnya memuat;

a. Latar belakang dan Dasar Hukum;
b. Hasil evaluasi Renja PD tahun lalu;
c. Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
d. Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah;
e. Penutup; dan
f. lampiran program/ kegiatan/ sub kegiatan berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Pasal 4

(1) Renja PD Tahun 2025 merupakan penjabaran dari Renstra PD Tahun 2021-2026 yang akan digunakan PD untuk melaksanakan Rencana Kerja PD;

(2) Renja PD Tahun 2025 sebagaimana pada ayat (1) bertujuan untuk:
   a. mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta evaluasi hasil capaian pelaksanaan serta evaluasi hasil capaian pelaksanaan rencana kerja PD tahun lalu dan capaian kinerja pelayanan PD;
   b. mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergitas antara Renja PD dengan dokumen RKPD dan Renstra PD;
   c. sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan penganggaran dengan memperhatikan kerangka regulasi dan kerangka anggaran PD yang telah ditetapkan pagu dan indikatifnya; dan
   d. mewujudkan penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan

Pasal 5

(1) Renja PD digunakan sebagai salah satu dasar penyusunan RKA PD.

(2) Renja PD selanjutnya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Bandung yang mengatur mengenai Renstra PD Tahun 2021-2026.

BAB III

KAIDAH PELAKSANAAN DAN PELAPORAN RENJA PD

Pasal 6

Kaidah pelaksanaan Renja PD menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dalam Renja PD meliputi;

a. Semua ketetapan indikator kinerja dan pagu indikatif pendanaan menjadi tanggungjawab PD sesuai dengan tugas dan fungsi PD;
b. Target kinerja dan pagu indikatif dapat berubah menyesuaikan dengan KUA-PPAS yang telah disepakati bersama DPRD;
c. Perubahan target kinerja dan pagu indikatif sebagaimana dimaksud pada huruf b, dilengkapi dengan berita acara atau risalah rapat antara PD dengan DPRD; dan

d. Perubahan target kinerja dan pagu indikatif sebagaimana dimaksud pada huruf c dilaksanakan pada saat penyusunan perubahan Renja PD.

Pasal 7

(1) Perangkat Daerah membuat laporan realisasi kinerja dan anggaran secara berkala atas pelaksanaan Renja PD.
(2) Laporan realisasi kinerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Laporan relaisasi kinerja dan anggaran Renja PD disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan Daerah.
(4) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara elektonik.
(5) Dalam hal pelaporan secara elektronik terjadi kendala atau permasalahan teknis maka dapat disampaikan secara manual.
(6) Laporan realisasi kinerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan masukan dan pertimbangan untuk penyusunan tahun berikutnya dan/ atau perubahan Renja PD tahun berjalan.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai dokumen Renja PD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 9

(1) PD melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja PD dan evaluasi hasil Renja PD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilaporkan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan Daerah.

(2) Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan, penelitan dan pengembangan Daerah melakukan verifikasi atas hasil pengendalian dan evaluasi yang dilakukan PD terhadap pelaksanaan dan hasil Renja PD.

(3) Kepala PD menindaklanjuti hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai bahan penyempurnaan dan perbaikan Renja PD.

(4) Format pengendalian dan evaluasi serta verifikasi sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai peraturan perundang-undangan.

(5) Pengendalian pelaksanaan Renja PD dilakukan pada saat penyusunan RKA PD.

BAB V
PERUBAHAN RENJA PD

Pasal 10

(1) Renja PD dapat diubah apabila :
   a. berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, Provinsi dan Daerah mengacu pada perubahan RKPD.
   b. terdapat keridaksesuaian sebagaimana hasil pengendalian dan evaluasi yang dimaksud dalam pasal 9; dan
   c. dalam hal terjadinya penyesuaian tujuan dan sasaran PD beserta target indikatornya, sebagaimana tertuang didalam Renstra PD Tahun 2021-2026.

(2) Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat perubahan yang terdiri dari :
   a. pagu anggaran program;
   b. kegiatan dan sub kegiatan;
   c. perubahan target indikator kinerja program; dan
   d. kegiatan dan sub kegiatan yang didasarkan pada hasil pelaksanaan dan evaluasi Renja PD tahun 2025.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 1 Agustus 2024

BUPATI BANDUNG,

ttd.

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 1 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

ttd.

CAKRA AMIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2024 NOMOR 101

salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



YANA ROSMIANA, S.H.M.H
Pembina Tk.I
NIP. 196901011999012001

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan sekalian alam yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian, shalawat dan salam senantiasa tercurah untuk junjunan kita, Nabiyullah Rosulullоh Muhammad SAW, beserta kerabat, sahabat serta kita sekalian pengikut sampai akhir zaman. Alhamdulillah, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bandung dapat menyelesaikan penyusunan Renja Diskop UKM Tahun 2025.

Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bandung Tahun 2025 merupakan rangkaian perencanaan program dalam pembangunan Koperasi dan UMKM di Kabupaten Bandung dalam jangka satu tahun, baik anggaran pembangunan maupun rutin serta sumber-sumber lainnya. Penyusunan Renja mengacu kepada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bandung tahun 2025. Penyusunan Renja Diskop UKM tahun 2025 disusun dengan melakukan evaluasi kinerja dan keuangan sampai tahun 2023 dan evaluasi terhadap pencapaian Renstra Diskop UKM tahun 2021-2026.

Tersusunnya Renja Diskop UKM tahun 2025 ini, diharapkan dapat menjadi acuan dalam penyusunan rencana kegiatan tahunan dan rencana kegiatan prioritas Diskop UKM sehingga terdapat arah yang jelas dari program/ kegiatan Diskop UKM.

Wassalamu'alaikum wr wb.

Soreang, Agustus 2024

KEPALA DINAS KOPERASI DAN
USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN BANDUNG

H. DINDIN SYAHIDIN. S.IP, M.Si
Pembina Utama Muda/IV-c
NIP.19720308 199101 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR		i
DAFTAR ISI		ii
DAFTAR TABEL		iii
DAFTAR GAMBAR		iv
DAFTAR GRAFIK		v
BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1. LATAR BELAKANG	1
	1.2. LANDASAN HUKUM	3
	1.3. MAKSUD DAN TUJUAN	5
	1.4. SISTEMATIKA	6
BAB II	EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU	7
	2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PD	7
	2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PD	24
	2.3. ISU–ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	30
	2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD	38
	2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT	47
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	83
	3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL	83
	3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH	85
	3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN	99
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	118
	4.1. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	118
	4.2. INOVASI TAHUN 2025	123
BAB V	PENUTUP	127

DAFTAR TABEL

Nomor				Halaman
1.	Tabel 2.1	:	Target dan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2023	7
2.	Tabel 2.2 (T-C.29)	:	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Diskop UKM dan Pencapaian Renstra Diskop UKM Sampai dengan Tahun 2023	10
3.	Tabel 2.3	:	Indikator dan Capaian Koperasi tahun 2019 – 2023	26
4.	Tabel 2.4	:	Perkembangan UMKM Kabupaten Bandung 2019 – 2023	27
5.	Tabel 2.5 (T-C.30)	:	Pencapaian Kinerja Pelayanan Diskop UKM	29
6.	Tabel 2.6	:	Masalah Pokok, Masalah, Akar Masalah Bidang Koperasi dan UMKM	30
7.	Tabel 2.7	:	Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Koperasi dan UKM ditinjau dari Sasaran RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2021 - 2026	34
8.	Tabel 2.8 (T-C.31)	:	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	39
9.	Tabel 2.9	:	Usulan Program dan Kegiatan Musrenbang Tahun 2025	48
10.	Tabel 2.10	:	Usulan Program dan Kegiatan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Tahun 2025	69
11.	Tabel 3.1	:	Isu Strategis Nasional RPJMN 2020-2024 Kategori Ekonomi	83
12.	Tabel 3.2	:	Hubungan Visi, Misi, Tujuan, Dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Bandung	84
13.	Tabel 3.3	:	Sinergi Prioritas Pembangunan Dan Arah Kebijakan Kabupaten Bandung Dengan Prioritas Pembangunan Nasional	84
14.	Tabel 3.4	:	Sinergi Prioritas Pembangunan Dan Arah Kebijakan Kabupaten Bandung Dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat	85
15.	Tabel 3.5	:	Tujuan dan Sasaran Diskop UKM Kabupaten Bandung	85
16.	Tabel 3.6	:	Tabel Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2025	87
17.	Tabel 3.7 (T-C.33)	:	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026	101
18.	Tabel 4.1	:	Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2025 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bandung	118

DAFTAR GAMBAR

Nomor				Halaman
1.	Gambar 1.1	:	Gambaran Struktur Organisasi Diskop-UKM	3
2.	Gambar 2.1	:	Penyaluran Pinjaman Dana Bergulir Tahun 2023	28
3.	Gambar 2.2	:	Tujuan dan Sasaran Diskop UKM	33
4.	Gambar 2.3	:	Alur Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan	47
5.	Gambar 2.4	:	Alur Usulan Pokir DPRD	68
6.	Gambar 3.1	:	Misi Pembangunan Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026	83
7.	Gambar 4.1	:	Tampilan aplikasi Sibangkit UKM Bedas	124
8.	Gambar 4.2	:	Tampilan aplikasi Simanjur Bedas	125
9.	Gambar 4.3	:	Dokumentasi Kegiatan SIKOPI BEDAS	126
10.	Gambar 4.4	:	Dokumentasi Kegiatan SAKU BEDAS	126

DAFTAR GRAFIK

Nomor			Halaman
1. Grafik 2.1	:	Perkembangan jumlah Koperasi Tahun 2019 – 2023	25
2. Grafik 2.2	:	Perkembangan Koperasi berdasarkan Jenis Koperasi	25
3. Grafik 2.3	:	Jumlah Koperasi Berdasarkan Kecamatan	26
4. Grafik 2.4	:	UMKM Berdasarkan Jenis Usaha	27

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

1.1.1.Pengertian Renja Perangkat Daerah

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja PD memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran. Rencana Kerja PD juga merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD Kabupaten Bandung.

Rencana Kerja Tahunan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bandung Tahun 2025 mengacu pada kebijakan Pemerintah Kabupaten Bandung, yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung yang dituangkan kedalam kebijakan Koperasi dan UKM melalui peningkatan kompetensi serta daya saing usaha mikro dan koperasi.

1.1.2.Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Perangkat Daerah disusun dengan tahapan:

1. Persiapan Penyusunan
   Persiapan penyusunan renja meliputi : (a) Penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah (b) Orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah (c) Penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja Perangkat Daerah dan (d) Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.
2. Penyusunan Rancangan Awal
   Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan. Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah mencakup: (a) Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah dan (b) Hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu.
3. Penyusunan Rancangan
   Penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah merupakan proses penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah. Rancangan Renja Perangkat

Daerah tersebut dibahas dan disempurnakan dalam forum perangkat Daerah/lintas perangkat Daerah dan sudah harus selaras dengan rancangan awal RKPD.

4. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah
   Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dilaksanakan oleh kepala Perangkat Daerah berkoordinasi dengan BAPPEDA Kabupaten Bandung dan dilakukan pembahasan dengan pemangku kepentingan yang bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Perangkat Daerah.
5. Perumusan Rancangan Akhir
   Perumusan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah, merupakan proses penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah menjadi Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah berdasarkan Perkada tentang RKPD. Perumusan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Perkada tentang RKPD.
6. Penetapan
   Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung menyampaikan seluruh Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Perkada. Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dengan Perkada menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.

Dalam penyusunan Renja PD dilakukan pengkajian Program dan Kegiatan yang tertuang dalam Rancangan Awal RKPD dengan mempertimbangkan beberapa faktor antara lain, hasil evaluasi kinerja PD pada tahun sebelumnya, pencapaian target Renstra SKPD, usulan dari masyarakat/para pemangku kepentingan, serta analisis kebutuhan penyelenggaraan tugas dan fungsi PD.

1.1.3. Keterkaitan Antara Renja PD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Penyusunan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bandung dari rancangan awal renja sampai penetapatan renja dipengaruhi oleh dokumen perencanaan lainnya yaitu :

1. Berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah;
2. Berpedoman pada hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dilakukan.

Rancangan Awal Renja kemudian disempurnakan menjadi Rancangan Renja. Penyempurnaan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah mencakup perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran pada Rancangan Awal RKPD. Rancangan awal renja tersebut juga dibahas dan disempurnakan dalam forum perangkat daerah/lintas

perangkat daerah. Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah disampaikan kepada Bappeda Kabupaten Bandung untuk diverifikasi. Verifikasi tersebut harus dapat menjamin rancangan awal Renja Perangkat Daerah sudah selaras dengan rancangan awal RKPD. Rancangan Awal Renja hasil verifikasi tersebut akan dijadikan bahan penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD.

1.2 LANDASAN HUKUM

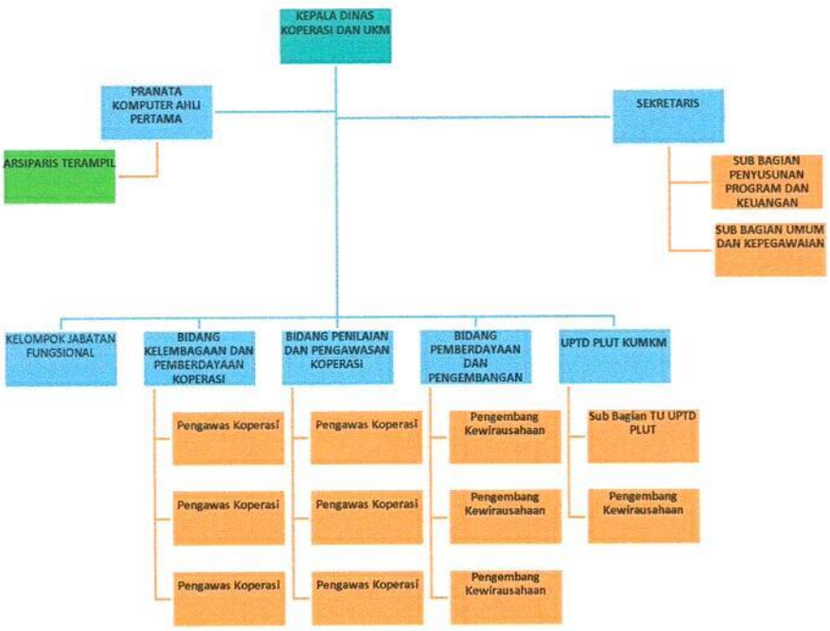
1.2.1. Ketentuan tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) dan Kewenangan Daerah

Tugas dan fungsi serta susunan organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bandung mengacu pada Peraturan Bupati Bandung Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bandung dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;

Berikut gambaran struktur organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bandung sesuai gambar 1.1 :

Gambar 1.1. Gambaran struktur organisasi Diskop-UKM



1.2.2. Ketentuan tentang Perencanaan dan Penganggaran

Adapun peraturan yang menjadi pedoman dalam penyusunan perencanaan adalah:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3209);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
4. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015, tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
8. Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan dan pembangunan keuangan daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan pelaksaan peraturan pemerintah nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perkoperasian;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Perubahan Daerah 7 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Usaha Mikro:
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026;

18. Peraturan Bupati Bandung Nomor 24 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan Pengarustamaan Gender dalam Pembangunan di Daerah Kabupaten Bandung;
19. Peraturan Bupati Bandung Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 119 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026;
20. Peraturan Bupati Bandung Nomor 92 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bandung Tahun 2025.

Adapun peraturan yang menjadi pedoman dalam penyusunan penganggaran adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bandung Tahun 2025 adalah menetapkan dan mendokumentasikan perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan prioritas pembangunan daerah yang menjadi tolak ukur kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bandung selama Tahun 2025.

Sedangkan Tujuan Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bandung Tahun 2025 adalah :

1. Mendeskripsikan tentang program-program prioritas yang akan dilaksanakan langsung oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bandung;
2. Menjabarkan rencana strategis Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026 dalam rencana program dan kegiatan prioritas Tahun Anggaran 2025. Sehingga program-program tersebut dapat terlaksana sesuai yang diharapkan dengan menitikberatkan pada program-program prioritas;
3. Menjadi pedoman dalam melaksanakan seluruh program dan kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bandung pada Tahun Anggaran 2025;
4. Menjadi acuan bagi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2025;
5. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi sumber daya serta produktifitas dalam rangka peningkatan kinerja.

1.4. SISTEMATIKA PENYUSUNAN

BAB I : **PENDAHULUAN**
Pada bagian ini dijelaskan mengenai latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan

BAB II : **HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**
Bab ini menguraikan tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra, Analisis Kinerja Pelayanan, Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi, Review Terhadap Rancangan RKPD dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

BAB III : **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**
Bab ini menguraikan tentang Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja, serta Program dan Kegiatan

BAB IV : **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**
Bab ini menguraikan tentang rencana program, kegiatan, jumlah anggaran dan indikator kinerja

BAB V : **PENUTUP**
Menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Penyusunan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bandung Tahun 2025, memperhatikan beberapa unsur pokok sebagaimana berikut :

a. Masalah – masalah yang dihadapi;
b. Sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
c. Tujuan yang dikehendaki;
d. Sasaran – sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya;
e. Kebijakan–kebijakan untuk melaksanakannya serta seksi pelaksana.

Penyusunan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bandung Tahun 2024 juga memperhatikan hal – hal sebagai berikut:

a. Hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2023 sebagai entry point dalam penyusunan perencanaan kerja tahun anggaran 2025;
b. Memperhatikan keberlanjutan (sustainable development) untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan. Masalah – masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2023, Diskop UKM Kabupaten Bandung melaksanakan 8 (delapan) program, 16 (enam belas) kegiatan dan 49 (empat puluh sembilan) sub kegiatan yang telah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Berdasarkan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan tersebut, terdapat program/kegiatan yang melebihi target kinerja dan program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja. Berikut ini merupakan capaian kinerja masing-masing program pada Renja Diskop UKM Kabupaten Bandung Tahun 2023 :

Tabel 2.1 Target dan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator				Kriteria Kinerja
		Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	
1	Meningkatnya Jumlah Wirausaha Baru	Persentase Jumlah Wirausaha Baru yang Tumbuh	3,14%	6,03%	192,04%	Sangat Tinggi
2	Meningkatnya Kualitas Usaha Mikro	Persentase Usaha Mikro yang Meningkat Kualitasnya	7,92%	8,03%	101,39%	Sangat Tinggi
3	Meningkatnya Kepatuhan dan Kesehatan Koperasi	Presentase Koperasi Patuh	28,57%	28,57%	100,00%	Sangat Tinggi
		Presentase Koperasi Sehat	28,57%	35,92%	125,73%	Sangat Tinggi

No	Sasaran	Indikator				Kriteria Kinerja
		Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	
4	Meningkatnya Pemberdayaan dan Kelembagaan Koperasi	Presentase Koperasi Aktif	52,7%	52,83%	100,25%	Sangat Tinggi
5	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Bidang Koperasi dan UKM	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	78,36 poin	81,10 poin	103,5%	Sangat Tinggi
		Nilai AKIP	83,56 poin	85,89 poin	102,86%	Sangat Tinggi
		Presentase Aset Dalam Kondisi Baik	95,32%	95,00%	99,66%	Sangat Tinggi

Sumber : Hasil Analisis Diskop UKM, 2024

Berdasarkan tabel diatas capaian kinerja tahun 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Meningkatnya Jumlah Wirausaha Baru dengan indikator sasaran Persentase Jumlah Wirausaha Baru yang Tumbuh diukur menggunakan rumusan/ formulasi perhitungan :

$$\frac{Jumlah\ Usaha\ Mikro\ yang\ difasilitasi\ Pemberdayaan\ Usaha}{Jumlah\ Usaha\ Mikro\ yg\ ada}\ x\ 100\% = \frac{2.330}{38.614}\ x\ 100\% = 6{,}03\%$$

   Dari perhitungan tersebut, capaian kinerja melebihi dari target yang sudah ditentukan yaitu 3,14%, atau terealisasi sebesar 192,04%.

2. Meningkatnya Kualitas Usaha Mikro dengan indikator sasaran Persentase Usaha Mikro yang Meningkatkan Kualitasnya diukur menggunakan rumusan/formulasi perhitungan :

$$\frac{Jumlah\ Usaha\ Mikro\ yang\ difasilitasi\ Pengembangan\ Usaha}{Jumlah\ Usaha\ Mikro\ yg\ ada}\ x\ 100\% = \frac{3.099}{38.614}\ x\ 100\% = 8{,}03\%$$

   Dari perhitungan tersebut, capaian kinerja melebihi dari target yang sudah ditentukan yaitu 7,92%, atau terealisasi sebesar 101,39%.

3. Meningkatnya Kepatuhan dan Kesehatan Koperasi dengan 2 (dua) indikator Sasaran, yaitu :
   a. Persentase Koperasi Patuh, diukur menggunakan rumusan/formulasi perhitungan :

$$\frac{Jumlah\ Koperasi\ Patuh}{Jumlah\ koperasi\ yg\ melaksanakan\ RAT}\ x\ 100\% = \frac{70}{245}\ x\ 100\% = 28{,}57\%$$

      Dari perhitungan tersebut, capaian kinerja sudah sesuai dengan target yang sudah ditentukan yaitu 28,57%, atau terealisasi sebesar 100%.

   b. Persentase Koperasi Sehat, diukur menggunakan rumusan/formulasi perhitungan :

$$\frac{Jumlah\ Koperasi\ yang\ memenuhi\ Kriteria\ Sehat\ dan\ Cukup\ Sehat}{Jumlah\ koperasi\ yg\ melaksanakan\ RAT}\ x\ 100\% = \frac{88}{245}\ x\ 100\% = 35{,}92\%$$

      Dari perhitungan tersebut, capaian kinerja melebihi target yang sudah ditentukan yaitu 28,57%, atau terealisasi sebesar 125,72%.

4. Meningkatnya Pemberdayaan dan Kelembagaan Koperasi dengan indikator sasaran Presentase Koperasi Aktif diukur menggunakan rumusan/formulasi perhitungan :

$$\frac{Jumlah\ Koperasi\ Aktif}{Jumlah\ seluruh\ Koperasi}\ x\ 100\% = \frac{970}{1.836}\ x\ 100\% = 52{,}83\%$$

Dari perhitungan tersebut, capaian kinerja melebihi target yang sudah ditentukan yaitu 52,7%, atau capaian kinerja sebesar 100,25%.

5. Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Bidang Koperasi dan UKM dengan indikator sasaran :
   1) Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan sebesar 81,10 Poin kategori A dengan interpretasi "*Memuaskan*" yaitu berdasarkan hasil penilaian Inspektorat berdasarkan LHE SAKIP Diskop-UKM Tahun 2023, dengan capaian melebihi dari target yang sudah ditentukan yaitu 78,36%, atau terealisasi sebesar 103,5%;
   2) Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Diskop-UKM sebesar 85,95% Point yaitu berdasarkan perhitungan hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dari sejumlah fasilitasi kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2023, dengan capaian kinerja melebihi dari target yang sudah ditentukan yaitu 83,56%, atau terealisasi sebesar 102,86%;
   3) Presentase Aset Dalam Kondisi Baik diukur menggunakan rumusan/ formulasi perhitungan :

$$\frac{Jumlah\ Aset\ dalam\ kondisi\ baik}{Total\ Aset}\ x\ 100\% = \frac{1.139}{1.199}\ x\ 100\% = 95{,}00\%$$

   Dari perhitungan tersebut, capaian kinerja masih belum mencapai dari target yang sudah ditentukan yaitu 95,32%, atau terealisasi sebesar 99,66%. Hal ini dikarenakan adanya pemindahan (mutasi) Aset ke Perangkat Daerah lain serta adanya penghapusan Aset yang sudah termasuk kategori Rusak Berat.

Adapun tabel evaluasi hasil pelaksanaan Renja dan capaian Renstra Diskop UKM sampai dengan Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.2 (T-C.29)
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Diskop UKM dan Pencapaian Renstra Diskop UKM sampai dengan Tahun 2023

Nama Perangkat Daerah : Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

No	Sasaran	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (intermediate outcome)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun n- 1 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	
		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH													
1	**Meningkatnya Kuantitas Usaha Mikro**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	**Persentase Kapasitas Usaha Mikro**	**3,81 %**	**4.519.612.000**	**3,14 %**	**7.778.031.200**	**6,03 %**	**6.954.066.303**	**192,17**	**89,41**	**6,03 %**	**8.758.445.153**	**158,29**	**193,79**
	Meningkatkan Kuantitas Usaha Mikro melalui Pemberdayaan Usaha yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	***Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan***	***Persentase usaha mikro yang Difasilitasi Kegiatan Pemberdayaan***	***3,81 %***	***4.519.612.000***	**3,14 %**	***7.778.031.200***	***6,03 %***	***6.954.066.303***	***192,17***	***89,41***	**6,03 %**	***8.758.445.153***	***158,29***	***193,79***
	Tersedianya Data Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro di Wilayah Kabupaten Bandung	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang telah didata Potensi dan Pengembangannya	14.802 Unit Usaha	821.500.000	2.610 Unit Usaha	114.000.000	3.452 Unit Usaha	113.897.250	132,26	99,91	7.220 Unit Usaha	327.544.800	48,78	39,87
	Terlaksananya Kemitraan Usaha Mikro di Wilayah Kabupaten Bandung	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	1.380 Unit Usaha	1.183.451.000	120 Unit Usaha	388.401.200	120 Unit Usaha	388.401.200	100,00	100,00	420 Unit Usaha	1.251.002.100	30,43	105,71

No	Sasaran	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (intermediate outcome)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun n- 1 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	
	Tersedianya Data Unit Usaha Mikro di Wilayah Kabupaten Bandung yang telah mendapatkan Perizinan	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	1.750 Unit Usaha	653.727.000	300 Unit Usaha	200.274.000	300 Unit Usaha	200.274.000	100,00	100,00	661 Unit Usaha	442.350.900	37,77	67,67
	Tersedianya Data Unit Usaha Mikro di Wilayah Kabupaten Bandung yang telah menerima Pembinaan dan Pendampingan	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	1.000 Unit Usaha	500.000.000	2.530 Unit Usaha	5.164.179.000	775 Unit Usaha	4.511.371.653	30,63	87,36	1.822 Unit Usaha	4.927.479.153	182,20	985,50
	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dengan para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Unit Usaha Mikro di Wilayah Kabupaten Bandung	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	300 Orang	488.866.000	100 Orang	39.389.000	100 Orang	39.389.000	100,00	100,00	237 Orang	109.335.000	79,00	22,37
	Terlaksananya Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Kewirausahaan bagi Unit Usaha Mikro di Wilayah Kabupaten Bandung	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	9.925 Orang	872.068.000	1.705 Orang	1.871.788.000	1.705 Orang	1.700.733.200	100,00	90,86	3.630 Orang	1.700.733.200	36,57	195,02
							Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)	**93,82%**	**89,41%**						
							Predikat kinerja Kegiatan	**Sangat Tinggi**	**Tinggi**						
							Rata-rata capaian kinerja Program (%)	**93,82%**	**89,41%**						
							Predikat kinerja Program	**Sangat Tinggi**	**Tinggi**						
2	**Meningkatnya Kualitas Pengembangan Usaha Mikro**	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	**Persentase Kualitas Usaha Mikro**	**7,93 %**	**7.951.303.645**	**7,92 %**	**1.731.696.901**	**8,02 %**	**1.854.518.602**	**101,24**	**107,09**	**8,02 %**	**18.644.776.098**	**101,10**	**234,49**
	Meningkatkan Kualitas Usaha Mikro melalui Pengembangan Usaha dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha	***Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil***	***Persentase Usaha Mikro yang fasilitasi pengembangan Usaha***	***50 %***	***7.951.303.645***	**7,92 %**	***1.731.696.901***	***8,02 %***	***1.854.518.602***	***101,24***	***107,09***	***16,07 %***	***18.644.776.098***	***32,14***	***234,49***

No	Sasaran	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (intermediate outcome)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun n- 1 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	
	Terlaksananya Fasilitasi Unit Usaha Mikro di Wilayah Kabupaten Bandung dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	1.712 Unit Usaha	7.951.303.645	1.593 Unit Usaha	1.731.696.901	1.591 Unit Usaha	1.854.518.602	99,87	107,09	2.000 Unit Usaha	18.644.776.098	116,82	234,49
								Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)		**99,87%**	**107,09%**				
								Predikat kinerja Kegiatan		**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**				
								Rata-rata capaian kinerja Program (%)		**99,87%**	**107,09%**				
								Predikat kinerja Program		**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**				
3	**Meningkatnya Kepatuhan Koperasi**	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	**Persentase Koperasi Patuh**	**100 %**	**3.485.760.000**	**28,57 %**	**494.938.455**	**28,57 %**	**488.402.118**	**100,01**	**98,68**	**28,57 %**	**1.204.258.814**	**28,57**	**34,55**
	Meningkatkan Kepatuhan Koperasi melalui Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi	***Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota***	***Persentase Koperasi, Koperasi Simpan pinjam/Unit simpan pinjam koperasi yang diperiksa dan diawasi***	***100 %***	***3.485.760.000***	***40 %***	***494.938.455***	***48,98 %***	***488.402.118***	***122,45***	***98,68***	***48,98 %***	***1.204.258.814***	***48,98***	***34,55***
	Terlaksananya Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Unit Usaha Koperasi di Wilayah Kabupaten Bandung	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	300 Unit Usaha	1.842.375.000	80 Unit Usaha	267.978.200	110 Unit Usaha	265.898.618	137,50	99,22	170 Unit Usaha	664.845.514	56,67	36,09
	Tersedianya Data Unit Usaha Koperasi di Wilayah Kabupaten Bandung yang memenuhi Standarisasi Peraturan	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang dibina, diawasi dan dinilai kepatuhannya	300 Unit Usaha	1.643.385.000	103 Unit Usaha	226.960.255	110 Unit Usaha	222.503.500	106,80	98,04	270 Unit Usaha	539.413.300	90,00	32,82

No	Sasaran	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (intermediate outcome)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun n- 1 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	
	Perundang-undangan														
							Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)	122,15%	98,68%						
							Predikat kinerja Kegiatan	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi						
							Rata-rata capaian kinerja Program (%)	122,15%	98,68%						
							Predikat kinerja Program	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi						
4	**Meningkatnya Kesehatan Koperasi**	**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**	**Persentase Koperasi Sehat**	**100 %**	**2.075.250.000**	**28,57 %**	**186.918.800**	**35,92 %**	**182.078.140**	**125,72**	**97,41**	**35,92 %**	**592.766.332**	**35,92**	**28,56**
	Meningkatkan Kesehatan Koperasi melalui Penilaian Kesehatan Koperasi	***Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota***	***Persentase Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang dinilai kesehatannya***	***100 %***	***2.075.250.000***	***40 %***	***186.918.800***	***37,14 %***	***182.078.140***	***92,86***	***97,41***	***37,14 %***	***592.766.332***	***37,14***	***28,56***
	Terlaksananya Penilaian Kesehatan terhadap Unit Usaha Koperasi di Wilayah Kabupaten Bandung	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang telah dilakukan Penilaian Keschatan	300 Unit Usaha	1.575.250.000	60 Unit Usaha	176.766.600	91 Unit Usaha	171.925.940	151,67	97,26	167 Unit Usaha	490.300.140	55,67	31,13
	Tersedianya Unit Usaha Koperasi yang mendapatkan Penghargaan Kesehatan	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang mendapatkan Penghargaan Keschatan	15 Unit Usaha	500.000.000	3 Unit Usaha	10.152.200	3 Unit Usaha	10.152.200	100,00	100,00	6 Unit Usaha	102.466.192	40,00	20,49
							Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)	125,83%	97,41%						
							Predikat kinerja Kegiatan	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi						
							Rata-rata capaian kinerja Program (%)	125,83%	97,41%						
							Predikat kinerja Program	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi						
5	**Meningkatnya Koperasi yang berizin**	**PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM**	**Persentase Koperasi yang berizin**	**60,48 %**	**625.000.000**	**56,45 %**	**92.091.000**	**4,29 %**	**91.231.000**	**7,61**	**99,07**	**59,27 %**	**279.311.060**	**98,00**	**44,69**
	Meningkatkan Koperasi yang berizin melalui Fasilitasi Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam	***Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota***	***Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota***	***35 %***	***375.000.000***	***14 %***	***79.700.000***	***8,44 %***	***78.840.000***	***60,30***	***98,92***	***14,77 %***	***216.920.060***	***42,20***	***57,85***

No	Sasaran	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (intermediate outcome)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun n- 1 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	
	Terfasilitasinya Unit Usaha Koperasi di Wilayah Kabupaten Bandung terkait Izin Usaha Simpan Pinjam	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasidengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	744 Unit Usaha	375.000.000	691 Unit Usaha	79.700.000	652 Unit Usaha	78.840.000	94,36	98,92	652 Unit Usaha	216.920.060	87,63	57,85
							Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)	94,36%	98,92%						
							Predikat kinerja Kegiatan	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi						
	Meningkatkan Koperasi yang berizin melalui Fasilitasi Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam	***Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota***	***Persentase Koperasi yang difasilitasi izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas***	***20 %***	***250.000.000***	***8 %***	***12.391.000***	***29,41 %***	***12.391.000***	***367,65***	***100,00***	***29,41 %***	***62.391.000***	***147,06***	***24,96***
	Terfasilitasinya Unit Usaha Koperasi di Wilayah Kabupaten Bandung terkait Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	16 Unit Usaha	250.000.000	24 Unit Usaha	12.391.000	34 Unit Usaha	12.391.000	141,67	100,00	58 Unit Usaha	62.391.000	362,50	24,96
							Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)	141,67%	100,00%						
							Predikat kinerja Kegiatan	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi						
							Rata-rata capaian kinerja Program (%)	118,01%	99,07%						
							Predikat kinerja Program	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi						
6	**Meningkatnya Kompetensi SDM Koperasi**	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	**Persentase SDM Koperasi yang kompeten**	**15,28 %**	**2.061.893.600**	**13,54 %**	**392.373.532**	**19,59 %**	**390.963.200**	**144,66**	**99,64**	**19,59 %**	**1.681.422.200**	**128,16**	**81,55**
	Meningkatkan SDM Koperasi yang mengikuti Pendidikan dan	***Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang***	***Persentase SDM Koperasi yang mengikuti Pendidikan dan***	***20 %***	***2.061.893.600***	***8 %***	***392.373.532***	***6,44 %***	***390.963.200***	***80,54***	***99,64***	***12,85 %***	***1.681.422.200***	***64,27***	***81,55***

No	Sasaran	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (intermediate outcome)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun n- 1 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	
	Pelatihan Koperasi	***Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota***	***Pelatihan Koperasi***												
	Terlaksananya Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	2.840 Orang	2.061.893.600	420 Orang	392.373.532	420 Orang	390.963.200	100,00	99,64	602 Orang	1.681.422.200	21,20	81,55
								Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)		**100,00%**	**99,64%**				
								Predikat kinerja Kegiatan		**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**				
								Rata-rata capaian kinerja Program (%)		**100,00%**	**99,64%**				
								Predikat kinerja Program		**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**				
7	**Meningkatnya Kelembagaan dan Pemberdayaan Usaha Koperasi**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**	**Persentase pertumbuhan volume usaha koperasi**	**2,5 %**	**5.179.835.000**	**1 %**	**1.291.346.400**	**28,11 %**	**1.290.951.026**	**2806,48**	**99,97**	**28,11 %**	**2.313.422.642**	**1124,40**	**44,66**
	Meningkatkan Penguatan Kelembagaan Koperasi dan Peningkatan Usaha Koperasi	***Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota***	***Persentase Koperasi yang difasilitasi Kegiatan pemberdayaan dan perlindungan bagi Koperasi***	*100 %*	*5.179.835.000*	*100 %*	*1.291.346.400*	*100,00 %*	*1.290.951.026*	*100,00*	*99,97*	*100 %*	*2.313.422.642*	*100,00*	*44,66*
	Terlaksananya Peningkatan Unit Usaha Koperasi di Wilayah Kabupaten Bandung yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/ Kota	1.135 Unit Usaha	4.899.835.000	106 Unit Usaha	1.120.496.800	110 Unit Usaha	1.120.101.426	103,77	99,96	372 Unit Usaha	2.142.573.042	32,78	43,73

No	Sasaran	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (intermediate outcome)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun n- 1 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	
	Terlaksananya Peningkatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	200 Keluarga	280.000.000	50 Keluarga	170.849.600	50 Keluarga	170.849.600	100,00	100,00	50 Keluarga	170.849.600	25,00	61,02
								Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)		101,89%	99,97%				
								Predikat kinerja Kegiatan		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi				
								Rata-rata capaian kinerja Program (%)		101,89%	99,97%				
								Predikat kinerja Program		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi				
8	**Meningkatnya Nilai AKIP, Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Persentase Aset Dalam Kondisi Baik di Lingkungan Diskop UKM**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai AKIP Nilai IKM Persentase Aset dalam Kondisi Baik**	**77,37 Poin 86,57 Poin 96,82 %**	**45.893.289.417**	**78,36 Poin 83,56 Poin 95,32 %**	**10.702.536.537**	**81,10 Poin 85,89 Poin 95,00 %**	**9.918.849.174**	**103,50 102,79 99,66**	**92,68**	**81,10 Poin 85,89 Poin 95,00 %**	**18.931.660.785**	**104,82 99,21 98,12**	**41,25**
	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Diskop UKM	***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	***Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	***100 %***	***1.315.000.000***	***100 %***	***298.156.920***	***100,00 %***	***296.325.100***	***100,00***	***99,39***	***100 %***	***521.566.943***	***100,00***	***39,66***
	Tersedianya Dokumen Perencanaan Diskop UKM Kabupaten Bandung	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	21 Dokumen	775.000.000	6 Dokumen	172.749.920	6 Dokumen	172.043.100	100,00	99,39	12 Dokumen	285.334.504	57,14	36,82
	Tersedianya Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Diskop UKM Kabupaten Bandung	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	9 Dokumen	35.000.000	1 Dokumen	11.562.000	1 Dokumen	11.562.000	100,00	100,00	2 Dokumen	16.960.444	22,22	48,46

No	Sasaran	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (intermediate outcome)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun n- 1 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	
	Tersedianya Dokumen Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Diskop UKM Kabupaten Bandung	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	9 Dokumen	40.000.000	2 Dokumen	13.228.000	2 Dokumen	13.228.000	100,00	100,00	5 Dokumen	24.393.155	55,56	60,98
	Tersedianya Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Diskop UKM Kabupaten Bandung	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	9 Dokumen	15.000.000	1 Dokumen	1.216.000	1 Dokumen	1.216.000	100,00	100,00	2 Dokumen	2.632.968	22,22	17,55
	Tersedianya Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Diskop UKM Kabupaten Bandung	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	9 Dokumen	15.000.000	2 Dokumen	1.432.000	2 Dokumen	1.432.000	100,00	100,00	5 Dokumen	3.101.068	55,56	20,67
	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Diskop UKM Kabupaten Bandung	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	21 Laporan	135.000.000	6 Laporan	9.196.000	6 Laporan	9.196.000	100,00	100,00	11 Laporan	22.218.952	52,38	16,46
	Tersedianya Laporan Evaluasi Kinerja Diskop UKM Kabupaten Bandung	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11 Laporan	300.000.000	4 Laporan	88.773.000	4 Laporan	87.648.000	100,00	98,73	7 Laporan	166.925.852	63,64	55,64
								Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)		100,00%					
								Predikat kinerja Kegiatan		Sangat Tinggi					
	Tersedianya Dokumen Keuangan Dinas Diskop UKM	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	***Persentase Ketersediaan Dokumen Keuangan Dinas***	*100* %	*35.478.911.417*	*100* %	*7.848.926.892*	*102,54* %	*7.219.553.991*	*102,54*	*91,98*	*102,54* %	*14.093.059.850*	*102,54*	*39,72*

No	Sasaran	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (intermediate outcome)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun n- 1 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	
	Terbayarkannya Gaji dan Tunjangan ASN di lingkungan Diskop UKM Kabupaten Bandung	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	38 Orang / Bulan	35.321.411.417	33 Orang / Bulan	7.788.760.512	35 Orang / Bulan	7.161.987.991	106,06	91,95	68 Orang / Bulan	14.003.489.800	178,95	39,65
	Tersedianya Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan Diskop UKM Kabupaten Bandung	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	5 Dokumen	40.000.000	2 Dokumen	40.982.000	2 Dokumen	40.982.000	100,00	100,00	3 Dokumen	52.213.990	60,00	130,53
	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun Diskop UKM Kabupaten Bandung	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10 Laporan	20.000.000	2 Laporan	5.432.000	2 Laporan	5.432.000	100,00	100,00	4 Laporan	8.131.936	40,00	40,66
	Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan BPK-RI dan Inspektorat Kabupaten Bandung	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	5 Dokumen	12.500.000	1 Dokumen	764.000	1 Dokumen	764.000	100,00	100,00	3 Dokumen	2.373.968	60,00	18,99
	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran Diskop UKM Kabupaten Bandung	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	22 Laporan	85.000.000	5 Laporan	12.988.380	5 Laporan	10.388.000	100,00	79,98	7 Laporan	26.850.156	31,82	31,59
							Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)	101,21%	91,98%						
							Predikat kinerja Kegiatan	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi						

No	Sasaran	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (intermediate outcome)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun n- 1 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	
	Tersedianya Dokumen Administrasi dan Inventarisasi BMD Diskop UKM	***Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah***	***Persentase ketersediaan dokumen administrasi dan inventarisasi BMD***	***100 %***	***52.500.000***	***100 %***	***13.574.000***	***100,00 %***	***13.574.000***	***100,00***	***100,00***	***100 %***	***172.073.100***	***100,00***	***327,76***
	Tersedianya Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (BMD) Diskop UKM Kabupaten Bandung	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	5 Dokumen	17.500.000	0 Dokumen	-	- Dokumen	-	0,00	0,00	1 Dokumen	437.900	20,00	2,50
	Tersedianya Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah (BMD) Diskop UKM Kabupaten Bandung	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	20 Laporan	15.000.000	4 Laporan	1.864.000	4 Laporan	1.864.000	100,00	100,00	8 Laporan	3.510.000	40,00	23,40
	Tersedianya Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD) Diskop UKM Kabupaten Bandung	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	10 Laporan	20.000.000	3 Laporan	11.710.000	3 Laporan	11.710.000	100,00	100,00	5 Laporan	168.125.200	50,00	840,63
								Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)		**100,00%**		**100,00%**			
								Predikat kinerja Kegiatan		**Sangat Tinggi**		**Sangat Tinggi**			
	Tersedianya Dokumen Administrasi Kepegawaian Diskop UKM	***Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***	***Persentase ketersediaan dokumen administrasi kepegawaian***	***100 %***	***877.750.000***	***100 %***	***221.638.000***	***100,00 %***	***221.407.500***	***100,00***	***99,90***	***100 %***	***376.702.566***	***100,00***	***42,92***
	Tersedianya Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Diskop UKM Kabupaten Bandung	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	13 Dokumen	60.000.000	4 Dokumen	43.564.000	4 Dokumen	43.564.000	100,00	100,00	7 Dokumen	52.768.968	53,85	87,95

No	Sasaran	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (intermediate outcome)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun n- 1 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	
	Tersedianya Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian Diskop UKM Kabupaten Bandung	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	5 Dokumen	27.500.000	1 Dokumen	2.432.000	1 Dokumen	2.432.000	100,00	100,00	2 Dokumen	8.431.836	40,00	30,66
	Tersedianya Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Diskop UKM Kabupaten Bandung	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, danPenilaian Kinerja Pegawai	5 Dokumen	17.500.000	1 Dokumen	642.000	1 Dokumen	642.000	100,00	100,00	2 Dokumen	2.955.752	40,00	16,89
	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Diskop UKM Kabupaten Bandung	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	38 Orang	772.750.000	50 Orang	175.000.000	50 Orang	174.769.500	100,00	99,87	88 Orang	312.546.010	231,58	40,45
							Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)	100,00%	99,90%						
							Predikat kinerja Kegiatan	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi						
	Tersedianya Operasional Kantor Diskop UKM	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	***Persentase Ketersediaan Operasional Perkantoran***	***100 %***	***2.520.400.000***	***40 %***	***596.875.200***	***19,17 %***	***565.002.294***	***47,92***	***94,66***	***37,14 %***	***1.198.971.991***	***37,14***	***47,57***
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor di lingkungan Diskop UKM Kabupaten Bandung	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	50.000.000	1 Paket	10.000.000	1 Paket	9.976.625	100,00	99,77	2 Paket	17.250.965	40,00	34,50
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor di lingkungan Diskop UKM Kabupaten Bandung	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	38 Paket	750.000.000	10 Paket	135.798.600	8 Paket	135.121.262	80,00	99,50	19 Paket	326.744.012	50,00	43,57
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor di lingkungan Diskop UKM Kabupaten Bandung	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	50.000.000	1 Paket	10.850.000	1 Paket	10.822.600	100,00	99,75	2 Paket	20.822.600	40,00	41,65

No	Sasaran	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (intermediate outcome)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun n- 1 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan di lingkungan Diskop UKM Kabupaten Bandung	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	30 Paket	245.400.000	8 Paket	38.533.600	8 Paket	33.268.650	100,00	86,34	17 Paket	84.295.600	56,67	34,35
	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan di lingkungan Diskop UKM Kabupaten Bandung	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	5 Dokumen	50.000.000	2 Dokumen	13.125.000	2 Dokumen	13.125.000	100,00	100,00	4 Dokumen	25.185.000	80,00	50,37
	Terlaksannya Fasilitasi Kunjungan Tamu di lingkungan Diskop UKM Kabupaten Bandung	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	60 Laporan	100.000.000	12 Laporan	28.250.000	12 Laporan	25.705.000	100,00	90,99	24 Laporan	47.955.000	40,00	47,96
	Terlaksannya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Pegawai Diskop UKM Kabupaten Bandung	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan	900.000.000	12 Laporan	308.602.000	12 Laporan	285.267.157	100,00	92,44	24 Laporan	568.445.014	40,00	63,16
	Tersedianya Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Diskop UKM Kabupaten Bandung	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5 Dokumen	375.000.000	2 Dokumen	51.716.000	2 Dokumen	51.716.000	100,00	100,00	5 Dokumen	108.273.800	100,00	28,87
							Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)	**97,50%**	**94,66%**						
							Predikat kinerja Kegiatan	**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						
	Tersedianya Aset Diskop UKM dalam Kondisi Baik	***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	***Persentase Aset dalam Kondisi Baik***	***96,82 %***	***113.905.000***	***95,32 %***	***21.722.700***	***95,00 %***	***21.338.500***	***99,66***	***98,23***	***95,00 %***	***27.665.500***	***98,12***	***24,29***
	Tersedianya Mebelair di lingkungan Diskop UKM Kabupaten Bandung	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	26 Unit	113.905.000	4 Unit	21.722.700	4 Unit	21.338.500	100,00	98,23	6 Unit	27.665.500	23,08	24,29

No	Sasaran	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (intermediate outcome)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun n- 1 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	
							Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)	100,00%	98,23%						
							Predikat kinerja Kegiatan	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi						
	Tersedianya Layanan Kantor Diskop UKM	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Persentase Laporan Penyediaan Jasa Penunjang sesuai ketentuan***	***100 %***	***2.888.078.000***	***40 %***	***1.387.713.325***	***20,00 %***	***1.279.177.917***	***50,00***	***92,18***	***40 %***	***1.893.293.621***	***40,00***	***65,56***
	Terbayarkannya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik di lingkungan Diskop UKM Kabupaten Bandung	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 Laporan	236.375.000	12 Laporan	207.546.925	12 Laporan	100.206.717	100,00	48,28	24 Laporan	142.500.040	40,00	60,29
	Terbayarkannya Jasa Pelayanan Umum Kantor di lingkungan Diskop UKM Kabupaten Bandung	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60 Laporan	2.651.703.000	12 Laporan	1.180.166.400	12 Laporan	1.178.971.200	100,00	99,90	24 Laporan	1.750.793.581	40,00	66,03
							Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)	100,00%	92,18%						
							Predikat kinerja Kegiatan	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi						
	Terpeliharanya Aset Diskop UKM dalam Kondisi Baik	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Persentase Aset dalam Kondisi Baik***	***96,82 %***	***2.646.745.000***	***95,32 %***	***313.929.500***	***95,00 %***	***302.469.872***	***99,66***	***96,35***	***95,00 %***	***648.327.214***	***98,12***	***24,50***
	Terpeliharanya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan di lingkungan Diskop UKM Kabupaten Bandung	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	138.750.000	1 %	43.850.000	1 %	43.670.300	100,00	99,59	2 %	69.760.432	200,00	50,28
	Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan di lingkungan Diskop UKM Kabupaten Bandung	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atauLapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 Unit	703.500.000	18 Unit	159.600.000	18 Unit	149.073.272	100,00	93,40	36 Unit	247.991.576	200,00	35,25
	Terpeliharanya Peralatan dan Mesin di lingkungan Diskop UKM Kabupaten Bandung	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	150 Unit	210.000.000	17 Unit	22.900.000	17 Unit	22.720.300	100,00	99,22	45 Unit	79.123.472	30,00	37,68

No	Sasaran	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (intermediate outcome)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun n- 1 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	
	Terpeliharanya Gedung Kantor dan Bangunan di lingkungan Diskop UKM Kabupaten Bandung	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2 Unit	1.594.495.000	1 Unit	87.579.500	1 Unit	87.006.000	100,00	99,35	2 Unit	251.451.734	100,00	15,77
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)								100,00%	96,35%						
Predikat kinerja Kegiatan								Sangat Tinggi	Sangat Tinggi						
Rata-rata capaian kinerja Program (%)								99,84%	92,68%						
Predikat kinerja Program								Sangat Tinggi	Sangat Tinggi						
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran dari Seluruh Program (%)								107,68%	93,39%						
Predikat kinerja dari Seluruh Program								Sangat Tinggi	Sangat Tinggi						

Sumber : Hasil Analisis Diskop UKM, 2024

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN DISKOP UKM

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bandung tidak memiliki indikator kinerja yang ditentukan dalam SPM, dalam hal ini Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bandung menetapkan indikator kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

Hasil-hasil pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi dan UKM Tahun 2021-2026 akan dijelaskan secara rinci. Pencapaian ini memberikan landasan bagi perbaikan kebijakan dan sebagai landasan untuk penyusunan kebijakan baru dalam memfasilitasi Koperasi dan UKM untuk semakin berdaya saing.

1. Perkembangan Koperasi

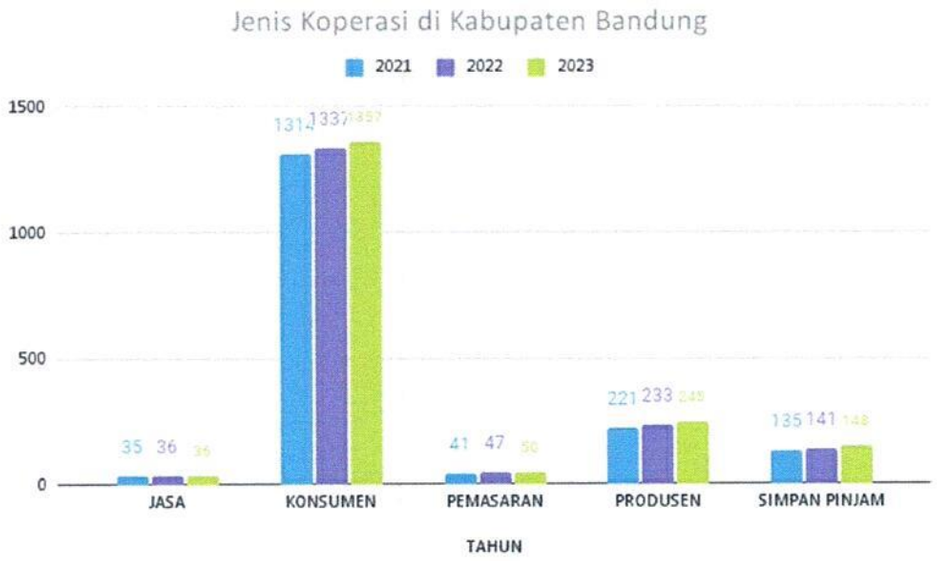
   Perkembangan koperasi di Kabupaten Bandung saat ini menunjukkan kinerja yang baik selama 5 tahun terakhir. Jika dilihat dari pertumbuhannya, jumlah koperasi selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Terlihat bahwa terjadi peningkatan sebesar 2,29% jumlah koperasi dari 1794 koperasi menjadi 1836 koperasi. Dari 1794 koperasi terdapat 970 koperasi aktif atau terjadi kenaikan 2,47% selama 5 tahun terakhir. Dan terdapat 866 koperasi yang tidak aktif atau terjadi peningkatan 2,08% selama 5 tahun terakhir. Jumlah koperasi dalam kurun waktu 5 tahun terakhir terus mengalami peningkatan hingga tahun 2023. Dari total koperasi yang ada, jika ditinjau dari jumlah koperasi hanya sekitar 52.83% koperasi yang berstatus aktif.

   Jika dilihat dari jenis koperasi menurut undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, terdapat empat jenis koperasi di Indonesia yaitu Koperasi Produsen, Koperasi konsumen, koperasi simpan pinjam dan koperasi jasa lain. Berdasarkan data koperasi di Kabupaten Bandung, jenis koperasi yang mendominasi di Kabupaten Bandung adalah Koperasi Konsumen. Dimana koperasi ini lebih banyak menyediakan berbagai kebutuhan sehari-hari seperti sembako, perabotan, pakaian, dan barang konsumsi lainnya. Kemudian, jika dilihat dari persebaran koperasi di Kabupaten Bandung, koperasi terbanyak terdapat di Pangalengan, Soreang, Baleendah, Ciparay dan Pasirjambu. Kecamatan yang memiliki paling sedikit koperasi adalah Cilengkrang, Bojongsoang, Ibun, Nagreg dan Solokanjeruk.

Grafik 2.1 Perkembangan jumlah Koperasi Tahun 2019 – 2023



Grafik 2.2 Perkembangan Koperasi berdasarkan Jenis Koperasi



Grafik 2.3 Jumlah Koperasi Berdasarkan Kecamatan



Tabel 2.3 Indikator dan Capaian Koperasi tahun 2019 – 2023

No	Indikator	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah Koperasi	1.632	1.652	1.746	1.794	1836
2	Jumlah Koperasi Aktif	806	866	919	946	970
3.	Jumlah Koperasi Tidak Aktif	826	786	821	848	866
4.	Jumlah Koperasi yang melaksanakan RAT	234	188	201	210	245
6	Jumlah Koperasi Berprestasi	-	-	3	3	3
7	Jumlah Koperasi Patuh	25	-	50	60	70
8	Jumlah Koperasi Sehat	12	-	48	54	60

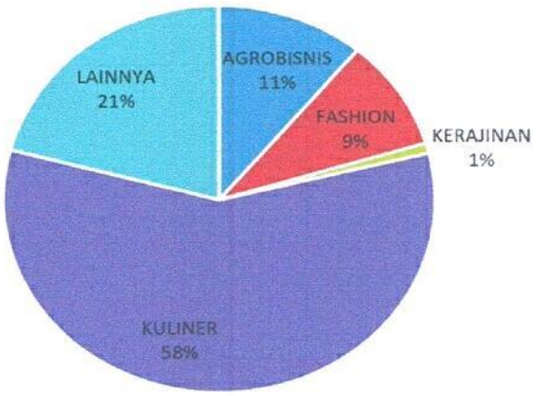
Sumber: Diskop UKM Kabupaten Bandung, 2024

2. Perkembangan UMKM

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, kriteria UMKM dibagi menjadi usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah. Untuk Kabupaten Bandung fokus pemberdayaan dan pengembangan usaha pada usaha mikro saja.

Jumlah usaha mikro tahun 2023 adalah sebanyak 38614 UMKM. Jumlah ini mengalami peningkatan 5.10% dibandingkan tahun sebelumnya. Secara umum, jenis usaha yang dimiliki adalah jenis usaha kuliner yaitu sebesar 58% dari jumlah seluruh UMKM. Untuk Lainnya masuk ke dalam jenis usaha terbesar kedua yaitu 21%, Agrobisnis 11%, Fashion 9%, dan lainnya adalah 1%.

Grafik 2.4 UMKM Berdasarkan Jenis Usaha



Tabel 2.4 Perkembangan UMKM Kabupaten Bandung 2019 – 2023

No	Indikator	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah UMKM	16.748	17.755	17.755	36.739	38614
2.	Jumlah wirausaha baru yang tumbuh	472	381	10.000	18.984	1875

Sumber: Diskop UKM Kabupaten Bandung, 2024

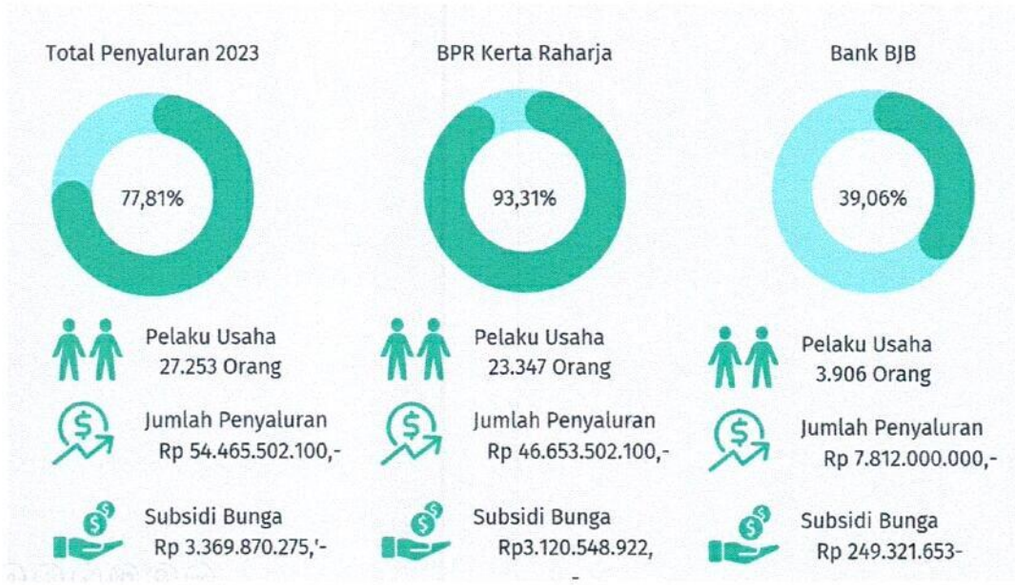
3. Capaian Program Prioritas Bupati – Pinjaman Modal Bergulir bagi UMKM

Kegiatan pemberian pinjaman dana bergulir kepada masyarakat melalui Lembaga Keuangan Bank, yang mana proses pemberian bantuan didasarkan kelayakan usaha sesuai dengan parameter Bank Pengelola Dana Bergulir. Adapun bank-bank yang ditunjuk adalah PT. BPR Kerta Raharja dan BJB Cabang Soreang. Pada tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Bandung menyediakan anggaran untuk program ini sebesar 70 Milyar Rupiah.

Adapun realiasasi program ini pada tahun 2023 sebesar Rp 54.465.502.100,00 atau sebesar 77,81 % bagi 27.253 Pelaku

Usaha. Realisasi subsidi bunga sebesar Rp 3.369.870.575,00 atau sebesar 84,25%. Adapun data realisasi dana bergulir dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 2.1 Penyaluran Pinjaman Dana Bergulir Tahun 2023



Selanjutnya Capaian kinerja kinerja pelayanan Dinas Koperasi UKM beberapa tahun terakhir, dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.5. (T-C.30)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Diskop UKM

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD Tahun ke-				Realisasi Capaian Tahun ke-				Rasio Capaian pada Tahun ke-			
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Persentase Jumlah wirausaha baru yang tumbuh	-	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	-	3,03%	3,14%	3,35%	3,11%	3,19%	6,03%	-	-	105,28%	192,04%	-
2	Persentase usaha mikro yang meningkat kualitasnya	-		-	7,92%	7,92%	7,92%	7,97%	8,05%	8,03%	-	-	101,64%	101,39%	-
3	Persentase Koperasi Patuh	-	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	-	28,57%	28,57%	28,57%	24,88%	28,57%	28,57%	-	-	100,00%	100,00%	-
4	Persentase Koperasi Sehat	-		-	28,57%	28,57%	28,57%	23,88%	32,86%	35,92%	-	-	115,02%	125,73%	-
5	Persentase Koperasi Aktif	-		-	52,5%	52,7%	52,8%	52,6%	52,73%	52,83%	-	-	100,44%	100,25%	-

Sumber : Hasil Analisis Diskop UKM, 2024

2.3. ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

2.3.1. Tingkat Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

Memperhatikan tingkat capaian program dan kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bandung pada tahun 2023, dapat diambil kesimpulan kinerja Perangkat Daerah sangat baik. Perumusan kegiatan telah mengacu kepada RKPD dan Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026, dan perubahan-perubahan pada kegiatan tetap mempertimbangkan konsistensi rencana kegiatan di tahun-tahun sebelumnya. Hal ini menjadi salah satu aspek dalam menunjang pencapaian yang tinggi pada kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dan sifatnya penting antara lain aktivitas **pengendalian atau monitoring** yang termasuk dalam tahapan proses penyusunan dokumen atau pelaksanaan kegiatan, seperti pencapaian output kegiatan serta ketepatan jenis output yang dihasilkan.

2.3.2. Permasalahan dan Hambatan

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bandung mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Koperasi dan Usaha Mikro. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut terdapat beberapa permasalahan, antara lain:

Tabel 2.6 Masalah Pokok, Masalah, Akar Masalah Bidang KUMKM

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Masih rendahnya kualitas dan produktivitas Usaha Koperasi	Masih tingginya jumlah koperasi yang tidak aktif	Belum optimalnya pendataan koperasi dan pembubaran koperasi
	Masih banyaknya koperasi yang tidak tertib administrasi	Kuranganya pemahaman SDM koperasi terhadap administrasi Koperasi
	Masih banyaknya koperasi yang belum menerapkan nilai dan prinsip-prinsip koperasi sesuai kaidah perkoperasian	Belum optimalnya pembinaan dan pendampingan koperasi
	Pengelolaan koperasi masih dilakukan secara konvensional	Fasilitasi Digitalisasi koperasi belum optimal
	Keterbatasan SDM Koperasi dalam mengakases teknologi informasi	SDM koperasi yang tidak mau beralih ke digital
	Masih Kurangnya kesadaran anggota koperasi untuk berpartisipasi aktif pada koperasi	Keberadaan sarana dan prasarana teknologi belum dimanfaatkan secara optimal

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	Masih belum kurangnya SDM koperasi yang kompeten	Kurangnya pendidikan terhadap anggota koperasi
	Masih kurangnya pendampingan terhadap koperasi	Masih belum optimalnya kuantitas dan kualitas diklat perkoperasian
		Terbatasnya SDM yang tersedia untuk melakukan pendampingan
	Belum optimalnya jaringan kerjasama antar koperasi dan lembaga lain	Kurangnya informasi/ fasilitasi yang tersedia
	Belum optimalnya kemampuan koperasi untuk menjangkau akses pasar	Masih banyak koperasi yang tidak bisa memenuhi kelengkapan administrasi untuk ke lembaga keuangan/ permodalan
	Belum optimalnya kemampuan koperasi dalam mengakses permodalan ke lembaga keuangan	Banyak unit usaha koperasi yang masih berada dalam zona nyaman dan tidak melakukan inovasi
	Belum optimalnya koperasi dalam melakukan inovasi untuk meningkatkan produk dan layanan bagi anggota	
Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan bagi Koperasi dan UMKM	Belum optimalnya koordinasi dan keterpaduan antara stakeholder koperasi	Masih adanya ego sektoral antar OPD
	Database yang dimiliki belum lengkap dan valid	Pengelolaan data yang tidak dilakukan dengan baik
	Masih kurangnya pendampingan terhadap koperasi	Terbatasnya SDM yang tersedia
	Masih belum optimalnya fasilitasi *business matching*	Masih kurangnya dari sisi kuantitas
	Belum adanya PERDA UMKM	Perda UMKM masih dalam tahap pembahasan bersama DPRD
	Kurangnya pendampingan dan layanan bisnis bagi UMKM	Terbatasnya ASN yg ada di Dinas
	Masih kurangnya personil ASN dalam pemberdayaan dan pendampingan UMKM	Banyaknya UMKM yang belum memenuhi persyaratan administrasi
	Kurangnya fasilitasi terhadap lembaga permodalan/ pembiayaan	Belum adanya sarana dan prasarana untuk sentra produk UMKM
	Kurangnya sentra produk-produk UMKM	Masih kurangnya sosialisasi kepada UMKM terkait fasilitasi sertifikat produk

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	Masih banyak UMKM yang belum terfasilitasi sertifikat produk (Halal, HAKI, PIRT)	Belum adanya sarana mobil promosi
	Kurangnya pendataan UMKM secara menyeluruh	
	Kurangnya saran dan prasarana informasi dan promosi	
Belum Optimalnya Kapasitas UMKM sebagai penggerak ekonomi masyarakat	Masih kurangnya kapasitas SDM pelaku UMKM dalam pengembangan produk	Banyak para pelaku umkm yang masih berpendidikan SD, SMP dan SMA dan belum mendapatkan peatihan bisnis
		Masih belum optimalnya pelatihan bagi pelaku UMKM
		Keterbatasan pelaku UMKM dalam mengakses teknologi informasi
		Perekrutan tenaga kerja berdasarkan kerabat dekat, bukan berdasarkan keahlian
	Masih kuranganya kemampuan manajemen usaha UMKM	Usaha merupakan turun temurun dari orang tua
	Kurangnya kemampuan pelaku UMKM dalam memenuhi target produksi sesuai permintaan pasar	Kekurangan modal dan sarana prasarana tidak mendukung untuk produksi banyak
	Keterbatasan modal yang dimiliki oleh pelaku UMKM	Perputaran penjualan sedikit sehingga margin yang didapat kurang
	Belum optimalnya kemampuan UMKM dalam mengakses permodalan ke lembaga keuangan	Banyak UMKM yang tidak bisa melengkapi adiministrasi ke lembaga keuangan
		Promosi tentang pentingnya sertifikat produk bagi UMKM kurang maksimal
	Masih kurangnya pengetahuan tentang pentingnya sertifikasi produk	Sarana dan prasarana yang tersedia belum optimal
		Banyaknya supplier sehingga meningkatnya harga bahan baku
	Kualitas packaging produk yang masih belum menarik	
	Keterbatasan bahan baku yang tersedia	Beberapa bahan baku sulit didapatkan atau musiman
	Terbatasnya kemampuan pelaku UMKM dalam menjangkau akses pasar	Kurangnya informasi yang diperoleh oleh UMKM terkait akses pasar dan jaringan usaha

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	Terbatasnya jaringan usaha dan pemasaran UMKM	Tidak semua UMKM dapat terfasilitasi dalam bazar dan pameran
		Masih kurangnya fasilitasi promosi melalui pameran, bazaar, online market
	Pelaku UMKM belum mampu bersaing dengan produk yang sejenis	Kurangnya inovasi dalam meningkatkan kualitas dan layanan produk
	Masih kurangnya *business matching*	Kurangnya pemetaan potensi dan kebutuhan

2.3.3. Dampak Visi dan Misi Kepala Daerah Terhadap capaian Program

Sesuai dengan visi Kabupaten Bandung **"Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bandung yang Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis, dan Sejahtera"** dan Misi ke 1 (satu) **"Membangkitkan daya saing daerah"** maka untuk tujuan dan sasaran Diskop UKM ditetapkan sebagai berikut :

Gambar 2.2 Tujuan dan Sasaran Diskop UKM



Berdasarkan telaahan tersebut maka perlu penjabaran lebih detil mengenai faktor-faktor apa yang menjadi penghambat dan pendorong pelayanan perangkat daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepada daerah. Berikut adalah hasil telaahannya :

Tabel 2.7 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Koperasi dan UKM ditinjau dari Sasaran RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2021 - 2026

No	Sasaran	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
Visi. : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bandung yang Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis, dan Sejahtera				
Misi: Membangkitkan Daya Saing Daerah				
1	Meningkatnya daya saing produk unggulan industri	Belum optimalnya kapasitas UMKM sebagai penggerak ekonomi masyarakat	Adanya UMKM dalam jumlah besar merupakan modal dasar untuk berkontribusi dalam pengerak ekonomi	masih lemahnya penguasaan dan penerapan teknologi
				kurangnya kemampuan pelaku UMKM dalam memenuhi target produksi sesuai permintaan pasar
				Keterbatasan modal yang dimiliki oleh pelaku UMKM
				kurangnya inovasi dalam meningkatkan kualitas dan layanan produk
			Tingginya animo masyarakat untuk bekerja di sektor usaha mikro	Masih kurangnya Kapasitas SDM pelaku UMKM dalam Pengembangan Produk
				terbatasnya kemempuan pelaku usaha UMKM dalam menjangkau akses pasar
				belum optimalnya kemampuan UMKM dalam memgakses permodalan ke lembaga keuangan
				keterbatasan pelaku UMKM dalam mengakses teknologi informasi
		Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan bagi koperasi dan UMKM	Adanya Perda UMKM	Perda UMKM masih dalam tahap pembahasan bersama DPRD
			Adanya kerjasama yang baik antara Dinas, UMKM, koperasi, perguruan tinggi dan stakeholder terkait lainnya	belum optimalnya koordinasi dan keterpaduan antara stakeholder dengan koperasi maupun UMKM

No	Sasaran	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
Visi. : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bandung yang Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis, dan Sejahtera				
Misi: Membangkitkan Daya Saing Daerah				
2	Terwujudnya Koperasi yang Berdaya Saing, Profesional, akuntabel dan modern	Masih rendahnya kualitas dan produktivitas usaha Koperasi	adanya pelatihan dan bimbingan teknis untuk koperasi	terbatasnya SDM yang tersedia untik mengikutin pelatihan dan bimbingan teknis
				masih banyaknya kiperasi yang belum menerapkan nilai dan prinsip-prinsip koperasi sesuai kaidah perkoperasian
			Jumlah Koperasi yang melaksanakan RAT meningkat setiap tahunnya	masih kurangnya pemahaman SDM koperasi terhadap administrasi koperasi
				masih banyaknya koperasi yang tidak tertib administrasi
				kurangnya kesadarananggota koperasi untuk berpartisipasi aktif pada koperasi
				keterbatasan SDM Koperasi dalam mengakses teknologi informasi
			Adanya kerjasama yang baik antara Dinas, koperasi, perguruan tinggi dan stakeholder terkait lainnya	belum optimalnya kemampuan koperasi dalam mengakses permodalan ke lembaga keuangan
				belum optimalnya jaringan kerjasama antar koperasi dan lembaga lainnya

Sumber : Hasil Analisis Diskop UKM, 2021

2.3.4. Tantangan dan Peluang Dalam Meningkatkan Pelayanan Perangkat Daerah

Tantangan pengembangan pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bandung kedepan yakni :

1. Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Diskop UKM

   SOTK Dinas Koperasi dan UKM dinilai masih kurang optimal untuk mengakomodir amanat Peraturan Kementerian Dalam

Negeri (Permendagri) No. 90 Tahun 2019, sehingga sasaran pembangunan yang terkait dengan Pengembangan Koperasi dan UMKM kedepan akan sulit tercapai.

2. Nomenklatur Bidang pada Dinas Koperasi dan UKM

   Nomenklatur baik untuk setiap bidang masih belum mencerminkan fungsi kebijakan dan tujuan organisasi. Untuk itu indikator kinerja setiap bidang kurang memenuhi kaidah indikator kinerja yang *Specific, Measurable, Achievable, Realistic and Timely (SMART).* Selain itu, berdampak juga pada kegiatan pada masing-masing bidang yang belum sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan.

3. Belum adanya Proses bisnis pada tingkat struktur eselon

   Pada tingkat struktur eselon II atau Kepala Dinas, belum terdapat keterkaitan proses bisnis yang jelas serta jenjang struktur di setiap bidang sampai dengan eselon IV juga masih belum memiliki keterkaitan hubungan kerja *(Business Process)* yang jelas dan terukur, sehingga penyusunan peta proses bisnis harus dilaksanakan.

4. Fungsi Perumusan Kebijakan dan Koordinasi

   Fungsi perumusan kebijakan dan koordinasi serta sinkronisasi pelaksanaan kebijakan masih belum berjalan dengan optimal.

Peluang pengembangan pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bandung kedepan yakni :

1. Kondisi Umum Kabupaten Bandung

   Berbagai faktor kondisi umum Kabupaten Bandung, seperti kondisi geografis, demografis, perekonomian, sosial dan infrastruktur memberikan peluang yang cukup besar bagi perkembangan koperasi di Kabupaten Bandung. Dari faktor demografis, kabupaten Bandung memiliki jumlah penduduk dan laju pertumbuhan penduduk yang cukup besar. Hal ini dapat menjadi potensi calon anggota koperasi maupun pasar untuk produk dan jasa koperasi potensial. Dari berbagai indikator makro ekonomi, seperti PDRB dan PDRB per kapita, laju pertumbuhan ekonomi, daya beli masyarakat, tingkat konsumsi masyarakat dan investasi, menunjukkan kecenderungan yang terus meningkat. Hal ini mestinya menjadi peluang bagi pengembangan usaha koperasi. Selanjutnya perkembangan dari berbagai lapangan usaha, terutama sektor pertanian, peternakan, perdagangan, industri dan UMKM yang terus meningkat dalam jumlah pelaku, volume usaha dan kebutuhan input produksi untuk usaha di sektor tersebut juga dapat menjadi peluang yang menarik bagi koperasi untuk melayani kebutuhan input ataupun pemasaran output pada sektor tersebut. Kabupaten Bandung juga memiliki lokasi yang strategis dan menghasilkan produk-produk unggulan untuk memenuhi kebutuhan selain pasar Kabupaten Bandung sendiri juga Kota Bandung dan Jakarta

2. Animo Masyarakat untuk mendirikan Koperasi dan UKM

   Adanya orang-orang di perusahaan, instansi pemerintah atau lingkungan tempat tinggal yang memiliki animo untuk mendirikan

koperasi, tentunya merupakan peluang pengembangan koperasi yang potensial. Jika dilihat pertumbuhan jumlah UMKM setiap tahunnya mengalami peningkatan sehingga diharapkan mampu menyerap lebih banyak tenaga kerja dan dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Selain itu, Generasi yang banyak tergabung dalam koperasi dan UMKM adalah generasi milenial, dimana generasi ini merupakan usia produktif sekaligus market yang konsumtif dan generasi ini juga dinilai sanggup menyerap teknologi dengan cepat.

3. Regulasi yang mendukung Koperasi

   Regulasi pemerintah berupa Undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri dan peraturan atau kebijakan lainnya yang mendukung berkembangnya koperasi, merupakan peluang untuk penguatan koperasi, atau akses terhadap sumber daya dan jaringan usaha.

4. Pasar KUMKM terbuka luas

   Produk KUMKM yang bermacam-macam dengan berbagai produk unggulannya merupakan produk yang bebas dijual dan dibutuhkan oleh banyak orang dapat dipasarkan tidak hanya di Kabupaten Bandung, dengan dukungan berbagai platform pemasaran yang telah ada sangat memungkinkan berbagai produk koperasi dan UMKM Kabupaten Bandung dipasarkan ke seluruh kota/daerah Indonesia bahkan dapat diekspor ke mancanegara.

5. Peluang Pengembangan usaha luas

   Koperasi dapat bergerak di berbagai sektor dan bidang usaha. Koperasi produsen yang anggotanya petani, peternak dan perajin dapat mengusahakan berbagai kebutuhan untuk memfasilitasi usaha anggota seperti penyediaan input, proses produksi dan pemasaran hasil produksi. Koperasi pedagang dapat menyediakan barang dagangan dan usaha lainnya untuk kepentingan usaha anggota sebagai pedagang. Koperasi konsumen dapat menyediakan berbagai kebutuhan anggota sebagai konsumen. Jadi peluang usaha koperasi sangat luas, karena pada dasarnya koperasi dapat mengusahakan berbagai kebutuhan anggota dan masyarakat.

6. Dukungan dari Pemangku Kepentingan

   Banyak dukungan yang diberikan oleh para pemangku kepentingan kepada koperasi dan UMKM, misalnya pinjaman modal dana bergulir, dukungan dari lembaga keuangan berupa fasilitasi kredit atau kerja sama untuk penyaluran kredit bagi anggota koperasi. Dunia industri yang menyerap hasil produksi petani, peternak, perajin yang dipasarkan oleh koperasi.

2.3.5. Isu – isu Penting Pelayanan Perangkat Daerah

Perumusan isu-isu strategis didasarkan analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal yaitu peluang dan ancaman serta memperhatikan kekuatan dan kelemahan pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bandung dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, maka isu-isu strategis yang menjadi acuan atau dasar dalam menentukan program dan kegiatan yang

diprioritaskan selama lima tahun ke depan (2021-2026) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebagai berikut :

1. Belum optimalnya kualitas dan produktivitas usaha koperasi.
2. Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan bagi Koperasi dan UMKM.
3. Belum optimalnya kapasitas dan kualitas UMKM.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Pada bagian review terhadap rancangan awal RKPD dilakukan proses membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Hal ini dilakukan untuk melihat apakah sudah sesuai antara RKPD dengan kebutuhan yang ada. Informasi hasil perbandingan tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.8. (T-C.31)
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Perangkat Daerah: Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Uraian	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Ranwal Tahun 2025			Hasil Analisa Kebutuhan		
		Target Setelah Pemetaan	Pagu Indikatif	Lokasi	Lokasi	Target	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH							
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	**Persentase Kapasitas Usaha Mikro**	**7,07%**	**980.000.000,00**	**Kab. Bandung**	**Kab. Bandung**	**7,07%**	**5.121.200.000**
Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	**Persentase Usaha Mikro yang difasilitasi Kegiatan Pemberdayaan**	**7,07%**	**980.000.000,00**	**Kab. Bandung**	**Kab. Bandung**	**7,07%**	**5.121.200.000**
Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	100 Unit Usaha	100.000.000,00	Kab. Bandung	Kab. Bandung	668 Unit Usaha	958.350.000
Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	100 Unit Usaha	50.000.000,00	Kab. Bandung	Kab. Bandung	300 Unit Usaha	187.200.000
Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	200 Unit Usaha	150.000.000,00	Kab. Bandung	Kab. Bandung	625 Unit Usaha	1.750.000.000
Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	30 Orang	40.000.000,00	Kab. Bandung	Kab. Bandung	90 Orang	50.000.000
Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	25 Unit Usaha	50.000.000,00	Kab. Bandung	Kab. Bandung	150 Unit Usaha	175.550.000
Pemulihan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	20 Unit Usaha	100.000.000,00	Kab. Bandung	Kab. Bandung	20 Unit Usaha	100.000.000
Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Usaha Kecil	Jumlah Usaha Mikro yang terfasilitasi	25 Unit Usaha	50.000.000,00	Kab. Bandung	Kab. Bandung	200 Unit Usaha	290.500.000

Uraian	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Ranwal Tahun 2025			Hasil Analisa Kebutuhan		
		Target Setelah Pemetaan	Pagu Indikatif	Lokasi	Lokasi	Target	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8
Pendampingan dan Bantuan Hukum bagi Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	50 Unit Usaha	50.000.000,00	Kab. Bandung	Kab. Bandung	50 Unit Usaha	50.000.000
Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	25 Unit Usaha	50.000.000,00	Kab. Bandung	Kab. Bandung	200 Unit Usaha	755.200.000
Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	50 Unit Usaha	50.000.000,00	Kab. Bandung	Kab. Bandung	50 Unit Usaha	50.000.000
Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	40 Unit Usaha	150.000.000,00	Kab. Bandung	Kab. Bandung	-	0
Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata	7000 Unit Usaha	40.000.000,00	Kab. Bandung	Kab. Bandung	620 Unit Usaha	100.000.000
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	105 Orang	100.000.000,00	Kab. Bandung	Kab. Bandung	595 Orang	654.400.000
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	**Persentase Kualitas Usaha Mikro**	**5,26%**	**1.350.000.000,00**	**Kab. Bandung**	**Kab. Bandung**	**5,26%**	**1.906.900.000**
Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	**Persentase Usaha Mikro yang difasilitasi pengembangan Usaha**	**5,26%**	**1.350.000.000,00**	**Kab. Bandung**	**Kab. Bandung**	**5,26%**	**1.906.900.000**
Fasilitasi Pengembangan Inkubasi Secara Terpadu dan Berjenjang	Jumlah Inkubator yang Terfasilitasi	4 Lembaga	50.000.000,00	Kab. Bandung	Kab. Bandung	1 Lembaga	50.000.000
Fasilitasi Inkubator Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	40 Unit Usaha	100.000.000,00	Kab. Bandung	Kab. Bandung	100 Unit Usaha	800.000.000
Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	150 Unit Usaha	1.200.000.000,00	Kab. Bandung	Kab. Bandung	1.437 Unit Usaha	1.056.900.000
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	**Persentase Koperasi Patuh**	**28,52%**	**600.000.000,00**	**Kab. Bandung**	**Kab. Bandung**	**28,52%**	**762.300.000**
Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah	**Persentase Koperasi, Koperasi Simpan pinjam/Unit simpan pinjam koperasi yang diperiksa dan diawasi**	**28,52%**	**600.000.000,00**	**Kab. Bandung**	**Kab. Bandung**	**28,52%**	**762.300.000**

Uraian	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Ranwal Tahun 2025			Hasil Analisa Kebutuhan		
		Target Setelah Pemetaan	Pagu Indikatif	Lokasi	Lokasi	Target	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8
Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota							
Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	60 Koperasi	300.000.000,00	Kab. Bandung	Kab. Bandung	200 Koperasi	412.300.000
Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	60 Koperasi	300.000.000,00	Kab. Bandung	Kab. Bandung	175 Koperasi	350.000.000
PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	**Persentase Koperasi Sehat**	**32,32%**	**300.000.000,00**	**Kab. Bandung**	**Kab. Bandung**	**32,32%**	**443.900.918**
Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase KSP/USP yang dinilai Kesehatannya**	**20%**	**300.000.000,00**	**Kab. Bandung**	**Kab. Bandung**	**20%**	**443.900.918**
Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan	100 Unit Usaha	300.000.000,00	Kab. Bandung	Kab. Bandung	135 Unit Usaha	443.900.918
PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	**Persentase Koperasi yang berizin**	**6,38%**	**50.000.000,00**	**Kab. Bandung**	**Kab. Bandung**	**6,38%**	**50.000.000**
Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Fasilitasi Penerbitan Ijin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota**	**7%**	**50.000.000,00**	**Kab. Bandung**	**Kab. Bandung**	**7%**	**50.000.000**
Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasidengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	652 Unit Usaha	50.000.000,00	Kab. Bandung	Kab. Bandung	652 Unit Usaha	50.000.000

Uraian	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Ranwal Tahun 2025			Hasil Analisa Kebutuhan		
		Target Setelah Pemetaan	Pagu Indikatif	Lokasi	Lokasi	Target	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	**Persentase SDM koperasi yang kompeten**	**20,32%**	**700.000.000,00**	**Kab. Bandung**	**Kab. Bandung**	**20,32%**	**250.0000.000**
Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase SDM Koperasi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Koperasi**	**4%**	**700.000.000,00**	**Kab. Bandung**	**Kab. Bandung**	**4%**	**250.0000.000**
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	50 Orang	700.000.000,00	Kab. Bandung	Kab. Bandung	80 Orang	250.0000.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	**Persentase Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi**	**4,50%**	**750.000.000,00**	**Kab. Bandung**	**Kab. Bandung**	**4,50%**	**1.228.000.000**
Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Koperasi yang difasilitasi Kegiatan pemberdayaan dan perlindungan bagi Koperasi**	**100%**	**750.000.000,00**	**Kab. Bandung**	**Kab. Bandung**	**100%**	**1.228.000.000**
Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan	10 Kelompok Masyarakat	100.000.000,00	Kab. Bandung	Kab. Bandung	49 Kelompok Masyarakat	328.000.000
Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya	25 Unit Usaha	100.000.000,00	Kab. Bandung	Kab. Bandung	25 Unit Usaha	100.000.000
Pemulihan Usaha Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang dipulihkan usahanya	25 Unit Usaha	100.000.000,00	Kab. Bandung	Kab. Bandung	25 Unit Usaha	100.000.000
Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Permodalannya	25 Unit Usaha	100.000.000,00	Kab. Bandung	Kab. Bandung	25 Unit Usaha	100.000.000
Fasilitasi Pelaporan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Pelaporannya	240 Unit Usaha	100.000.000,00	Kab. Bandung	Kab. Bandung	260 Unit Usaha	200.000.000
Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	50 Unit Usaha	250.000.000,00	Kab. Bandung	Kab. Bandung	35 Unit Usaha	400.000.000
Jumlah 1			**4.730.000.000,00**				**9.762.300.918**

Uraian	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Ranwal Tahun 2025			Hasil Analisa Kebutuhan		
		Target Setelah Pemetaan	Pagu Indikatif	Lokasi	Lokasi	Target	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**- Nilai AKIP - Nilai IKM - Persentase Aset dalam Kondisi Baik**	**82.10 Point 85.25 Point 97.88 %**	**12.258.794.610,00**	**Kab. Bandung**	**Kab. Bandung**	**82.10 Point 85.25 Point 97.88 %**	**13.347.643.986**
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100%**	**269.358.200,00**	**Kab. Bandung**	**Kab. Bandung**	**100%**	**454.500.000**
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	140.000.000,00	Kab. Bandung	Kab. Bandung	5 Dokumen	315.000.000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	12.000.000,00	Kab. Bandung	Kab. Bandung	1 Dokumen	18.000.000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	15.158.200,00	Kab. Bandung	Kab. Bandung	2 Dokumen	20.000.000
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1.200.000,00	Kab. Bandung	Kab. Bandung	1 Dokumen	1.500.000
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Bandung	Kab. Bandung	2 Dokumen	2.000.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	9.000.000,00	Kab. Bandung	Kab. Bandung	6 Laporan	13.000.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Laporan	90.000.000,00	Kab. Bandung	Kab. Bandung	7 Laporan	5.000.000
Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	-	-	Kab. Bandung	Kab. Bandung	1 Dokumen	5.000.000
Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	-	-	Kab. Bandung	Kab. Bandung	67 Data	75.000.000

Uraian	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Ranwal Tahun 2025			Hasil Analisa Kebutuhan		
		Target Setelah Pemetaan	Pagu Indikatif	Lokasi	Lokasi	Target	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase Ketersediaan Dokumen Keuangan Dinas**	**100%**	**9.005.573.692,00**	**Kab. Bandung**	**Kab. Bandung**	**100%**	**9.460.323.986**
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang / Bulan	8.934.073.692,00	Kab. Bandung	Kab. Bandung	39 Orang / Bulan	9.436.823.986
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	2 Dokumen	45.000.000,00	Kab. Bandung	Kab. Bandung	1 Dokumen	3.000.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	7.500.000,00	Kab. Bandung	Kab. Bandung	2 Laporan	7.500.000
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Bandung	Kab. Bandung	1 Dokumen	1.500.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	5 Laporan	17.000.000,00	Kab. Bandung	Kab. Bandung	5 Laporan	11.550.000
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Persentase ketersediaan dokumen administrasi dan inventarisasi BMD**	**100%**	**47.000.000,00**	**Kab. Bandung**	**Kab. Bandung**	**100%**	**4.300.000**
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	500.000,00	Kab. Bandung	Kab. Bandung	-	-
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	1.500.000,00	Kab. Bandung	Kab. Bandung	4 Laporan	1.500.000
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	45.000.000,00	Kab. Bandung	Kab. Bandung	2 Laporan	2.800.000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase ketersediaan dokumen administrasi kepegawaian**	**100%**	**315.360.000,00**	**Kab. Bandung**	**Kab. Bandung**	**100%**	**269.000.000**
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	88.000.000,00	Kab. Bandung	Kab. Bandung	-	-
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4 Dokumen	49.000.000,00	Kab. Bandung	Kab. Bandung	4 Dokumen	75.000.000

Uraian	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Ranwal Tahun 2025			Hasil Analisa Kebutuhan		
		Target Setelah Pemetaan	Pagu Indikatif	Lokasi	Lokasi	Target	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Bandung	Kab. Bandung	1 Dokumen	1.000.000
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, danPenilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	500.000,00	Kab. Bandung	Kab. Bandung	1 Dokumen	500.000
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	175.860.000,00	Kab. Bandung	Kab. Bandung	50 Orang	192.500.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Ketersediaan Operasional Perkantoran**	**80%**	**420.000.000,00**	**Kab. Bandung**	**Kab. Bandung**	**80%**	**488.000.000**
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.000.000,00	Kab. Bandung	Kab. Bandung	1 Paket	5.000.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	65.000.000,00	Kab. Bandung	Kab. Bandung	1 Paket	153.000.000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	10.000.000,00	Kab. Bandung	Kab. Bandung	1 Paket	10.000.000
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	9 Paket	40.000.000,00	Kab. Bandung	Kab. Bandung	9 Paket	40.000.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	2 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Bandung	Kab. Bandung	2 Dokumen	10.000.000
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	20.000.000,00	Kab. Bandung	Kab. Bandung	12 Laporan	20.000.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	180.000.000,00	Kab. Bandung	Kab. Bandung	12 Laporan	250.000.000
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3 Dokumen	90.000.000,00	Kab. Bandung	Kab. Bandung	-	-
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase Aset dalam Kondisi Baik**	**97,88%**	**95.000.000,00**	**Kab. Bandung**	**Kab. Bandung**	**97,88%**	**200.000.000**

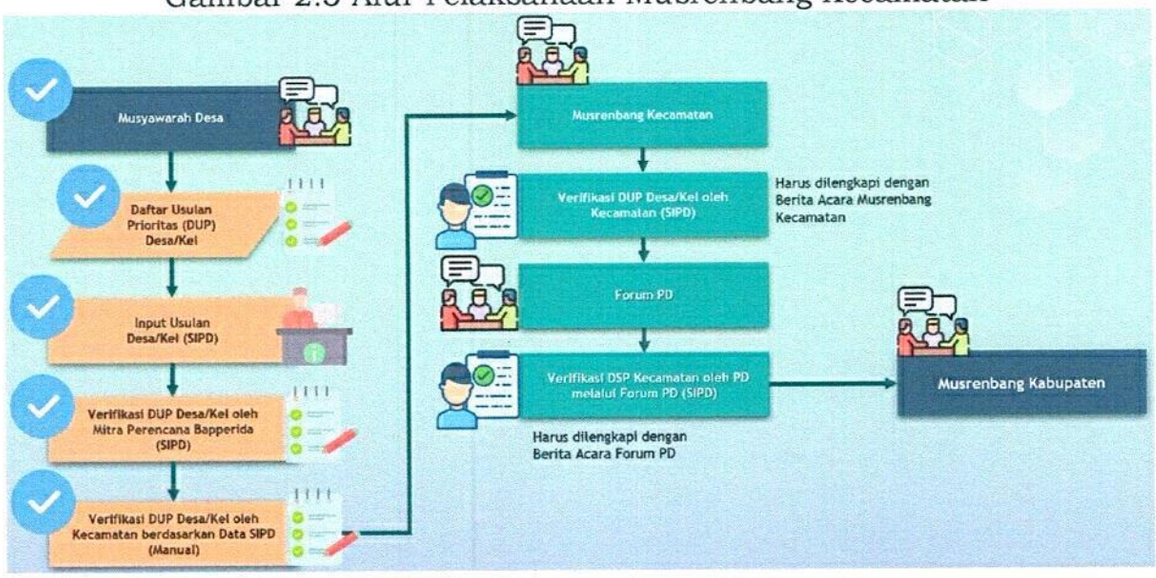
Uraian	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Ranwal Tahun 2025			Hasil Analisa Kebutuhan		
		Target Setelah Pemetaan	Pagu Indikatif	Lokasi	Lokasi	Target	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	5 Unit	50.000.000,00	Kab. Bandung	Kab. Bandung	5 Unit	100.000.000
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	9 Unit	45.000.000,00	Kab. Bandung	Kab. Bandung	9 Unit	100.000.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Pemenuhaan Jasa Penunjang Perkantoran**	**100%**	**1.670.200.000,00**	**Kab. Bandung**	**Kab. Bandung**	**100%**	**2.070.000.000**
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	196.000.000,00	Kab. Bandung	Kab. Bandung	12 Laporan	170.000.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.474.200.000,00	Kab. Bandung	Kab. Bandung	12 Laporan	1.900.000.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Aset dalam Kondisi Baik**	**97,88%**	**436.302.718,00**	**Kab. Bandung**	**Kab. Bandung**	**97,88%**	**401.520.000**
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atauLapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 Unit	182.000.000,00	Kab. Bandung	Kab. Bandung	14 Unit	76.020.000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	19 Unit	13.500.000,00	Kab. Bandung	Kab. Bandung	19 Unit	25.500.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	240.802.718,00	Kab. Bandung	Kab. Bandung	2 Unit	300.000.000
Jumlah 2			**12.258.794.610,00**				**13.347.643.986**
Jumlah Total			**16.988.794.610,00**				**21.153.044.904**

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

2.5.1.Telaahan Terhadap Usulan Musrenbang

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat langsung, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun yang langsung ditujukan kepada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bandung maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang Kecamatan. Berikut alur usulan musrenbang kecamatan :

Gambar 2.3 Alur Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan



Dari hasil pelaksanaan musrenbang yang dilaksanakan, terdapat usulan program/ kegiatan pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah berdasarkan kriteria teknis yang telah ditetapkan. Adapun daftar usulan musrenbang tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 2.9. Usulan Program dan Kegiatan Musrenbang Tahun 2025

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Usulan	Alamat	Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Volume	Satuan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	#MS Sosialisasi Tata Kelola Koperasi	BIHM Hijrotuna, Kab. Bandung	Pinggirsari	Arjasari	10	Orang	Musrenbang Reguler
					Koperasi Mitra Usaha Mandiri Kp. Biru RW. 019, Kab. Bandung	Pangguh	Ibun	10	Orang	Musrenbang Reguler
					RW 15, Kab. Bandung	Sukamanah	Paseh	2	Orang	Musrenbang Reguler
					rw 03, Kab. Bandung	Sukamanah	Paseh	2	Orang	Musrenbang Reguler
					RW.02.12.15, Kab. Bandung	Sindangpanon	Banjaran	5	Orang	Musrenbang Reguler
					kp cibadak rw 005, Kab. Bandung	Andir	Baleendah	5	Orang	Musrenbang Reguler
					Desa Solokanjeruk, Kab. Bandung	Solokanjeruk	Solokanjeruk	5	Orang	Musrenbang Reguler
					desa sukapura, Kab. Bandung	Sukapura	Dayeuhkolot	2	Orang	Musrenbang Reguler
					KP LENGKONG RW 1, Kab. Bandung	Lengkong	Bojongsoang	5	Orang	Musrenbang Reguler
					KP LENGKONG RW2, Kab. Bandung	Lengkong	Bojongsoang	5	Orang	Musrenbang Reguler
					Desa Sukapura, Kab. Bandung	Sukapura	Dayeuhkolot	3	Orang	Musrenbang Reguler
					Koperasi Kosumen Pilardua Berkah Mandiri, Kab. Bandung	Tarumajaya	Kertasari	5	Orang	Musrenbang Reguler
					Koperasi yang ada di Desa Sayati, Kab. Bandung	Sayati	Margahayu	10	Orang	Musrenbang Reguler
					RW 02 DESA RANCAEKEK WETAN, Kab. Bandung	Rancaekek Wetan	Rancaekek	10	Orang	Musrenbang Reguler

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Usulan	Alamat	Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Volume	Satuan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	#MS Sosialisasi Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian	UP2K Majakerta Jl. Raya Paseh No 37, Kab. Bandung	Majakerta	Majalaya	10	Orang	Musrenbang Reguler
					DESA DUKUH, Kab. Bandung	Dukuh	Ibun	10	Orang	Musrenbang Reguler
					Wilayah Desa Cilame , Kab. Bandung	Cilame	Kutawaringin	10	Orang	Musrenbang Reguler
					Kp. Salamanjah RW 01, Kp. Nagrak RW 02, Kp. Cisalak RW 03, Kp. Legok Harendong RW 04, Kp. Cirangan RW 05, Kp.Singkur RW 06, Kp. Nagrak RW 07, Kp. Wangun RW 08, Kab. Bandung	Jatisari	Cangkuang	3	Orang	Musrenbang Reguler
					Wilayah Desa Cilengkrang, Kab. Bandung	Cilengkrang	Cilengkrang	10	Orang	Musrenbang Reguler
					Pkk Desa Bojongemas, Kab. Bandung	Bojongemas	Solokanjeruk	10	Orang	Musrenbang Reguler
					Cicukang, Kab. Bandung	Mekarrahayu	Margaasih	12	Orang	Musrenbang Reguler
					kp pasar kaler rt 01 rw 09, Kab. Bandung	Majalaya	Majalaya	7	Orang	Musrenbang Reguler
					BUMDES DESA SUKAPURA, Kab. Bandung	Sukapura	Kertasari	5	Orang	Musrenbang Reguler
					kampung lengkong RW 02, Kab. Bandung	Lengkong	Bojongsoang	5	Orang	Musrenbang Reguler
					KP LENGKONG RW14, Kab. Bandung	Lengkong	Bojongsoang	5	Orang	Musrenbang Reguler
					Koperasi yang ada di Desa Sayati, Kab. Bandung	Sayati	Margahayu	15	Orang	Musrenbang Reguler
					rw o3 desa cipujeuh, Kab. Bandung	Cipeujeuh	Pacet	3	Orang	Musrenbang Reguler

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Usulan	Alamat	Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Volume	Satuan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	#MS Fasilitasi Kemitraan Usaha bagi UMKM	3 DUSUN, Kab. Bandung	Girimulya	Pacet	3	Orang	Musrenbang Reguler
					Aula Desa Serangmekar, Kab. Bandung	Serangmekar	Ciparay	4	Orang	Musrenbang Reguler
					Desa Karangtunggal , Kab. Bandung	Karangtunggal	Paseh	5	Orang	Musrenbang Reguler
					Desa Patengan, Kab. Bandung	Patengan	Rancabali	10	Orang	Musrenbang Reguler
					Kp Ciwaru Rw 08, Kab. Bandung	Ciporeat	Cilengkrang	10	Orang	Musrenbang Reguler
					KP.BABAKAN KIARA RT 002 RW 003, Kab. Bandung	Margamekar	Pangalengan	2	Orang	Musrenbang Reguler
					Kp. Simpang Rw 003, Kab. Bandung	Cipelah	Rancabali	7	Orang	Musrenbang Reguler
					BIHM Hijrotuna, Kab. Bandung	Pinggirsari	Arjasari	6	Orang	Musrenbang Reguler
					Desa Bojongloa, Kab. Bandung	Bojongloa	Rancaekek	5	Orang	Musrenbang Reguler
					Wilayah Desa Cilame, Kab. Bandung	Cilame	Kutawaringin	2	Orang	Musrenbang Reguler
					Kelurahan Rancaekek Kencana, Kab. Bandung	Rancaekek Kencana	Rancaekek	5	Orang	Musrenbang Reguler
					Jl.Raya Pangalengan 446Kiangroke Banjaran, Kab. Bandung	Kiangroke	Banjaran	3	Orang	Musrenbang Reguler
					Rw.12, Kab. Bandung	Cipaku	Paseh	2	Orang	Musrenbang Reguler
					TP-PKK DESA PANGALENGAN, Kab. Bandung	Pangalengan	Pangalengan	3	Orang	Musrenbang Reguler
					Kp. Panyandaan RW 07, Kab. Bandung	Mandalamekar	Cimenyan	3	Orang	Musrenbang Reguler

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Usulan	Alamat	Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Volume	Satuan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Kp Cihampelas RT 001 RW 005, Kab. Bandung	Sindangsari	Paseh	2	Orang	Musrenbang Reguler
					Kp. tenjonagara lebak rw 01 dan kp. sukalilah rw 03, Kab. Bandung	Mekarjaya	Pacet	4	Orang	Musrenbang Reguler
					Desa Kopo, Kab. Bandung	Kopo	Kutawaringin	2	Orang	Musrenbang Reguler
					kp jambatan rw 009, Kab. Bandung	Andir	Baleendah	2	Orang	Musrenbang Reguler
					UMKM Desa Langonsari, Kab. Bandung	Langonsari	Pameungpeuk	10	Orang	Musrenbang Reguler
					Kp. Bojong Asih RT 04 RW 08, Kab. Bandung	Cicalengka Wetan	Cicalengka	13	Orang	Musrenbang Reguler
					Kp.Wdat RT 03 RW 06, Kab. Bandung	Cikawao	Pacet	1	Orang	Musrenbang Reguler
					Desa Warjabakti, Kab. Bandung	Warjabakti	Cimaung	5	Orang	Musrenbang Reguler
					KP. PANUNDAAN , Kab. Bandung	Panundaan	Ciwidey	5	Orang	Musrenbang Reguler
					KAMPUNG LENGKONG RW 5, Kab. Bandung	Lengkong	Bojongsoang	1	Orang	Musrenbang Reguler
					KAMPUNG LENGKONG RW 6, Kab. Bandung	Lengkong	Bojongsoang	1	Orang	Musrenbang Reguler
					kampung lengkong rw 14, Kab. Bandung	Lengkong	Bojongsoang	1	Orang	Musrenbang Reguler
					kampung lengkong rw 15, Kab. Bandung	Lengkong	Bojongsoang	1	Orang	Musrenbang Reguler
					Jl Raya Dayeuhkolot Dusun I, Dusun II,	Citeureup	Dayeuhkolot	3	Orang	Musrenbang Reguler

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Usulan	Alamat	Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Volume	Satuan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Dusun III, Dusun IV, Kab. Bandung					
					Rw 06 Batukarut, Kab. Bandung	Cikoneng	Pasirjambu	3	Orang	Musrenbang Reguler
					Kp.Citeureup Rw-002 Desa Dayeuhkolot, Kab. Bandung	Dayeuhkolot	Dayeuhkolot	2	Orang	Musrenbang Reguler
					Kp.Cilisung Rw-03 Desa Dayeuhkolot, Kab. Bandung	Dayeuhkolot	Dayeuhkolot	2	Orang	Musrenbang Reguler
					Kp.Babakan Sangkuriang Rw-001 Desa Dayeuhkolot, Kab. Bandung	Dayeuhkolot	Dayeuhkolot	2	Orang	Musrenbang Reguler
					Kp.Bojong Asih Rw-005 Desa Dayeuhkolot, Kab. Bandung	Dayeuhkolot	Dayeuhkolot	2	Orang	Musrenbang Reguler
					Koperasi Konsumsi Cimenyan Karya Sejahtera Kp. Ciparungpung Gunung RT 002 RW 002, Kab. Bandung	Cimenyan	Cimenyan	3	Orang	Musrenbang Reguler
					Desa Bandasari, Kab. Bandung	Bandasari	Cangkuang	4	Orang	Musrenbang Reguler
					Kp.Cikembang RW.02 dan RW.17, Kab. Bandung	Cikembang	Kertasari	3	Orang	Musrenbang Reguler
					RT 002 RW 001, Kab. Bandung	Pangauban	Pacet	2	Orang	Musrenbang Reguler
					RW 01 - RW 26, Kab. Bandung	Cileunyi Kulon	Cileunyi	1	Orang	Musrenbang Reguler

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Usulan	Alamat	Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Volume	Satuan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				#MS Sosialisasi Pembiayaan bagi UMKM	Kp.Wargiluyu RW.05, Kab. Bandung	Ancolmekar	Arjasari	10	Orang	Musrenbang Reguler
					Desa Mekarjaya, Kab. Bandung	Mekarjaya	Arjasari	10	Orang	Musrenbang Reguler
					Jl Rancajigang No 71 40382, Kab. Bandung	Padamulya	Majalaya	10	Orang	Musrenbang Reguler
					RW 09, Kab. Bandung	Sukamanah	Paseh	2	Orang	Musrenbang Reguler
					rw 06, Kab. Bandung	Sukamanah	Paseh	2	Orang	Musrenbang Reguler
					kp. paledang rw 06, Kab. Bandung	Cileunyi Wetan	Cileunyi	1	Orang	Musrenbang Reguler
					Kp. Rancatungku RT. 01 RW. 01, Kab. Bandung	Rancatungku	Pameungpeuk	10	Orang	Musrenbang Reguler
					RW07, Kab. Bandung	Lagadar	Margaasih	2	Orang	Musrenbang Reguler
					Kp. Ciluncat RW 001-014 Desa Ciluncat Kecamatan Cangkuang Kabupaten Bandung, Kab. Bandung	Ciluncat	Cangkuang	10	Orang	Musrenbang Reguler
					Desa Gandasari, Kab. Bandung	Gandasari	Katapang	50	Orang	Musrenbang Reguler
					Kp. Pangkalan RT. 02 RW. 07, Kab. Bandung	Wangisagara	Majalaya	10	Orang	Musrenbang Reguler
					Desa Tenjolaya, Kab. Bandung	Tenjolaya	Pasirjambu	10	Orang	Musrenbang Reguler
					Kp.Ciputat RW 006, Kab. Bandung	Andir	Baleendah	5	Orang	Musrenbang Reguler
					Desa Cimekar, Kab. Bandung	Cimekar	Cileunyi	1	Orang	Musrenbang Reguler
					Desa Solokanjeruk, Kab. Bandung	Solokanjeruk	Solokanjeruk	5	Orang	Musrenbang Reguler

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Usulan	Alamat	Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Volume	Satuan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					JL Raya Dayeuhkolot Dusun I, Dusun II, Dusun III, Dusun IV, Kab. Bandung	Citeureup	Dayeuhkolot	3	Orang	Musrenbang Reguler
					KP. PEURIS GIRANG RW.011, Kab. Bandung	Jagabaya	Cimaung	15	Orang	Musrenbang Reguler
					DESA CIKONENG, Kab. Bandung	Cikoneng	Pasirjambu	9	Orang	Musrenbang Reguler
					Kp. Gambung RT 02 RW 03, Kab. Bandung	Mekarsari	Pasirjambu	9	Orang	Musrenbang Reguler
					KP LENGKONG RW 16, Kab. Bandung	Lengkong	Bojongsoang	5	Orang	Musrenbang Reguler
					Desa Cikembang, Kab. Bandung	Cikembang	Kertasari	3	Orang	Musrenbang Reguler
					KP. SAPAN RW.002,RW.006,RW.008,RW.009 , Kab. Bandung	Tegalluar	Bojongsoang	5	Orang	Musrenbang Reguler
					kp cangkuang rw 004, rw 003 rw 006, Kab. Bandung	Cangkuang	Cangkuang	8	Orang	Musrenbang Reguler
					AULA DESA, Kab. Bandung	Resmi Tingal	Kertasari	3	Orang	Musrenbang Reguler
					kelolpok umkm pupja desa maruyung, Kab. Bandung	Maruyung	Pacet	4	Orang	Musrenbang Reguler
				#MS Penyelenggaraan Gelar Produk UMKM	Lapangan Sepak bola Kp. Haminteu RT 001 RW 008 Desa Panyirapan, Kab. Bandung	Panyirapan	Soreang	1	Kegiatan	Musrenbang Reguler
					RW 01 - RW 26, Kab. Bandung	Cileunyi Kulon	Cileunyi	1	Kegiatan	Musrenbang Reguler

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Usulan	Alamat	Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Volume	Satuan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	#MS Fasilitasi Izin Usaha bagi UMKM	KP.MEKARBAKTI RW 01 DAN RW 02, Kab. Bandung	Margamekar	Pangalengan	2	Orang	Musrenbang Reguler
					KP ELOS RW 01 KP LEGOK MUNCANG RW 03, Kab. Bandung	Cijagra	Paseh	2	Orang	Musrenbang Reguler
					Desa Rahayu, Kab. Bandung	Rahayu	Margaasih	2	Orang	Musrenbang Reguler
					RW 04 Desa Bumiwangi, Kab. Bandung	Bumiwangi	Ciparay	6	Orang	Musrenbang Reguler
					Desa Padasuka, Kab. Bandung	Padasuka	Kutawaringin	10	Orang	Musrenbang Reguler
					Desa Sindangpanon, Kab. Bandung	Sindangpanon	Banjaran	2	Orang	Musrenbang Reguler
					RW 1 sd RW 23, Kab. Bandung	Rancamanyar	Baleendah	5	Orang	Musrenbang Reguler
					KANTOR DESA SUDI, Kab. Bandung	Sudi	Ibun	5	Orang	Musrenbang Reguler
					Desa Cikadut, Kab. Bandung	Cikadut	Cimenyan	6	Orang	Musrenbang Reguler
					DS JELEGONG , Kab. Bandung	Jelegong	Kutawaringin	7	Orang	Musrenbang Reguler
					UMKM Desa Jatisari, Kab. Bandung	Jatisari	Kutawaringin	6	Orang	Musrenbang Reguler
					kp. paledang rw 06, Kab. Bandung	Cileunyi Wetan	Cileunyi	1	Orang	Musrenbang Reguler
					PUSKESOS, Kab. Bandung	Margamukti	Pangalengan	1	Orang	Musrenbang Reguler
					kp cibadak rw 005, Kab. Bandung	Andir	Baleendah	5	Orang	Musrenbang Reguler
					cangkuang rw 001 sampai rw 012, Kab. Bandung	Cangkuang	Cangkuang	8	Orang	Musrenbang Reguler
					Desa Cimekar, Kab. Bandung	Cimekar	Cileunyi	1	Orang	Musrenbang Reguler
					Margahayu Tengah, Kab. Bandung	Margahayu Tengah	Margahayu	10	Orang	Musrenbang Reguler

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Usulan	Alamat	Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Volume	Satuan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Desa Jelegong KP. Talun RT 004 RW 011, Kab. Bandung	Jelegong	Rancaekek	10	Orang	Musrenbang Reguler
					Desa Patengan, Kab. Bandung	Patengan	Rancabali	10	Orang	Musrenbang Reguler
					Kp.Kebontiwu RW.16 Desa Padaulun Kec. Majalaya Kab.Bandung, Kab. Bandung	Padaulun	Majalaya	5	Orang	Musrenbang Reguler
					Desa Karangtunggal, Kab. Bandung	Karangtunggal	Paseh	6	Orang	Musrenbang Reguler
					DESA SUKAPURA PPK, Kab. Bandung	Sukapura	Kertasari	5	Orang	Musrenbang Reguler
					Pelaku Usaha di Desa Rancakasumba, Kab. Bandung	Rancakasumba	Solokanjeruk	10	Orang	Musrenbang Reguler
					Ds. Pasirhuni RW. 06 RT. 03, Kab. Bandung	Pasirhuni	Cimaung	8	Orang	Musrenbang Reguler
					kampung lengkong rw 13, Kab. Bandung	Lengkong	Bojongsoang	5	Orang	Musrenbang Reguler
					RW 01 s/d 10 Desa santosa kecamatan kertasari, Kab. Bandung	Santosa	Kertasari	5	Orang	Musrenbang Reguler
5.	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaataan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil	#MS Pelatihan Akuntansi Dasar dan Pengelolaan Keuangan bagi UMKM	Desa Nanjung, Kab. Bandung	Nanjung	Margaasih	4	Orang	Musrenbang Reguler
					RT 04 RW 02, Kab. Bandung	Mekarlaksana	Cikancung	10	Orang	Musrenbang Reguler
					kp.pasanggrahan rt 02 rw 02, Kab. Bandung	Girimulya	Pacet	3	Orang	Musrenbang Reguler
					KP.MWKARBAKTI RW 01 DAN RW 02, Kab. Bandung	Margamekar	Pangalengan	2	Orang	Musrenbang Reguler
					Desa Rahayu, Kab. Bandung	Rahayu	Margaasih	4	Orang	Musrenbang Reguler

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Usulan	Alamat	Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Volume	Satuan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Kp. Sinar Sari RT. 003 RW. 003 Desa Majasetra Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung (Kantor Desa Majasetra), Kab. Bandung	Majasetra	Majalaya	10	Orang	Musrenbang Reguler
					RW 12, Kab. Bandung	Sukamanah	Paseh	5	Orang	Musrenbang Reguler
					Desa Mekarpawitan, Kab. Bandung	Mekarpawitan	Paseh	2	Orang	Musrenbang Reguler
					Tanjungwangi, Kab. Bandung	Tanjungwangi	Pacet	4	Orang	Musrenbang Reguler
					Kp. Cipapakem RW 03, Kab. Bandung	Patrolsari	Arjasari	7	Orang	Musrenbang Reguler
					Desa Bojongemas, Kab. Bandung	Bojongemas	Solokanjeruk	2	Orang	Musrenbang Reguler
					Pengusaha UMKM RW 01 sampai dengan RW 13, Kab. Bandung	Sindanglaya	Cimenyan	10	Orang	Musrenbang Reguler
					Kp.Nunuk Wetan RW.03 (Kelompok Usaha Gordeng), Kab. Bandung	Mekarsari	Pacet	1	Orang	Musrenbang Reguler
					Desa Tarjusari, Kab. Bandung	Tarajusari	Banjaran	3	Orang	Musrenbang Reguler
					Kampung lengkong RW 01, Kab. Bandung	Lengkong	Bojongsoang	2	Orang	Musrenbang Reguler
					kampung lengkong rw 12, Kab. Bandung	Lengkong	Bojongsoang	2	Orang	Musrenbang Reguler
					Jl bongkor rt 03 rw 06, Kab. Bandung	Melatiwangi	Cilengkrang	10	Orang	Musrenbang Reguler
6.	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Usaha Kecil	#MS Fasilitasi HaKI bagi UMKM	Desa Rahayu, Kab. Bandung	Rahayu	Margaasih	4	Orang	Musrenbang Reguler
					Kp. Cikalage Hilir RW 001, Kab. Bandung	Hegarmanah	Cikancung	10	Orang	Musrenbang Reguler

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Usulan	Alamat	Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Volume	Satuan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	USAHA MIKRO (UMKM)	Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan			Desa Kopo, Kab. Bandung	Kopo	Kutawaringin	2	Orang	Musrenbang Reguler
					Desa Tenjolaya, Kab. Bandung	Tenjolaya	Pasirjambu	4	Orang	Musrenbang Reguler
					DESA MANDALAWANGI, Kab. Bandung	Mandalawangi	Nagreg	7	Orang	Musrenbang Reguler
					kampung lengkong RW 08, Kab. Bandung	Lengkong	Bojongsoang	1	Orang	Musrenbang Reguler
					kampung lengkong rw 12, Kab. Bandung	Lengkong	Bojongsoang	1	Orang	Musrenbang Reguler
					RW 01 - RW 26, Kab. Bandung	Cileunyi Kulon	Cileunyi	1	Orang	Musrenbang Reguler
7.	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha Mikro	#MS Fasilitasi Sertifikasi HALAL bagi UMKM	Kp. Miji Rt.002 Rw.004 an. Agus Ishak Rosyadi (Makanan Khas Sunda), Kab. Bandung	Tanjunglaya	Cikancung	5	Orang	Musrenbang Reguler
					Dusun I s/d Dusun VI, Kab. Bandung	Lebakmuncang	Ciwidey	3	Orang	Musrenbang Reguler
					Desa Cijagra, Kab. Bandung	Cijagra	Paseh	1	Orang	Musrenbang Reguler
					Desa Rahayu, Kab. Bandung	Rahayu	Margaasih	3	Orang	Musrenbang Reguler
					Rw. 02 Kp. Cihanyir Galunggung, Cihanyir, Kec. Cikancung , Kab. Bandung	Cihanyir	Cikancung	4	Orang	Musrenbang Reguler
					Kp. Paseh RW. 002, Kab. Bandung	Ibun	Ibun	5	Orang	Musrenbang Reguler
					Desa Margaasih, Kab. Bandung	Margaasih	Cicalengka	8	Orang	Musrenbang Reguler
					Desa Mekarjaya, Kab. Bandung	Mekarjaya	Banjaran	1	Orang	Musrenbang Reguler

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Usulan	Alamat	Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Volume	Satuan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					23 RW di Desa Lamajang, Kab. Bandung	Lamajang	Pangalengan	2	Orang	Musrenbang Reguler
					wilayah desa margamulya (tiga dusun), Kab. Bandung	Margamulya	Pangalengan	2	Orang	Musrenbang Reguler
					Pkk Desa Margamukti, Kab. Bandung	Margamukti	Pangalengan	1	Orang	Musrenbang Reguler
					Desa Pulosari, Kab. Bandung	Pulosari	Pangalengan	2	Orang	Musrenbang Reguler
					LPM, PKK KELURAHAN CIBEUNYING, Kab. Bandung	Cibeunying	Cimenyan	2	Orang	Musrenbang Reguler
					Desa Rancaekek Kulon, Kab. Bandung	Rancaekek Kulon	Rancaekek	2	Orang	Musrenbang Reguler
					KANTOR DESA SUDI , Kab. Bandung	Sudi	Ibun	2	Orang	Musrenbang Reguler
					KP PASIR PARI RT 003 RW 004, Kab. Bandung	Pangauban	Pacet	2	Orang	Musrenbang Reguler
					Desa Cibiru Wetan, Kab. Bandung	Cibiru Wetan	Cileunyi	1	Orang	Musrenbang Reguler
					Desa Tenjolaya, Kab. Bandung	Tenjolaya	Pasirjambu	1	Orang	Musrenbang Reguler
					Kp. Salamanjah RW 01, Kp. Nagrak RW 02, Kp. Cisalak RW 03, Kp. Legok Harendong RW 04, Kp. Cirangan RW 05, Kp.Singkur RW 06, Kp. Nagrak RW 07, Kp. Wangun RW 08, Kab. Bandung	Jatisari	Cangkuang	2	Orang	Musrenbang Reguler

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Usulan	Alamat	Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Volume	Satuan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					KARANG TARUNA KELURAHAN JELEKONG (GEMA SEJAHTERA), Kab. Bandung	Jelekong	Baleendah	5	Orang	Musrenbang Reguler
					Kantor Desa Cimenyan Kp. Cimenyan RT 001 RW 007, Kab. Bandung	Cimenyan	Cimenyan	3	Orang	Musrenbang Reguler
					Desa Cisondari, Kab. Bandung	Cisondari	Pasirjambu	1	Orang	Musrenbang Reguler
					Desa Jelegong KP. Talun RT 004 RW 011, Kab. Bandung	Jelegong	Rancaekek	2	Orang	Musrenbang Reguler
					DESA MANGGUNGHARJA, Kab. Bandung	Mangunharja	Ciparay	9	Orang	Musrenbang Reguler
					Pelaku Usaha di Desa Rancakasumba, Kab. Bandung	Rancakasumba	Solokanjeruk	4	Orang	Musrenbang Reguler
					Ds. Pasirhuni RW. 06 RT. 03, Kab. Bandung	Pasirhuni	Cimaung	2	Orang	Musrenbang Reguler
					Jl Raya Dayeuhkolot Dusun I, Dusun II, Dusun III, Dusun IV, Kab. Bandung	Citeureup	Dayeuhkolot	3	Orang	Musrenbang Reguler
					DESA PANUNDAAN , Kab. Bandung	Panundaan	Ciwidey	3	Orang	Musrenbang Reguler
					kampung lengkong rw 06, Kab. Bandung	Lengkong	Bojongsoang	1	Orang	Musrenbang Reguler
					DESA TANJUNGSARI, Kab. Bandung	Tanjungsari	Cangkuang	3	Orang	Musrenbang Reguler
					RW 01 - RW 26, Kab. Bandung	Cileunyi Kulon	Cileunyi	1	Orang	Musrenbang Reguler

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Usulan	Alamat	Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Volume	Satuan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
.	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan	#MS Pelatihan Manajemen Usaha dan Kewirausahaan bagi UMKM	Desa Nanjung, Kab. Bandung	Nanjung	Margaasih	4	Orang	Musrenbang Reguler
					Kp. Sukamanah RW 06, Kab. Bandung	Majakerta	Majalaya	2	Orang	Musrenbang Reguler
					RW 010 sampai dengan RW 12 di Wilayah Desa Cangkuang Wetan, Kab. Bandung	Cangkuang Wetan	Dayeuhkolot	4	Orang	Musrenbang Reguler
					Bojong badak endah RT.001 RW.009, Kab. Bandung	Cikasungka	Cikancung	10	Orang	Musrenbang Reguler
					KP.PAMOYANAN RT 01 RW 11 (KEL TANI PAMOYANAN LESTARI), Kab. Bandung	Margamekar	Pangalengan	1	Orang	Musrenbang Reguler
					KELOMPOK HEGAR MANAH, Kab. Bandung	Margamekar	Pangalengan	1	Orang	Musrenbang Reguler
					KP.MEKARBAKTI RW 01 DAN RW 02, Kab. Bandung	Margamekar	Pangalengan	1	Orang	Musrenbang Reguler
					Kp Kanayakan rw 07 Kp Sindangsari Rw 11, Kab. Bandung	Cijagra	Paseh	2	Orang	Musrenbang Reguler
					Kp Tarigu RT 01 RW 01, Kab. Bandung	Margahurip	Banjaran	4	Orang	Musrenbang Reguler
					Kp.Pengkolan RW 03, Kab. Bandung	Banjaran Wetan	Banjaran	2	Orang	Musrenbang Reguler
					desa rancaekek kulon, Kab. Bandung	Rancaekek Kulon	Rancaekek	5	Orang	Musrenbang Reguler
					Desa Rahayu, Kab. Bandung	Rahayu	Margaasih	4	Orang	Musrenbang Reguler
					Kp. Ciaro atau Ranca Rw. 05, Kab. Bandung	Ciaro	Nagreg	10	Orang	Musrenbang Reguler

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Usulan	Alamat	Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Volume	Satuan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					UMKM DESA ALAMENDAH, Kab. Bandung	Alamendah	Rancabali	11	Orang	Musrenbang Reguler
					Rancalame Rw.08, Kab. Bandung	Nagrak	Cangkuang	5	Orang	Musrenbang Reguler
					Jl Kiartsan No 127 RW 002, Kab. Bandung	Banjaran Kulon	Banjaran	2	Orang	Musrenbang Reguler
					Desa Gajahmekar, Kab. Bandung	Gajah Mekar	Kutawaringin	7	Orang	Musrenbang Reguler
					Kp. Pasirpariuk RW. 010, Kab. Bandung	Pasirmulya	Banjaran	4	Orang	Musrenbang Reguler
					RW 15, Kab. Bandung	Sukamanah	Paseh	2	Orang	Musrenbang Reguler
					rw 03, Kab. Bandung	Sukamanah	Paseh	2	Orang	Musrenbang Reguler
					Desa Mekarjaya, Kab. Bandung	Mekarjaya	Banjaran	2	Orang	Musrenbang Reguler
					23 RW di Desa Lamajang, Kab. Bandung	Lamajang	Pangalengan	3	Orang	Musrenbang Reguler
					DESA CIBODAS, Kab. Bandung	Cibodas	Pasirjambu	5	Orang	Musrenbang Reguler
					desa cileunyi wetan, Kab. Bandung	Cileunyi Wetan	Cileunyi	1	Orang	Musrenbang Reguler
					RT 01 s/d 08 RW. 13, Kab. Bandung	Bojongmalaka	Baleendah	5	Orang	Musrenbang Reguler
					Desa Bojongkunci, Kab. Bandung	Bojongkunci	Pameungpeuk	5	Orang	Musrenbang Reguler
					Kampung Bugel Rt.03 Rw.06, Kab. Bandung	Neglasari	Banjaran	3	Orang	Musrenbang Reguler
					kp.bangsoreang rw 11, Kab. Bandung	Mangunjaya	Arjasari	10	Orang	Musrenbang Reguler
					Desa Lagadar, Kab. Bandung	Lagadar	Margaasih	4	Orang	Musrenbang Reguler
					Desa Lagadar, Kab. Bandung	Lagadar	Margaasih	4	Orang	Musrenbang Reguler
					Kp Pasirpondok RW 08, Kab. Bandung	Cikitu	Pacet	2	Orang	Musrenbang Reguler

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Usulan	Alamat	Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Volume	Satuan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					RW 04, RW 12, MUI, Kab. Bandung	Nagreg	Nagreg	10	Orang	Musrenbang Reguler
					Jalan Cagak Rw 4, Kab. Bandung	Ciherang	Nagreg	7	Orang	Musrenbang Reguler
					Desa Kopo, Kab. Bandung	Kopo	Kutawaringin	5	Orang	Musrenbang Reguler
					kp jambatan rw 009, Kab. Bandung	Andir	Baleendah	5	Orang	Musrenbang Reguler
					DS JELEGONG, Kab. Bandung	Jelegong	Kutawaringin	5	Orang	Musrenbang Reguler
					Cicukang, Kab. Bandung	Mekarrahayu	Margaasih	2	Orang	Musrenbang Reguler
					Cicukang, Kab. Bandung	Mekarrahayu	Margaasih	2	Orang	Musrenbang Reguler
					Desa Lampegan, Kab. Bandung	Lampegan	Ibun	10	Orang	Musrenbang Reguler
					KP. SENTAKDULANG RW 12, Kab. Bandung	Mekarmanik	Cimenyan	3	Orang	Musrenbang Reguler
					Kp.Sukalilah RW.14 Desa Padaulun Kec.Majalaya Kab.Bandung, Kab. Bandung	Padaulun	Majalaya	5	Orang	Musrenbang Reguler
					Desa Tarajusari, Kab. Bandung	Tarajusari	Banjaran	2	Orang	Musrenbang Reguler
					Desa Solokanjeruk, Kab. Bandung	Solokanjeruk	Solokanjeruk	5	Orang	Musrenbang Reguler
					Desa Mekarsari Kecamatan Cimaung, Kab. Bandung	Mekarsari	Cimaung	10	Orang	Musrenbang Reguler
					Desa Sukapura (PKK), Kab. Bandung	Sukapura	Kertasari	5	Orang	Musrenbang Reguler
					kampung lengkong RW 02, Kab. Bandung	Lengkong	Bojongsoang	3	Orang	Musrenbang Reguler
					kp lengkong rw 12, Kab. Bandung	Lengkong	Bojongsoang	2	Orang	Musrenbang Reguler
					kp lengkong rw 13, Kab. Bandung	Lengkong	Bojongsoang	2	Orang	Musrenbang Reguler

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Usulan	Alamat	Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Volume	Satuan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Kelompok Gallery UMKM Desa Tarumajaya, Kab. Bandung	Tarumajaya	Kertasari	5	Orang	Musrenbang Reguler
					Jl. Cangkuang No. 2, Kab. Bandung	Biru	Majalaya	3	Orang	Musrenbang Reguler
					Desa Cinunuk, Kab. Bandung	Cinunuk	Cileunyi	1	Orang	Musrenbang Reguler
					AULA DESA, Kab. Bandung	Resmi Tingal	Kertasari	4	Orang	Musrenbang Reguler
					Desa Sukapura, Kab. Bandung	Sukapura	Dayeuhkolot	3	Orang	Musrenbang Reguler
					Jl.Neglasar No.193, Kab. Bandung	Mekarsari	Pacet	2	Orang	Musrenbang Reguler
					kelompok umkm pupja desa maruyung, Kab. Bandung	Maruyung	Pacet	3	Orang	Musrenbang Reguler
9.	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	#MS Pelatihan Strategi Branding dan Promosi bagi UMKM	Karang Taruna Desa Pangalengan, Kab. Bandung	Pangalengan	Pangalengan	2	Orang	Musrenbang Reguler
				#MS Pelatihan Strategi Branding dan Promosi bagi UMKM	Kp.Nangkerok Rt 02 Rw 01 Desa Panyocokan, Kab. Bandung	Panyocokan	Ciwidey	12	Orang	Musrenbang Reguler
				#MS Pelatihan Strategi Branding dan Promosi bagi UMKM	Kp.Sudi RW.002 Kelompok UMKM Berkah (Adi Haryanto, jajang Ruhiat, siti fuadah, julaeha, oha, rijal vahlevi, yahya supardi, wijana, ema, yuli adi yana, ilit tatang, epon, tedi mulyadi), Kab. Bandung	Mekarsari	Pacet	3	Orang	Musrenbang Reguler
				#MS Pelatihan Strategi Branding dan Promosi bagi UMKM	Aula Kantor Desa Margahayu Selatan, Kab. Bandung	Magahayu Selatan	Margahayu	15	Orang	Musrenbang Reguler

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Usulan	Alamat	Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Volume	Satuan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				#MS Pelatihan Strategi Branding dan Promosi bagi UMKM	Desa Rahayu, Kab. Bandung	Rahayu	Margaasih	4	Orang	Musrenbang Reguler
				#MS Pelatihan Strategi Branding dan Promosi bagi UMKM	Kp.Cileutik RW 07, Kab. Bandung	Banjaran Wetan	Banjaran	3	Orang	Musrenbang Reguler
				#MS Pelatihan Strategi Branding dan Promosi bagi UMKM	23 RW di Desa Lamajang, Kab. Bandung	Lamajang	Pangalengan	2	Orang	Musrenbang Reguler
				#MS Pelatihan Strategi Branding dan Promosi bagi UMKM	rw 07, Kab. Bandung	Sukamanah	Paseh	5	Orang	Musrenbang Reguler
				#MS Pelatihan Strategi Branding dan Promosi bagi UMKM	Aula Desa Banjaran, Kab. Bandung	Banjaran Kulon	Banjaran	2	Orang	Musrenbang Reguler
				#MS Pelatihan Strategi Branding dan Promosi bagi UMKM	JL. Bojong Parigi No. 111, Kab. Bandung	Ciparay	Ciparay	6	Orang	Musrenbang Reguler
				#MS Pelatihan Strategi Branding dan Promosi bagi UMKM	PKK DESA MARGAMUKTI, Kab. Bandung	Margamukti	Pangalengan	1	Orang	Musrenbang Reguler
				#MS Pelatihan Strategi Branding dan Promosi bagi UMKM	Kampung Citeureup Rt.01 Rw.14, Kab. Bandung	Neglasari	Banjaran	2	Orang	Musrenbang Reguler
				#MS Pelatihan Strategi Branding dan Promosi bagi UMKM	RW01, Kab. Bandung	Lagadar	Margaasih	4	Orang	Musrenbang Reguler
				#MS Pelatihan Strategi Branding dan Promosi bagi UMKM	Jl.Padamukti No. 02 Rt. 01 Rw. 07, Kab. Bandung	Padamukti	Solokanjeruk	10	Orang	Musrenbang Reguler
				#MS Pelatihan Strategi Branding dan Promosi bagi UMKM	JL SALAMANJAH NO 35, Kab. Bandung	Mekarmaju	Pasirjambu	5	Orang	Musrenbang Reguler
				#MS Pelatihan Strategi Branding dan Promosi bagi UMKM	RT 05/RW 04, Kab. Bandung	Bojongmalaka	Baleendah	5	Orang	Musrenbang Reguler

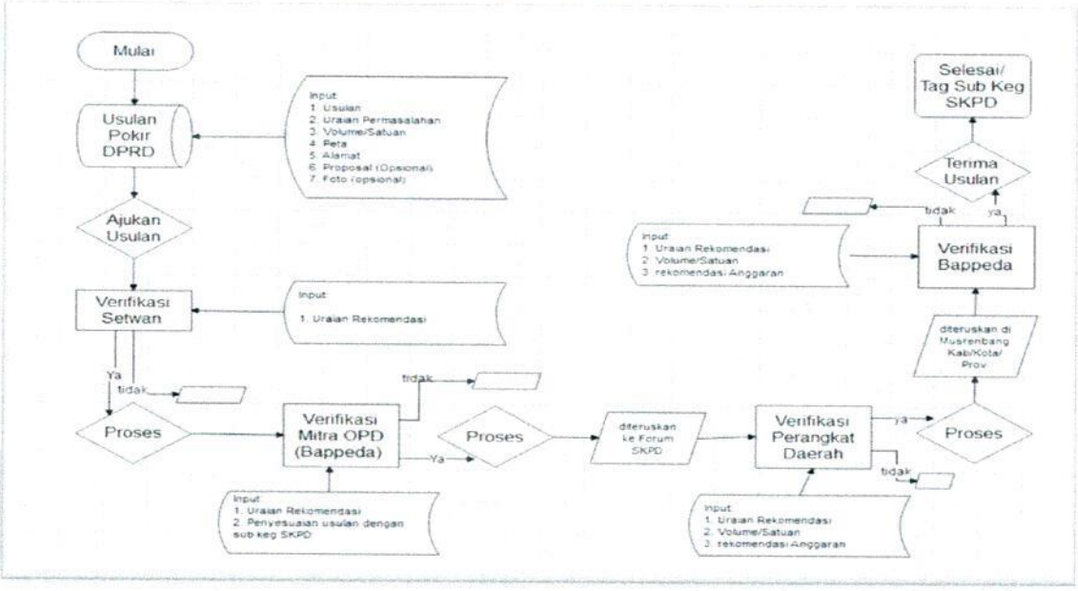
No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Usulan	Alamat	Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Volume	Satuan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				#MS Pelatihan Strategi Branding dan Promosi bagi UMKM	Kp. Salamanjah RW 01, Kp. Nagrak RW 02, Kp. Cisalak RW 03, Kp. Legok Harendong RW 04, Kp. Cirangan RW 05, Kp.Singkur RW 06, Kp. Nagrak RW 07, Kp. Wangun RW 08, Kab. Bandung	Jatisari	Cangkuang	2	Orang	Musrenbang Reguler
				#MS Pelatihan Strategi Branding dan Promosi bagi UMKM	Ciharalang RT 01 RW 01 , Kab. Bandung	Mekarsaluyu	Cimenyan	3	Orang	Musrenbang Reguler
				#MS Pelatihan Strategi Branding dan Promosi bagi UMKM	TP PKK Desa Babakan, Kab. Bandung	Babakan	Ciparay	4	Orang	Musrenbang Reguler
				#MS Pelatihan Strategi Branding dan Promosi bagi UMKM	UMKM Desa Langonsari, Kab. Bandung	Langonsari	Pameungpeuk	15	Orang	Musrenbang Reguler
				#MS Pelatihan Strategi Branding dan Promosi bagi UMKM	RW 001 s/d RW 022, Kab. Bandung	Girimekar	Cilengkrang	10	Orang	Musrenbang Reguler
				#MS Pelatihan Strategi Branding dan Promosi bagi UMKM	Desa Bojongmanggu, Kab. Bandung	Bojongmanggu	Pameungpeuk	5	Orang	Musrenbang Reguler
				#MS Pelatihan Strategi Branding dan Promosi bagi UMKM	Aula Kelurahan Sulaiman Jl Hercules IV No21 Lanud Sulaiman, Kab. Bandung	Sulaiman	Margahayu	15	Orang	Musrenbang Reguler
				#MS Pelatihan Strategi Branding dan Promosi bagi UMKM	(DUSUN 3, RW 07, RW 09, 05 Ds. Nengkelan, Kec. Ciwidey) , Kab. Bandung	Nengkelan	Ciwidey	10	Orang	Musrenbang Reguler
				#MS Pelatihan Strategi Branding dan Promosi bagi UMKM	Desa Nagreg Kendan, Kab. Bandung	Nagreg Kendan	Nagreg	8	Orang	Musrenbang Reguler

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Usulan	Alamat	Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Volume	Satuan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				#MS Pelatihan Strategi Branding dan Promosi bagi UMKM	Kp. Margamulya RT 002 RW 009, Kab. Bandung	Margamulya	Pasirjambu	5	Orang	Musrenbang Reguler
				#MS Pelatihan Strategi Branding dan Promosi bagi UMKM	Jl Raya Dayeuhkolot Dusun I, Dusun II, Dusun III, Dusun IV, Kab. Bandung	Citeureup	Dayeuhkolot	3	Orang	Musrenbang Reguler
				#MS Pelatihan Strategi Branding dan Promosi bagi UMKM	kp.sukasari rw 013, Kab. Bandung	Cibeureum	Kertasari	5	Orang	Musrenbang Reguler
				#MS Pelatihan Strategi Branding dan Promosi bagi UMKM	KP LENGKONG RW 16, Kab. Bandung	Lengkong	Bojongsoang	3	Orang	Musrenbang Reguler
				#MS Pelatihan Strategi Branding dan Promosi bagi UMKM	Kp. Ciseupan RT 001 RW 004 Kantor Desa Malasari, Kab. Bandung	Malasari	Cimaung	8	Orang	Musrenbang Reguler
				#MS Pelatihan Strategi Branding dan Promosi bagi UMKM	Desa Bandasari, Kab. Bandung	Bandasari	Cangkuang	3	Orang	Musrenbang Reguler
				#MS Pelatihan Strategi Branding dan Promosi bagi UMKM	RW. 01 - 10, Kab. Bandung	Neglawangi	Kertasari	5	Orang	Musrenbang Reguler
				#MS Pelatihan Strategi Branding dan Promosi bagi UMKM	AULA DESA, Kab. Bandung	Resmi Tingal	Kertasari	1	Orang	Musrenbang Reguler
				#MS Pelatihan Strategi Branding dan Promosi bagi UMKM	RW 01 - RW 26, Kab. Bandung	Cileunyi Kulon	Cileunyi	1	Orang	Musrenbang Reguler
				#MS Pelatihan Strategi Branding dan Promosi bagi UMKM	Desa Sukapura, Kab. Bandung	Sukapura	Dayeuhkolot	4	Orang	Musrenbang Reguler
				#MUSTI Pelatihan Strategi Branding dan Promosi bagi UMKM	Desa Ganjar Sabar , Kab. Bandung	Ganjar Sabar	Nagreg	25	Orang	Musrenbang Kompetitif
				#MUSTI Pelatihan Strategi Branding dan Promosi bagi UMKM	Padamukti, Kab. Bandung	Padamukti	Solokanjeruk	25	Orang	Musrenbang Kompetitif

2.5.2.Telahaan Terhadap Pokok-pokok Pikiran DPRD

DPRD memberikan saran dan masukan terhadap perumusan Renja 2025 berdasarkan hasil reses dan aspirasi dari masyarakat. Masukan dari pokok-pokok pikiran DPRD tersebut diselaraskan dengan sasaran dan prioritas pembangunan dan dicantumkan ke dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah. Adapun alur usulan Pokir DPRD sebagai berikut :

Gambar 2.4 Alur Usulan Pokir DPRD



Rincian saran dan masukan usulan pokok-pokok pikiran DPRD tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 2.10. Usulan Program dan Kegiatan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Tahun 2025

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pengusul	Usulan	Alamat Lokasi	Volume	Satuan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Hen Hen Asep Suhendar	#PK Sosialisasi Tata Kelola Koperasi	Kp Neglasari Rt 3 Rw 4 Desa Ciwdiey Kec Ciwidey, Kab. Bandung	10	Orang	Pokir
2.	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	Erwin Gunawan	#PK Sosialisasi Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian	Kp. Bojongpulus, Desa Sukasari, Kec. Pameungpeuk, Kab. Bandung	10	Orang	Pokir
				H. Agung Yansusan, S.T., Mud	#PK Sosialisasi Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian	Komplek BSPI Rt 01 Rw 12 Desa Sindangpanon Kecamatan Banjaran, Kab. Bandung	4	Orang	Pokir
				H. Tedi Supriadi, S.Pd.I, M.Si	#PK Sosialisasi Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian	Kp. Bojong Asih RW 04 Desa Dayeuhkolot Kecamatan Dayeuhkolot, Kab. Bandung	11	Orang	Pokir
3.	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Erwin Gunawan	#PK Fasilitasi Kemitraan Usaha bagi UMKM	Kp Pasirjati, RT 1/ RW 10 Desa Lebakwangi, Kec. Arjasari, Kab. Bandung	2	Orang	Pokir
				Hen Hen Asep Suhendar	#PK Fasilitasi Kemitraan Usaha bagi UMKM	Kp Ciwidey Kulon RT 01 RW 13 Desa Ciwidey Kec Ciwidey, Kab. Bandung	2	Orang	Pokir
				Hen Hen Asep Suhendar	#PK Fasilitasi Kemitraan Usaha bagi UMKM	Kp Jalupang Rw 2 Desa Bandasari Kec Cangkuang, Kab. Bandung	2	Orang	Pokir

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pengusul	Usulan	Alamat Lokasi	Volume	Satuan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Hen Hen Asep Suhendar	#PK Fasilitasi Kemitraan Usaha bagi UMKM	Kp Tanjung Rt 2 Rw 6 Desa Tanjungsari Kec Cangkuang, Kab. Bandung	2	Orang	Pokir
				Hen Hen Asep Suhendar	#PK Fasilitasi Kemitraan Usaha bagi UMKM	Kp Cirengit Rt 4 Rw1 Desa Tanjungsari Kec Cangkuang, Kab. Bandung	2	Orang	Pokir
				Hen Hen Asep Suhendar	#PK Fasilitasi Kemitraan Usaha bagi UMKM	Kp Tanjung Rt 1 Rw 5 Desa Tanjungsari Kec Cangkuang, Kab. Bandung	2	Orang	Pokir
				Hen Hen Asep Suhendar	#PK Fasilitasi Kemitraan Usaha bagi UMKM	Kp Griya Sukasari rw 18 Desa Ciwidey Kec Ciwidey, Kab. Bandung	2	Orang	Pokir
				Hen Hen Asep Suhendar	#PK Fasilitasi Kemitraan Usaha bagi UMKM	Kp Legok Harendong Rt 2 Rw 4 Desa Jatisari Kec CAngkuang, Kab. Bandung	2	Orang	Pokir
				Hen Hen Asep Suhendar	#PK Fasilitasi Kemitraan Usaha bagi UMKM	kp Ciseupan rt 2 rw 4 Desa Panyocokan Kec Ciwidey, Kab. Bandung	2	Orang	Pokir
				Hen Hen Asep Suhendar	#PK Fasilitasi Kemitraan Usaha bagi UMKM	Kp Tonggoh Gudang Rt 3 Rw 7 Desa Margamulya Kec Pasirjambu, Kab. Bandung	2	Orang	Pokir
				Hen Hen Asep Suhendar	#PK Fasilitasi Kemitraan Usaha bagi UMKM	Kp lio Rw 12 Desa Margamulya Kec Pasirjambu, Kab. Bandung	1	Orang	Pokir

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pengusul	Usulan	Alamat Lokasi	Volume	Satuan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Hen Hen Asep Suhendar	#PK Fasilitasi Kemitraan Usaha bagi UMKM	Kp Purnamasari Rt 1 Rw 20 Desa Ciwidey Kec Ciwidey, Kab. Bandung	1	Orang	Pokir
				Hen Hen Asep Suhendar	#PK Fasilitasi Kemitraan Usaha bagi UMKM	Kp Ciseupan Rt 3 Rw 18 Desa Panyocokan Kec Ciwidey, Kab. Bandung	1	Orang	Pokir
				Hen Hen Asep Suhendar	#PK Fasilitasi Kemitraan Usaha bagi UMKM	Kp Mumunggang Rt 3 Rw 14 Desa Ciwidey Kec Ciwidey, Kab. Bandung	1	Orang	Pokir
				Hen Hen Asep Suhendar	#PK Fasilitasi Kemitraan Usaha bagi UMKM	Kp Tonjong Rt 1 Rw 30 Desa Ciwdiey Kec Ciwidey, Kab. Bandung	1	Orang	Pokir
				Hen Hen Asep Suhendar	#PK Fasilitasi Kemitraan Usaha bagi UMKM	Kp Sukamanah Rt 1 Rw 14 Desa Lebak Muncang Desa Ciwidey, Kab. Bandung	1	Orang	Pokir
				Hen Hen Asep Suhendar	#PK Fasilitasi Kemitraan Usaha bagi UMKM	Kp Babakan Jampang Rt 3 Rw 17 Desa Alamendah Kec Rancabali, Kab. Bandung	1	Orang	Pokir
				Hen Hen Asep Suhendar	#PK Fasilitasi Kemitraan Usaha bagi UMKM	Kp Arca RW 27 Desa Alamendah Kec Rancabali, Kab. Bandung	1	Orang	Pokir
				Hen Hen Asep Suhendar	#PK Fasilitasi Kemitraan Usaha bagi UMKM	Kp Salam Rw 3 Desa panundaan Kec Ciwidey, Kab. Bandung	1	Orang	Pokir
				Hen Hen Asep Suhendar	#PK Fasilitasi Kemitraan Usaha bagi UMKM	Kp Sinapeul Rt 1 Rw 11 Desa Alamendah	1	Orang	Pokir

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pengusul	Usulan	Alamat Lokasi	Volume	Satuan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Kec Rancabali, Kab. Bandung			
				Riki Ganesa , S.Hut	#PK Fasilitasi Kemitraan Usaha bagi UMKM	pelaku umkm desa cinunuk, desa cibiru hilir, desa cimekar, desa cileunyi wetan kecamatan cileunyi, Kab. Bandung	3	Orang	Pokir
				Dasep Kurnia Gunarudin, S.H., M.M.	#PK Sosialisasi Pembiayaan bagi UMKM	Babakan Desa Rt01/Rw14 No.21 Desa Pamekaran Kec.Soreang, Kab. Bandung	1	Orang	Pokir
				Dasep Kurnia Gunarudin, S.H., M.M.	#PK Sosialisasi Pembiayaan bagi UMKM	Kp.Babakan Neglasari Rt03/Rw03 Desa Sadu Kec.Soreang , Kab. Bandung	1	Orang	Pokir
				Dasep Kurnia Gunarudin, S.H., M.M.	#PK Sosialisasi Pembiayaan bagi UMKM	Kp.Lewiliang Rt02/Rw01 Desa Mekarsari Kec.Pasirjambu , Kab. Bandung	2	Orang	Pokir
				Dasep Kurnia Gunarudin, S.H., M.M.	#PK Sosialisasi Pembiayaan bagi UMKM	Kp.Ngamprah Rt04/Rw08 Desa Nengkelan Kec.Ciwidey, Kab. Bandung	1	Orang	Pokir
				Dasep Kurnia Gunarudin, S.H., M.M.	#PK Sosialisasi Pembiayaan bagi UMKM	Kp.Mumunggang Rt01/Rw14 Desa Ciwidey Kec.Ciwidey, Kab. Bandung	2	Orang	Pokir
				Elin Wati	#PK Sosialisasi Pembiayaan bagi UMKM	Kp. Pangauban RW 15, Desa Pangauban, Kecamatan Pacet, Kab. Bandung	5	Orang	Pokir

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pengusul	Usulan	Alamat Lokasi	Volume	Satuan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Elin Wati	#PK Sosialisasi Pembiayaan bagi UMKM	Kp. Babakan Pereng RW 13, Desa Pangauban, Kecamatan Pacet, Kab. Bandung	1	Orang	Pokir
				Elin Wati	#PK Sosialisasi Pembiayaan bagi UMKM	Kp. Bojong Picung RW 04, Desa Cikawao, Kecamatan Pacet, Kab. Bandung	5	Orang	Pokir
				Elin Wati	#PK Sosialisasi Pembiayaan bagi UMKM	Kp. Papakserang RT 02 RW 01, Desa Serangmekar, Kecamatan Ciparay, Kab. Bandung	1	Orang	Pokir
				Elin Wati	#PK Sosialisasi Pembiayaan bagi UMKM	Kp. Papakserang RT 01 RW 07, Desa Serangmekar, Kecamatan Ciparay, Kab. Bandung	1	Orang	Pokir
				Elin Wati	#PK Sosialisasi Pembiayaan bagi UMKM	Kp. Jongor RT 02 RW 12, Desa Serangmekar, Kecamatan Ciparay, Kab. Bandung	1	Orang	Pokir
				Elin Wati	#PK Sosialisasi Pembiayaan bagi UMKM	Kp. Cipongporang RT 03 RW 19, Desa Serangmekar, Kecamatan Ciparay, Kab. Bandung	1	Orang	Pokir
				Elin Wati	#PK Sosialisasi Pembiayaan bagi UMKM	Kp. Sarimekar RT 02 RW 14, Desa Bumiwangi, Kecamatan Ciparay, Kab. Bandung	1	Orang	Pokir
				Elin Wati	#PK Sosialisasi Pembiayaan bagi UMKM	Kp. Sarimekar RT 01 RW 14, Desa Bumiwangi,	1	Orang	Pokir

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pengusul	Usulan	Alamat Lokasi	Volume	Satuan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Kecamatan Ciparay, Kab. Bandung			
				Elin Wati	#PK Sosialisasi Pembiayaan bagi UMKM	Kp. Sarimekar RT 03 RW 15, Desa Bumiwangi, Kecamatan Ciparay, Kab. Bandung	1	Orang	Pokir
				Elin Wati	#PK Sosialisasi Pembiayaan bagi UMKM	Kp. Babakan Tanjung RT 02 RW 13, Desa Bumiwangi, Kecamatan Ciparay, Kab. Bandung	10	Orang	Pokir
				Elin Wati	#PK Sosialisasi Pembiayaan bagi UMKM	Kp. Ciburial RT 05 RW 07, Desa Sukarame, Kecamatan Pacet, Kab. Bandung	1	Orang	Pokir
				Elin Wati	#PK Sosialisasi Pembiayaan bagi UMKM	Kp. Babakan RT 02 RW 03, Desa Cikawao, Kecamatan Pacet, Kab. Bandung	3	Orang	Pokir
				Elin Wati	#PK Sosialisasi Pembiayaan bagi UMKM	Kp. Bojong Panggang RT 03 RW 08, Kab. Bandung	3	Orang	Pokir
				Elin Wati	#PK Sosialisasi Pembiayaan bagi UMKM	Kp. Wadat RT 01 RW 06, Desa Cikawao, Kecamatan Pacet, Kab. Bandung	2	Orang	Pokir
				Elin Wati	#PK Sosialisasi Pembiayaan bagi UMKM	Kp. Cikawao RT 01 RW 01, Desa Cikawao, Kecamatan Pacet, Kab. Bandung	3	Orang	Pokir
				Elin Wati	#PK Sosialisasi Pembiayaan bagi UMKM	Kp. Tanjunglaya RT 06 RW 08, Desa Sarimahi, Kecamatan , Kab. Bandung	3	Orang	Pokir

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pengusul	Usulan	Alamat Lokasi	Volume	Satuan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Elin Wati	#PK Sosialisasi Pembiayaan bagi UMKM	Kp. Tanjunglaya RT 02 RW 05, Desa Sarimahi, Kecamatan Ciparay, Kab. Bandung	2	Orang	Pokir
				Elin Wati	#PK Sosialisasi Pembiayaan bagi UMKM	Kp. Stasion RT 03 RW 04, Desa Sarimahi, Kecamatan Ciparay, Kab. Bandung	3	Orang	Pokir
				Elin Wati	#PK Sosialisasi Pembiayaan bagi UMKM	Kp. Tanjunglaya RT 02 RW 08, Desa Sarimahi, Kecamatan Ciparay, Kab. Bandung	2	Orang	Pokir
				H. Tedi Supriadi, S.Pd.I, M.Si	#PK Sosialisasi Pembiayaan bagi UMKM	Kp. Ciborerang RW 18 Desa Sangkanhurip Kecamatan Katapang, Kab. Bandung	10	Orang	Pokir
				Maulana Fahmi, S.Si.	#PK Sosialisasi Pembiayaan bagi UMKM	RT 04 RW 11 desa Hegarmanah kec Cikancung , Kab. Bandung	22	Orang	Pokir
4.	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	H. Wawan Ruswandi, S.Sos.I	#PK Fasilitasi Izin Usaha bagi UMKM	Anggota Koperasi Konsumen Berkah Sadaya Kab. Bandung. Jl. Kiastramanggala no 9B RT 05 RW 12 kel Baleendah Kec. Baleendah, Kab. Bandung	20	Orang	Pokir
				Hj. N. ELA NURLAELA, S.TP.	#PK Fasilitasi Izin Usaha bagi UMKM	se kec pangalengan, Kab. Bandung	6	Orang	Pokir
				Maulana Fahmi, S.Si.	#PK Fasilitasi Izin Usaha bagi UMKM	Cikopo,RT 01 RW 04 Desa Babakan	23	Orang	Pokir

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pengusul	Usulan	Alamat Lokasi	Volume	Satuan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Peuteuy Kecamatan Cicalengka, Kab. Bandung			
				Riki Ganesa , S.Hut	#PK Fasilitasi Izin Usaha bagi UMKM	Kecamatan Cileunyi, Kab. Bandung	4	Orang	Pokir
5.	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaataan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil	Ahmad Zaenal Sabarudin	#PK Pelatihan Akuntansi Dasar dan Pengelolaan Keuangan bagi UMKM	Kp. Tarigu Rt. 04 RW. 02 Desa Margahurip, Kecamatan Banjaran , Kabupaten Bandung, Kab. Bandung	3	Orang	Pokir
				H. Uus Haerudin Firdaus, S.H.I	#PK Pelatihan Akuntansi Dasar dan Pengelolaan Keuangan bagi UMKM	KP BATU GAJAH JELEKONG RT 003 / RW 004 , KELURAHAN JELEKONG , KECAMATAN BALEENDAH , Kab. Bandung	2	Orang	Pokir
				Sandi Sudrajat	#PK Pelatihan Akuntansi Dasar dan Pengelolaan Keuangan bagi UMKM	DESA TANGGULUN KECAMATAN IBUN, Kab. Bandung	7	Orang	Pokir
6.	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha Mikro	Erwin Gunawan	#KP Fasilitasi Sertifikasi HALAL bagi UMKM	kp. Sukamenak RT 04/Rw 18 Pangalengan, Kab. Bandung	2	Orang	Pokir
				H. Uus Haerudin Firdaus, S.H.I	#KP Fasilitasi Sertifikasi HALAL bagi UMKM	KP CIKONENG RT 001 / RW 005 , DESA CIKONENG , KECAMATAN CIPARAY , Kab. Bandung	1	Orang	Pokir

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pengusul	Usulan	Alamat Lokasi	Volume	Satuan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				H. Wawan Ruswandi, S.Sos.I	#KP Fasilitasi Sertifikasi HALAL bagi UMKM	Anggota Koperasi Konsumen Berkah Sadaya Kab. Bandung. Jl. Kiastramanggala no 9B RT 05 RW 12 kel Baleendah Kec. Baleendah, Kab. Bandung	1	Orang	Pokir
				Hj. N. ELA NURLAELA, S.TP.	#KP Fasilitasi Sertifikasi HALAL bagi UMKM	se kecamatan pangalengan, Kab. Bandung	1	Orang	Pokir
				Hj. N. ELA NURLAELA, S.TP.	#KP Fasilitasi Sertifikasi HALAL bagi UMKM	se kecamatan cimaung, Kab. Bandung	1	Orang	Pokir
				Hj. N. ELA NURLAELA, S.TP.	#KP Fasilitasi Sertifikasi HALAL bagi UMKM	se kecamatan banjaran, Kab. Bandung	1	Orang	Pokir
				Hj. N. ELA NURLAELA, S.TP.	#KP Fasilitasi Sertifikasi HALAL bagi UMKM	se kec pameungpeuk, Kab. Bandung	1	Orang	Pokir
				Hj. N. ELA NURLAELA, S.TP.	#KP Fasilitasi Sertifikasi HALAL bagi UMKM	se kec arjasari, Kab. Bandung	1	Orang	Pokir
				Yayat Sumirat, S.H.	#KP Fasilitasi Sertifikasi HALAL bagi UMKM	Kp Budiasih Rt 2 Rw 7 Desa Gunungleutik, Kab. Bandung	1	Orang	Pokir
7.	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Ahmad Zaenal Sabarudin	#PK Pelatihan Manajemen Usaha dan Kewirausahaan bagi UMKM	Ibu Ani Meyani R (083116581544) Puri Banjaran Asri,Desa Jagabaya , Kecamatan Cimaung, Kab. Bandung	3	Orang	Pokir
				Ahmad Zaenal Sabarudin	#PK Pelatihan Manajemen Usaha dan Kewirausahaan bagi UMKM	Desa Cimaung Kecamatan Cimaung Kabupaten Bandung, Kab. Bandung	3	Orang	Pokir

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pengusul	Usulan	Alamat Lokasi	Volume	Satuan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Dasep Kurnia Gunarudin, S.H., M.M.	#PK Pelatihan Manajemen Usaha dan Kewirausahaan bagi UMKM	Kp.Ngamprah Rt04/Rw08 Desa Nengkelan Kec.Ciwidey, Kab. Bandung	2	Orang	Pokir
				Dilar Rinaldi, S.Psi	#PK Pelatihan Manajemen Usaha dan Kewirausahaan bagi UMKM	KP. RANCAPANJANG RT 01 RW 23 DESA SUKAMULYA KEC. RANCAEKEK, Kab. Bandung	2	Orang	Pokir
				Dilar Rinaldi, S.Psi	#PK Pelatihan Manajemen Usaha dan Kewirausahaan bagi UMKM	Kp Babakan Barat RT 01 RW 05 Desa Nagreg Kec.Nagreg, Kab. Bandung	3	Orang	Pokir
				Dilar Rinaldi, S.Psi	#PK Pelatihan Manajemen Usaha dan Kewirausahaan bagi UMKM	KP LEUWI RANDU RT 04 RW 10 DESA SANGIANG KEC. RANCAEKEK, Kab. Bandung	3	Orang	Pokir
				Dilar Rinaldi, S.Psi	#PK Pelatihan Manajemen Usaha dan Kewirausahaan bagi UMKM	KP. SAWAH BERA RT 03-04 RW 02 DESA SRIRAHAYU KEC. CIKANCUNG, Kab. Bandung	3	Orang	Pokir
				Elin Wati	#PK Pelatihan Manajemen Usaha dan Kewirausahaan bagi UMKM	Kp. Bojongsari RT 04 RW 05, Desa Mekarsari, Kecamatan Ciparay, Kab. Bandung	1	Orang	Pokir
				Elin Wati	#PK Pelatihan Manajemen Usaha dan Kewirausahaan bagi UMKM	Kp. Cikopo RT 02 RW 07, Desa Bumiwangi, Kecamatan Ciparay, Kab. Bandung	2	Orang	Pokir
				Elin Wati	#PK Pelatihan Manajemen Usaha dan	Kp. Baru Kaso RT 01 RW 10, Desa Sukapura,	2	Orang	Pokir

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pengusul	Usulan	Alamat Lokasi	Volume	Satuan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Kewirausahaan bagi UMKM	Kecamatan Kertasari, Kab. Bandung			
				Erwin Gunawan	#PK Pelatihan Manajemen Usaha dan Kewirausahaan bagi UMKM	Kp. Babakan Sirna Rt 04 Rw 15 Banjarsari Pnagalengan, Kab. Bandung	2	Orang	Pokir
				H. Dadan Konjala, S.H.	#PK Pelatihan Manajemen Usaha dan Kewirausahaan bagi UMKM	RT 003 RW 002 Desa Gandasari Kec Katapang atas nama Paguyuban SAE Kabupaten Bandung, Kab. Bandung	8	Orang	Pokir
				H. Firman B. Sumantri, Mba	#PK Pelatihan Manajemen Usaha dan Kewirausahaan bagi UMKM	RW 01 Kelurahan Andir Kecamatan Baleendah , Kab. Bandung	7	Orang	Pokir
				H. Uus Haerudin Firdaus, S.H.I	#PK Pelatihan Manajemen Usaha dan Kewirausahaan bagi UMKM	KP PASAR KEMIS RW 14 , KELURAHAN MANGGAHANG , KECAMATAN BALEENDAH , Kab. Bandung	2	Orang	Pokir
				H. Uya Mulyana, S.H.I	#PK Pelatihan Manajemen Usaha dan Kewirausahaan bagi UMKM	Desa Sayati Kecamatan Margahayu, Kab. Bandung	2	Orang	Pokir
				Hilman Faroq, S.Pd.I	#PK Pelatihan Manajemen Usaha dan Kewirausahaan bagi UMKM	Kp. Pasir Kawung RW. 06 Desa Cimekar Kec. Cileunyi, Kab. Bandung	7	Orang	Pokir
				Obi Kristian	#PK Pelatihan Manajemen Usaha dan Kewirausahaan bagi UMKM	Kp. Leuwinanggung, RW 07, Desa Talun Kec. Ibun, Kab. Bandung	5	Orang	Pokir

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pengusul	Usulan	Alamat Lokasi	Volume	Satuan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Obi Kristian	#PK Pelatihan Manajemen Usaha dan Kewirausahaan bagi UMKM	Desa Lampegan, Kec. Ibun, Kab. Bandung	3	Orang	Pokir
				Obi Kristian	#PK Pelatihan Manajemen Usaha dan Kewirausahaan bagi UMKM	Desa Cibeet, Kec. Ibun, Kab. Bandung	3	Orang	Pokir
				Obi Kristian	#PK Pelatihan Manajemen Usaha dan Kewirausahaan bagi UMKM	Desa Tanggulun, Kec. Ibun, Kab. Bandung	3	Orang	Pokir
				Obi Kristian	#PK Pelatihan Manajemen Usaha dan Kewirausahaan bagi UMKM	Desa Mekarwangi, Kec. Ibun, Kab. Bandung	3	Orang	Pokir
				Praniko Imam Sagita	#PK Pelatihan Manajemen Usaha dan Kewirausahaan bagi UMKM	Komp. GBA I RT 002 RW 015 Ds. Cipagalo Kec. Bojongsoang, Kab. Bandung	11	Orang	Pokir
				Riki Ganesa , S.Hut	#PK Pelatihan Manajemen Usaha dan Kewirausahaan bagi UMKM	Desa Cibiruhilir, Desa Cileunyi Wetan, Desa Cinunuk dan Desa Cimekar Kecamatan Cileunyi, Kab. Bandung	4	Orang	Pokir
				Sandi Sudrajat	#PK Pelatihan Manajemen Usaha dan Kewirausahaan bagi UMKM	DESA RANCAKENDAL KECAMATAN MAJLAYA, Kab. Bandung	6	Orang	Pokir
				Tedi Surahman, S.E.	#PK Pelatihan Manajemen Usaha dan Kewirausahaan bagi UMKM	Kp. Citepus Wetan RW.01 Kel. Pasawahan Kec. Dayeuhkolot, Kab. Bandung	5	Orang	Pokir

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pengusul	Usulan	Alamat Lokasi	Volume	Satuan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Yayat Hidayat, S.E., M.M.	#PK Pelatihan Manajemen Usaha dan Kewirausahaan bagi UMKM	Rw 01 RT 01 kp.Srikandi Desa Wanasuka Kec Pangalengan, Kab. Bandung	70	Orang	Pokir
8.	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Aep Dedi Ds	#PK Pelatihan Strategi Branding dan Promosi bagi UMKM	Komunitas UMKM Kecil Desa Katapang Kec.Katapang, Kab. Bandung	4	Orang	Pokir
				Erwin Gunawan	#PK Pelatihan Strategi Branding dan Promosi bagi UMKM	Kp. Sindangpanon, Desa Kamasan, Kec. Banjaran, Kab. Bandung	2	Orang	Pokir
				Erwin Gunawan	#PK Pelatihan Strategi Branding dan Promosi bagi UMKM	kp. Sukamenak RT 04/Rw 18 Pangalengan, Kab. Bandung	2	Orang	Pokir
				H. Uus Haerudin Firdaus, S.H.I	#PK Pelatihan Strategi Branding dan Promosi bagi UMKM	KP PASAR KEMIS RT 006 / RW 014 , KELURAHAN MANGGAHANG , KECAMATAN BALEENDAH , Kab. Bandung	3	Orang	Pokir
				H. Uus Haerudin Firdaus, S.H.I	#PK Pelatihan Strategi Branding dan Promosi bagi UMKM	KP PASAR KEMIS RT 006 / 014 , KELURAHAN MANGGAHANG , KECAMATAN BALEENDAH , Kab. Bandung	2	Orang	Pokir

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pengusul	Usulan	Alamat Lokasi	Volume	Satuan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				H. Wawan Ruswandi, S.Sos.I	#PK Pelatihan Strategi Branding dan Promosi bagi UMKM	Anggota Koperasi Konsumen Berkah Sadaya Kab. Bandung. Jl. Kiastramanggala no 9B RT 05 RW 12 kel Baleendah Kec. Baleendah, Kab. Bandung	21	Orang	Pokir
				Riki Ganesa , S.Hut	#PK Pelatihan Strategi Branding dan Promosi bagi UMKM	umkm kecamatan cileunyi, Kab. Bandung	4	Orang	Pokir

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

3.1.1. Telaahan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional 2020-2024

Pasal 159 dan Pasal 160 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 menyatakan bahwa penelaahan terhadap dokumen perencanaan pembangunan nasional dilakukan dengan menelaah kebijakan nasional yang berdampak dan harus dipedomani oleh daerah. Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 memiliki isu strategis dalam kategori Ekonomi sebagai berikut :

Tabel 3.1 Isu Strategis Nasional RPJMN 2020-2024 Kategori Ekonomi

RPJMN 2020-2024	
Kategori	**Isu Strategis**
Ekonomi	1. Keberlanjutan Sumber Daya Alam 2. Efektivitas Tata Kelola Sumber Daya Ekonomi 3. Transformasi Struktural Berjalan Lambat 4. Revolusi Industri 4.0 dan Ekonomi Digital

Sumber : RPJMN Tahun 2020-2024

3.1.2.Telaahan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026

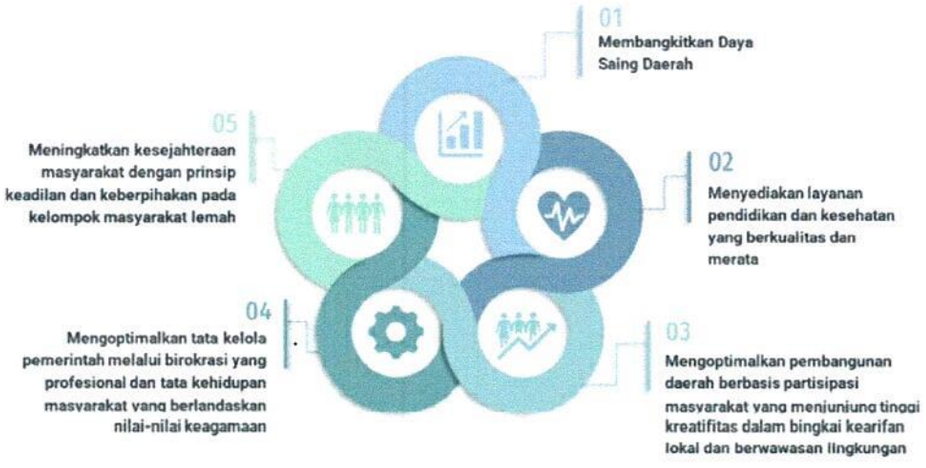
Isu strategis pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut :

1. Kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia;
2. Pembangunan Ekonomi Berkualitas dan Berkelanjutan;
3. Pemerataan Pembangunan Wilayah yang didukung infrastruktur Berkualitas dan Lingkungan yang Berkelanjutan;
4. Peningkatan Demokrasi dan Reformasi Birokrasi.

3.1.3.Telaahan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Bandung Tahun 2024

Visi Kabupaten Bandung tahun 2021-2026 adalah "Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bandung yang Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis dan Sejahtera". Visi tersebut kemudian diturunkan ke dalam 5 (lima) misi sebagai berikut :

Gambar 3.1. Misi Pembangunan Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026



Dalam mewujudkan visi melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan di atas, maka diperlukan kerangka yang jelas pada setiap misi menyangkut tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Adapun Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Bandung dalam RPJMD tahun 2021-2026 yang berkaitan dengan urusan Koperasi dan UMKM adalah :

Tabel 3.2. Hubungan Visi, Misi, Tujuan, Dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Bandung

Tujuan		Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target 2025	Sasaran		Indikator Kinerja Daerah (IKD)		Target 2025
Misi 1 : Membangkitkan Daya Saing Daerah								
1.1	Membangkitkan Daya Saing Perekonomian Daerah	Laju Pertumbuhan Ekonomi	5,30%	1.1.3	Terwujudnya koperasi yang berdaya saing, profesional, akuntabel, dan modern	1.1.3.1	Persentase koperasi yang berkualitas	31,71%

Prioritas pembangunan Kabupaten Bandung tahun 2024 perlu dirancang untuk mendukung prioritas pembangunan baik pada tingkat Provinsi Jawa Barat maupun pada tingkat Nasional. Dapat dilihat pada tabel di bawah ini bahwa prioritas pembangunan di Kabupaten Bandung Urusan Koperasi dan UKM selaras dengan seluruh Prioritas Nasional, sehingga tingkat keselarasan prioritas pembangunan Kabupaten Bandung dengan Prioritas Nasional (PN) adalah 100%. Sinergitas dan sinkronisasi prioritas pembangunan Kabupaten Bandung dengan Prioritas Nasional dan Prioritas Provinsi Jawa Barat disajikan pada Tabel 3.2 dan Tabel 3.3.

Tabel 3.3. Sinergi Prioritas Pembangunan Dan Arah Kebijakan Kabupaten Bandung Dengan Prioritas Pembangunan Nasional

Prioritas Pembangunan Nasional		Prioritas Pembangunan Kabupaten Bandung		Arah Kebijakan Kabupaten Bandung
PN 1	Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	P2	Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan	Revitalisasi manajemen data base industri, usaha mikro dan koperasi
				Pembangunan ekosistem Simpul Inovasi bagi pemberdayaan pelaku usaha mikro
				Peningkatan daya saing usaha koperasi melalui peningkatan kualitas dan fasilitas usaha koperasi, perlindungan usaha serta peningkatan kualitas SDM-nya
				Peningkatan kualitas tata kelola kelembagaan melalui pendampingan untuk pelaksanaan RAT, pendampingan koperasi serta peningkatan kualitas data koperasi

Tabel 3.4. Sinergi Prioritas Pembangunan Dan Arah Kebijakan Kabupaten Bandung Dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat

Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat		Prioritas Pembangunan Kabupaten Bandung		Arah Kebijakan Kabupaten Bandung
PP 1	Pemulihan dan pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis inovasi	P2	Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan	Revitalisasi manajemen data base industri, usaha mikro dan koperasi
PP 8	Gerakan membangun desa			Pembangunan ekosistem Simpul Inovasi bagi pemberdayaan pelaku usaha mikro
				Peningkatan daya saing usaha koperasi melalui peningkatan kualitas dan fasilitas usaha koperasi, perlindungan usaha serta peningkatan kualitas SDM-nya
				Peningkatan kualitas tata kelola kelembagaan melalui pendampingan untuk pelaksanaan RAT, pendampingan koperasi serta peningkatan kualitas data koperasi

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA DISKOP UKM

Keterkaitan antara tujuan dan sasaran yang dirumuskan Diskop UKM Kabupaten Bandung dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.5 Tujuan dan Sasaran Diskop UKM Kabupaten Bandung

Tujuan		Indikator Tujuan PD (IKU)		Target 2025	Sasaran		Indikator Sasaran PD		Target 2025
1	Meningkatnya Kompetensi serta daya saing usaha mikro dan koperasi	1.1	Laju pertumbuhan usaha mikro	5,19%	1.1.1	meningkatnya jumlah wirausaha baru	1.1.1.1	persentase Jumlah wirausaha baru yang tumbuh	7,07%
							1.1.1.2	meningkatnya kualitas usaha mikro	5,26%
		1.2	Persentase koperasi sehat	32,32%	1.2.1	Meningkatnya kepatuhan dan kesehatan koperasi	1.2.1.1	Persentase Koperasi Patuh	28,52%
							1.2.1.2	Persentase Koperasi sehat	32,32%
					1.2.2	Meningkatnya pemberdayaan dan	1.2.2.1	Persentase Koperasi aktif	43,86%

Tujuan		Indikator Tujuan PD (IKU)		Target 2025	Sasaran		Indikator Sasaran PD		Target 2025
						kelembagaan koperasi			
2	Meningkatkan kualitas pengelolaan kinerja organisasi	2.1	Nilai AKIP	82,10 Poin	2.1.1	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan urusan Pemerintah Bidang Koperasi dan UKM	2.1.1.1	Nilai AKIP	82,10 Poin
		2.2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85,25 Poin			2.1.1.2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85,25 Poin
		2.3	Persentase Aset Dalam Kondisi Baik	97,88%			2.1.1.3	Persentase Aset Dalam Kondisi Baik	97,88%

Secara detail, tujuan dan sasaran Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bandung dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.6. Tabel Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2025

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator					
								Outcome Ultimate	Target	Outcome Intermedite	Target	Output	Target
1	**Meningkatnya Kompetisi serta daya saing usaha mikro dan koperasi**	**Laju Pertumbuhan Usaha Mikro**	**5,19%**	**Meningkatnya jumlah wirausaha baru**	**persentase jumlah wirausaha baru yang tumbuh**	**7,07%**	**Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)**	**Presentase Kapasitas Usaha Mikro**	**7,07%**				
							Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan			***Persentase usaha mikro yang Difasilitasi Kegiatan Pemberdayaan***	***7,07%***		
							Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro					Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	668 Unit Usaha
							Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro					Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	300 Unit Usaha
							Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro					Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	625 Unit Usaha
							Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro					Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	90 Orang

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator					
								Outcome Ultimate	Target	Outcome Intermedite	Target	Output	Target
							Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaataan Sistem Aplikasi Pembukuan/ Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil					Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	150 Unit Usaha
							Pemulihan Usaha Mikro					Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	20 Unit Usaha
							Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Usaha Kecil					Jumlah Usaha Mikro yang terfasilitasi	200 Unit Usaha
							Pendampingan dan Bantuan Hukum bagi Usaha Mikro					Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	50 Unit Usaha
							Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha Mikro					Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	200 Unit Usaha
							Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah					Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	50 Unit Usaha
							Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik					Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	0 Unit Usaha
							Penyusunan Basis Data Usaha Mikro					Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata	620 Unit Usaha
							Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan					Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	595 Orang

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator					
								Outcome Ultimate	Target	Outcome Intermedite	Target	Output	Target
				Meningkatnya kualitas usaha mikro	**Persentase usaha mikro yang meningkat kualitasnya**	**5,26%**	**Program Pengembangan UMKM**	**Presentase Kualitas Usaha Mikro**	**5,26%**				
							Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil			***Persentase Usaha Mikro yang difasilitasi pengembangan Usaha***	***5,26%***		
							Fasilitasi Pengembangan Inkubasi Secara Terpadu dan Berjenjang					Jumlah Inkubator yang Terfasilitasi	1 Lembaga
							Fasilitasi Inkubator Usaha Mikro					Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	100 Unit Usaha
							Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi					Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	1437 Unit Usaha
		Persentase Koperasi Sehat	**32,32%**	**Meningkatnya kepatuhan dan kesehatan koperasi**	**persentase koperasi patuh**	**28,52%**	**Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi**	**Presentase Koperasi Patuh**	**28,52%**				
							Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota			***Persentase Koperasi, Koperasi Simpan pinjam/Unit simpan pinjam koperasi yang diperiksa dan diawasi***	***28,57%***		
							Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi					Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	200 Koperasi
							Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah					Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	175 Koperasi

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator					
								Outcome Ultimate	Target	Outcome Intermedite	Target	Output	Target
							Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota						
					persentase koperasi sehat	**32,32%**	**Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi**	**Presentase Koperasi Sehat**	**32,32%**				
							Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			***Persentase Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang dinilai kesehatannya***	***20,00%***		
							Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan					Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan	135 Unit Usaha
				Meningkatnya pemberdayaan dan kelembagaan koperasi	**Persentase Koperasi Aktif**	**43,86%**	**Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian**	**Persentase SDM Koperasi yang Kompeten**	**20,32%**				
							Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota			***Persentase SDM Koperasi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Koperasi***	***4%***		
							Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi					Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	80 Orang

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator					
								Outcome Ultimate	Target	Outcome Intermedite	Target	Output	Target
							Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	**Persentase Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi**	**4,50%**				
							Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotannya dalam Daerah Kabupaten/Kota			***Persentase Koperasi yang difasilitasi kegiatan pemberdayaan dan perlindungan bagi koperasi***	***100,00 %***	
							Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi					Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan	49 Kelompok Masyarakat
							Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota					Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya	25 Unit Usaha
							Pemulihan Usaha Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota					Jumlah Koperasi yang dipulihkan usahanya	25 Unit Usaha
							Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota					Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Permodalannya	25 Unit Usaha
							Fasilitasi Pelaporan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota					Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Pelaporannya	263 Unit Usaha
							Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota					Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	35 Unit Usaha

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator					
								Outcome Ultimate	Target	Outcome Intermedite	Target	Output	Target
							Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	**Persentase Koperasi yang berizin**	**6,38%**				
							Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota			*Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota*	*7%*	
							Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota					Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasidengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	67 Unit Usaha
2	**Meningkatkan kualitas pengelolaan kinerja oragnisasi**	**Nilai AKIP**	**82,10 Poin**	**Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan urusan Pemerintah Bidang Koperasi dan UKM**	**Nilai AKIP**	**82,10 Poin**	**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota**	**- Nilai AKIP - Nilai IKM - Persentase Aset dalam Kondisi Baik**	**82.10 Point 85.25 Point 97.88 %**				
							Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			***Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah***	***100,00 %***		
							Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator					
								Outcome Ultimate	Target	Outcome Intermedite	Target	Output	Target
							Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen
							Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil KoordinasiPenyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen
							Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen
							Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen
							Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan
							Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Laporan

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator					
								Outcome Ultimate	Target	Outcome Intermedite	Target	Output	Target
							Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			***Persentase ketersediaan dokumen administrasi dan inventarisasi BMD***	***100,00 %***		
							Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen
							Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan
							Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan
							Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			***Persentase Ketersediaan dokumen administrasi kepegawaian***	***100,00 %***		
							Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket
							Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4 Dokumen
							Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen
							Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai					Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, danPenilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator					
								Outcome Ultimate	Target	Outcome Intermedite	Target	Output	Target
							Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	**85,25 Poin**		**Indeks Kepuasan Masyarakat**	**85,25 Poin**	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***			***Persentase Ketersediaan Operasional Perkantoran***	***80,00%***		
							Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket
							Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket
							Penyediaan Bahan Logistik Kantor					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket
							Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					Jumlah Paket barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	9 Paket
							Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	2 Dokumen
							Fasilitasi Kunjungan Tamu					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan
							Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator					
								Outcome Ultimate	Target	Outcome Intermedite	Target	Output	Target
							Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3 Dokumen
							Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			***Persentase Pemenuhaan Jasa Penunjang Perkantoran***	***100%***		
							Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan
							Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor yang Disediakan	12 Laporan
		Persentase Aset Dalam Kondisi Baik	**97,88%**		**Persentase Aset Dalam Kondisi Baik**	**97,88%**	***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***			***Persentase Aset Dalam Kondisi Baik***	***97,88%***		
							Pengadaan Mebel					Jumlah Paket Mebel yang disediakan	5 Unit
							Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	9 Unit
							Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			***Persentase Aset Dalam Kondisi Baik***	***95,32%***		
							Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 Unit

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator					
								Outcome Ultimate	Target	Outcome Intermedite	Target	Output	Target
							Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	19 Unit
							Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2 Unit

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan perumusan Program dan Kegiatan

Sesuai dengan kondisi Kabupaten Bandung yang didukung oleh perekonomian yang kompetitif melalui pengembangan ekonomi kreatif dan pembangunan infrastruktur penunjang dengan ditunjang oleh kondisi masyarakat yang memiliki kemampuan untuk menempatkan diri unggul dalam kontek sektoral, mampu membuka diri terhadap tindak inovatif untuk memperoleh keuntungan dari persaingan, baik pada tingkat regional, nasional dan internasional.

Masyarakat Kabupaten Bandung memiliki potensi untuk dikembangkan dalam peningkatan perekonomian masyarakat, diantaranya :

1) Banyaknya kelompok masyarakat yang bergerak dalam bidang pertanian,peternakan maupun olahan makanan sehingga dapat diarahkan untuk membentuk koperasi;
2) Lembaga Koperasi yang cukup banyak untuk dikembangkan;
3) Pelaku Usaha Mikro yang makin bertambah dari tahun ketahun;
4) Produk-produk koperasi dan pelaku usaha yang dapat bersaing dipasaran;

Diharapkan dengan pengembangan dan perberdayaan koperasi serta pelaku usaha Mikro sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bandung dapat mendongkrak perekonomian masyarakat dan mengurangi tingkat pengangguran sehingga mengurangi angka kemiskinan.

Perumusan kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bandung tahun 2025 mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Pencapaian Tujuan dan Sasaran Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bandung Tahun 2023
2. Pencapaian Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bandung Tahun 2023
3. Prioritas pengembangan Perkoperasian dan Usaha Mikro yang diwujudkan dalam Program/kegiatan
4. Kebijakan Terkait Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs dan TPB)

b. Rekapitulasi program dan kegiatan.

Pada tahun 2025 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bandung melaksanakan 8 (delapan) program, 15 (lima belas) kegiatan dan 60 (enam puluh) sub kegiatan yang terbagi pada :

1) Urusan Rutin terdiri dari 1 (satu) program, 8 (delapan) kegiatan dan 34 (tiga puluh empat) sub kegiatan.
2) Urusan Koperasi dan UKM terdiri dari 7 (tujuh) program, 7 (tujuh) kegiatan dan 26 (dua puluh enam) sub kegiatan.

Kegiatan urusan koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dalam penyebarannya hampir seluruh wilayah Kabupatan Bandung karena dalam pelaksanannya merupakan program usulan masyarakat yang disampaikan melalui kegiatan Musyawarah Pembangunan (Musrenbang) ditingkat kecamatan dan ditindak lanjuti dalam Forum Perangkat Daerah.

c. Rumusan Program dan Kegiatan.
Rumusan program dan kegiatan tahun 2025 tersebut telah sesuai dengan RKPD Kabupaten Bandung tahun 2025. Program dan kegiatan tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.7 (T-C.33)
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026

Perangkat Daerah : Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	8	9	10	11	15
	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH				**21.153.044.904,00**				**15.251.254.610,00**
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**21.153.044.904,00**				**15.251.254.610,00**
2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**				**21.153.044.904,00**				**15.251.254.610,00**
2.17.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	-	-	-	**13.347.643.986,00**			-	**12.071.254.610,00**
2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase ketersediaan dokumen Perencanaan dan dokumen ketercapaian kinerja hasil perencanaan*	100 %	100 %	454.500.000,00			100 %	279.358.200,00
2.17.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25 Dokumen	5 Dokumen	315.000.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	5 Dokumen	140.000.000,00
2.17.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD								

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	8	9	10	11	15
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5 Dokumen	1 Dokumen	18.000.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	1 Dokumen	12.000.000,00
2.17.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD								
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	9 Dokumen	2 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	2 Dokumen	15.158.200,00
2.17.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD								
		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5 Dokumen	1 Dokumen	1.500.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	1 Dokumen	1.200.000,00
2.17.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD								
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	8 Dokumen	2 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	2 Dokumen	2.000.000,00
2.17.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	30 Laporan	6 Laporan	13.000.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	6 Laporan	9.000.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	8	9	10	11	15
2.17.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	28 Laporan	7 Laporan	5.000.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	7 Laporan	15.000.000,00
2.17.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah								
		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah		1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	1 Dokumen	10.000.000,00
2.17.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah								
		Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah		67 Data	75.000.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	67 Data	75.000.000,00
2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Ketersediaan Dokumen Keuangan Dinas*	100 %	100 %	9.460.323.986,00			100 %	9.005.573.692,00
2.17.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	34 Orang/bulan	39 Orang/bulan	9.436.823.986,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	34 Orang/bulan	8.934.073.692,00
2.17.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD								

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	8	9	10	11	15
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	8 Dokumen	2 Dokumen	3.000.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	2 Dokumen	45.000.000,00
2.17.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD								
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10 Laporan	2 Laporan	7.500.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	2 Laporan	7.500.000,00
2.17.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan								
		Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	5 Dokumen	1 Dokumen	1.500.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	1 Dokumen	2.000.000,00
2.17.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD								
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	22 Laporan	5 Laporan	11.500.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	5 Laporan	17.000.000,00
2.17.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Persentase ketersediaan dokumen administrasi dan inventarisasi BMD*	100 %	100 %	4.300.000,00			100 %	4.300.000,00
2.17.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD								
		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	4 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan,	DANA TRANSFER UMUM-DANA	1 Dokumen	0,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	8	9 Semua Kel/Desa	10 ALOKASI UMUM	11	15
2.17.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD								
		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	20 Laporan	4 Laporan	1.500.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	4 Laporan	1.500.000,00
2.17.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD								
		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	10 Laporan	2 Laporan	2.800.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	2 Laporan	2.800.000,00
2.17.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase ketersediaan dokumen administrasi kepegawaian*	100 %	100 %	269.000.000,00			100 %	276.500.000,00
2.17.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya								
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		0 Paket	0,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		0,00
2.17.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian								
		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	17 Dokumen	4 Dokumen	75.000.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	4 Dokumen	75.000.000,00
2.17.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian								

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	8	9	10	11	15
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	5 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	1 Dokumen	1.000.000,00
2.17.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai								
		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	5 Dokumen	1 Dokumen	500.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	1 Dokumen	500.000,00
2.17.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan								
		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	150 Orang	50 Orang	192.500.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	50 Orang	200.000.000,00
2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase pemenuhan operasional administrasi perkantoran*	100 %	80 %	488.000.000,00			100 %	330.000.000,00
2.17.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	1 Paket	5.000.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	1 Paket	5.000.000,00
2.17.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	38 Paket	1 Paket	153.000.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan,	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	5 Paket	65.000.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	8	9	10	11	15
						Semua Kel/Desa			
2.17.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	1 Paket	10.000.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	1 Paket	10.000.000,00
2.17.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	44 Paket	9 Paket	40.000.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	10 Paket	40.000.000,00
2.17.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan								
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	6 Dokumen	2 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	1 Dokumen	10.000.000,00
2.17.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu								
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	60 Laporan	12 Laporan	20.000.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	12 Laporan	20.000.000,00
2.17.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan	12 Laporan	250.000.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan,	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	12 Laporan	180.000.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	8	9 Semua Kel/Desa	10	11	15
2.17.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Aset dalam Kondisi Baik*	98,18 %	97,88 %	200.000.000,00			98,18 %	95.000.000,00
2.17.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel								
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	216 Unit	5 Unit	100.000.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	80 Unit	50.000.000,00
2.17.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	50 Unit	9 Unit	100.000.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	15 Unit	45.000.000,00
2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase pemenuhaan jasa penunjang perkantoran* *Persentase pemenuhan operasional administrasi perkantoran*	100 %	100 % 100 %	2.070.000.000,00			100 %	1.750.200.000,00
2.17.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 Laporan	12 Laporan	170.000.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	12 Laporan	196.000.000,00
2.17.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	8	9	10	11	15
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60 Laporan	12 Laporan	1.900.000.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	12 Laporan	1.554.200.000,00
2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Aset dalam Kondisi Baik*	98,18 %	97,88 %	401.520.000,00			98,18 %	330.322.718,00
2.17.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	89 Unit	14 Unit	76.020.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	18 Unit	76.020.000,00
2.17.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	107 Unit	19 Unit	25.500.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	19 Unit	13.500.000,00
2.17.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	9 Unit	2 Unit	300.000.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	2 Unit	240.802.718,00
2.17.03	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	***Persentase Koperasi Patuh***	**28.52 %**	**28.52 %**	**762.300.000,00**			**28.52 %**	**600.000.000,00**

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	8	9	10	11	15
2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	*Persentase Koperasi, Koperasi Simpan pinjam/ Unit simpan pinjam koperasi yang diperiksa dan diawasi*	28.99 %	28.52 %	762.300.000,00			28.99 %	600.000.000,00
2.17.03.2.01.0003	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi								
		Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	180 Unit Usaha	200 Unit Usaha	412.300.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	60 Unit Usaha	300.000.000,00
2.17.03.2.01.0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota								
		Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	180 Unit Usaha	175 Unit Usaha	350.000.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	60 Unit Usaha	300.000.000,00
2.17.04	**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**	***Persentase Koperasi sehat***	**32.32 %**	**32.32 %**	**443.900.918,00**			**32.32 %**	**300.000.000,00**
2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase KSP/USP yang dinilai Kesehatannya*	20 %	20 %	443.900.918,00			20 %	300.000.000,00
2.17.04.2.01.0003	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan								
		Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan	300 Unit Usaha	135 Unit Usaha	443.900.918,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan,	DANA TRANSFER UMUM-DANA	100 Unit Usaha	300.000.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	8	9 Semua Kel/Desa	10 ALOKASI UMUM	11	15
2.17.05	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	***Persentase SDM koperasi yang kompeten***	**20.32 %**	**20.32 %**	**250.000.000,00**			**20.32 %**	**700.000.000,00**
2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase SDM Koperasi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Koperasi*	20 %	4 %	250.000.000,00			4 %	700.000.000,00
2.17.05.2.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi								
		Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	1672 Orang	80 Orang	250.000.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	50 Orang	700.000.000,00
2.17.06	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**	***Persentase pertumbuhan volume usaha koperasi***	**4.5 %**	**4.5 %**	**1.228.000.000,00**			**4.5 %**	**750.000.000,00**
2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Koperasi yang difasilitasi Kegiatan pemberdayaan dan perlindungan bagi Koperasi*	100 %	100 %	1.228.000.000,00			100 %	750.000.000,00
2.17.06.2.01.0003	Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi								
		Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan	105 Kelompok Masyarakat	49 Kelompok Masyarakat	328.000.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	25 Kelompok Masyarakat	100.000.000,00
2.17.06.2.01.0004	Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota								

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	8	9	10	11	15
		Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya	75 Unit Usaha	25 Unit Usaha	100.000.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	25 Unit Usaha	100.000.000,00
2.17.06.2.01.0006	Pemulihan Usaha Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota								
		Jumlah Koperasi yang dipulihkan usahanya	15 Unit Usaha	25 Unit Usaha	100.000.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	5 Unit Usaha	100.000.000,00
2.17.06.2.01.0007	Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota								
		Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Permodalannya	75 Unit Usaha	25 Unit Usaha	100.000.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	25 Unit Usaha	100.000.000,00
2.17.06.2.01.0008	Fasilitasi Pelaporan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota								
		Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Pelaporannya	150 Unit Usaha	260 Unit Usaha	200.000.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	50 Unit Usaha	100.000.000,00
2.17.06.2.01.0009	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota								
		Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	186 Unit Usaha	35 Unit Usaha	400.000.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	62 Unit Usaha	250.000.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	8	9	10	11	15
2.17.07	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	***Persentase Kapasitas Usaha Mikro Persentase Kapasitas Usaha Mikro***	**7,59 % 21.25 %**	**17 % 7,07 %**	**5.121.200.000,00**			**7,59 % 21.25 %**	**830.000.000,00**
2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	*Persentase Usaha Mikro yang difasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Persentase Usaha Mikro yang Difasilitasi Kegiatan Pemberdayaan*	7,59 %	7,07 % 4,25 %	5.121.200.000,00			7,59 %	830.000.000,00
2.17.07.2.01.0002	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro								
		Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	1132 Unit Usaha	668 Unit Usaha	958.350.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	100 Unit Usaha	100.000.000,00
2.17.07.2.01.0003	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro								
		Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	950 Unit Usaha	300 Unit Usaha	187.200.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	100 Unit Usaha	50.000.000,00
2.17.07.2.01.0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro								
		Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	4005 Unit Usaha	625 Unit Usaha	1.750.000.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	200 Unit Usaha	150.000.000,00
2.17.07.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro								

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	8	9	10	11	15
		Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	258 Orang	90 Orang	50.000.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	30 Orang	40.000.000,00
2.17.07.2.01.0007	Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaataan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil								
		Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	200 Unit Usaha	150 Unit Usaha	175.550.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	25 Unit Usaha	50.000.000,00
2.17.07.2.01.0008	Pemulihan Usaha Mikro								
		Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	60 Unit Usaha	20 Unit Usaha	100.000.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	20 Unit Usaha	100.000.000,00
2.17.07.2.01.0009	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Usaha Kecil								
		Jumlah Usaha Mikro yang terfasilitasi	240 Unit Usaha	200 Unit Usaha	290.500.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	20 Unit Usaha	50.000.000,00
2.17.07.2.01.0010	Pendampingan dan Bantuan Hukum bagi Usaha Mikro								
		Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	150 Unit Usaha	50 Unit Usaha	50.000.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	50 Unit Usaha	50.000.000,00
2.17.07.2.01.0011	Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha Mikro								

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	8	9	10	11	15
		Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	150 Unit Usaha	200 Unit Usaha	755.200.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	25 Unit Usaha	50.000.000,00
2.17.07.2.01.0012	Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah								
		Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	150 Unit Usaha	50 Unit Usaha	50.000.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	50 Unit Usaha	50.000.000,00
2.17.07.2.01.0013	Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik								
		Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	180 Unit Usaha	0 Unit Usaha	0,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	40 Unit Usaha	0,00
2.17.07.2.01.0014	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro								
		Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata	930 Unit Usaha	620 Unit Usaha	100.000.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	310 Unit Usaha	40.000.000,00
2.17.07.2.01.0015	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan								
		Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	1120 Orang	595 Orang	654.400.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	105 Orang	100.000.000,00
	UPTD PLUT KUMKM				**1.956.900.000,00**				**1.000.000.000,00**

DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN BANDUNG

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	8	9	10	11	15
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**1.956.900.000,00**				**1.000.000.000,00**
2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**				**1.956.900.000,00**				**1.000.000.000,00**
2.17.02	**PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM**	***Persentase Koperasi yang berizin*** ***Persentase Koperasi yang Berizin***	**7.03 %** **53 %**	**6.38 %** **52,90 %**	**50.000.000,00**			**7.03 %** **53 %**	**50.000.000,00**
2.17.02.2.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota* *Persentase Fasilitasi Penerbitan Ijin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota*	7 %	4 % 7 %	50.000.000,00			7 %	50.000.000,00
2.17.02.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota								
		Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	3408 Unit Usaha	652 Unit Usaha	50.000.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	693 Unit Usaha	50.000.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	8	9	10	11	15
2.17.08	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	***Persentase Kualitas Usaha Mikro***	**5,26 %**	**5,26 %**	**1.906.900.000,00**			**5,26 %**	**950.000.000,00**
2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	*Persentase Usaha Mikro yang difasilitasi menjadi Usaha Kecil*	5,65 %	5,26 %	1.906.900.000,00			5,65 %	950.000.000,00
2.17.08.2.01.0004	Fasilitasi Pengembangan Inkubasi Secara Terpadu dan Berjenjang								
		Jumlah Inkubator yang Terfasilitasi	3 Lembaga	4 Lembaga	50.000.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	1 Lembaga	50.000.000,00
2.17.08.2.01.0005	Fasilitasi Inkubator Usaha Mikro								
		Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	390 Unit Usaha	100 Unit Usaha	800.000.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	130 Unit Usaha	400.000.000,00
2.17.08.2.01.0006	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi								
		Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	3750 Unit Usaha	1437 Unit Usaha	1.056.900.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	1250 Unit Usaha	500.000.000,00
J U M L A H					**23.109.944.904,00**				**16.251.254.610,00**

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Adapun rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Koperasi berdasarkan program, kegiatan dan sub kegiatan adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2025
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bandung

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2025	
			TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5
	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH			**21.153.044.904,00**
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**21.153.044.904,00**
2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**			**21.153.044.904,00**
2.17.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	-	-	**13.347.643.986,00**
2.17.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	***Persentase ketersediaan dokumen Perencanaan dan dokumen ketercapaian kinerja hasil perencanaan***	**100 %**	**454.500.000,00**
2.17.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	315.000.000,00
2.17.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	18.000.000,00
2.17.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	20.000.000,00
2.17.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			
		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1.500.000,00
2.17.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD			
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	2.000.000,00
2.17.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	13.000.000,00
2.17.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Laporan	5.000.000,00
2.17.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah			
		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	5.000.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2025	
			TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5
2.17.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah			
		Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	67 Data	75.000.000,00
2.17.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	***Persentase Ketersediaan Dokumen Keuangan Dinas***	**100 %**	**9.460.323.986,00**
2.17.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	39 Orang/ bulan	9.436.823.986,00
2.17.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	2 Dokumen	3.000.000,00
2.17.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	7.500.000,00
2.17.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan			
		Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	1.500.000,00
2.17.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	5 Laporan	11.500.000,00
2.17.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	***Persentase ketersediaan dokumen administrasi dan inventarisasi BMD***	**100 %**	**4.300.000,00**
2.17.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			
		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	0 Dokumen	0,00
2.17.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			
		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	1.500.000,00
2.17.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			
		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	2.800.000,00
2.17.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase ketersediaan dokumen administrasi kepegawaian*	100 %	269.000.000,00
2.17.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	0,00
2.17.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			
		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4 Dokumen	75.000.000,00
2.17.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian			
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	1.000.000,00
2.17.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai			
		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	500.000,00
2.17.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			
		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	192.500.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2025	
			TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5
2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase pemenuhan operasional administrasi perkantoran*	80 %	488.000.000,00
2.17.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.000.000,00
2.17.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	153.000.000,00
2.17.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	10.000.000,00
2.17.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	9 Paket	40.000.000,00
2.17.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	10.000.000,00
2.17.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	20.000.000,00
2.17.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	250.000.000,00
2.17.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Aset dalam Kondisi Baik*	97,88 %	200.000.000,00
2.17.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel			
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	100.000.000,00
2.17.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	9 Unit	100.000.000,00
2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase pemenuhan jasa penunjang perkantoran*	100 % 100 %	2.070.000.000,00
2.17.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	170.000.000,00
2.17.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.900.000.000,00
2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Aset dalam Kondisi Baik*	97,88 %	401.520.000,00
2.17.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 Unit	76.020.000,00
2.17.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	19 Unit	25.500.000,00
2.17.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	300.000.000,00
2.17.03	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	***Persentase Koperasi Patuh***	**28.52 %**	**762.300.000,00**

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2025	
			TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5
2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	*Persentase Koperasi, Koperasi Simpan pinjam/ Unit simpan pinjam koperasi yang diperiksa dan diawasi*	28.52 %	762.300.000,00
2.17.03.2.01.0003	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi			
		Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	200 Unit Usaha	412.300.000,00
2.17.03.2.01.0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota			
		Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	175 Unit Usaha	350.000.000,00
2.17.04	**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**	***Persentase Koperasi sehat***	**32.32 %**	**443.900.918,00**
2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase KSP/USP yang dinilai Kesehatannya*	20 %	443.900.918,00
2.17.04.2.01.0003	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan			
		Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan	135 Unit Usaha	443.900.918,00
2.17.05	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	***Persentase SDM koperasi yang kompeten***	**20.32 %**	**250.000.000,00**
2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase SDM Koperasi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Koperasi*	4 %	250.000.000,00
2.17.05.2.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi			
		Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	80 Orang	250.000.000,00
2.17.06	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**	***Persentase pertumbuhan volume usaha koperasi***	**4.5 %**	**1.228.000.000,00**
2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Koperasi yang difasilitasi Kegiatan pemberdayaan dan perlindungan bagi Koperasi*	100 %	1.228.000.000,00
2.17.06.2.01.0003	Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi			
		Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan	49 Kelompok Masyarakat	328.000.000,00
2.17.06.2.01.0004	Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota			
		Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya	25 Unit Usaha	100.000.000,00
2.17.06.2.01.0006	Pemulihan Usaha Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota			
		Jumlah Koperasi yang dipulihkan usahanya	25 Unit Usaha	100.000.000,00
2.17.06.2.01.0007	Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota			
		Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Permodalannya	25 Unit Usaha	100.000.000,00
2.17.06.2.01.0008	Fasilitasi Pelaporan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota			
		Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Pelaporannya	260 Unit Usaha	200.000.000,00
2.17.06.2.01.0009	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota			
		Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	35 Unit Usaha	400.000.000,00
2.17.07	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	***Persentase Kapasitas Usaha Mikro Persentase Kapasitas Usaha Mikro***	**7,07 %**	**5.121.200.000,00**

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2025	
			TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5
2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	*Persentase Usaha Mikro yang difasilitasi Kegiatan Pemberdayaan*	7,07 %	5.121.200.000,00
2.17.07.2.01.0002	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro			
		Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	668 Unit Usaha	958.350.000,00
2.17.07.2.01.0003	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro			
		Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	300 Unit Usaha	187.200.000,00
2.17.07.2.01.0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro			
		Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	625 Unit Usaha	1.750.000.000,00
2.17.07.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro			
		Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	90 Orang	50.000.000,00
2.17.07.2.01.0007	Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil			
		Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	150 Unit Usaha	175.550.000,00
2.17.07.2.01.0008	Pemulihan Usaha Mikro			
		Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	20 Unit Usaha	100.000.000,00
2.17.07.2.01.0009	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Usaha Kecil			
		Jumlah Usaha Mikro yang terfasilitasi	200 Unit Usaha	290.500.000,00
2.17.07.2.01.0010	Pendampingan dan Bantuan Hukum bagi Usaha Mikro			
		Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	50 Unit Usaha	50.000.000,00
2.17.07.2.01.0011	Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha Mikro			
		Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	200 Unit Usaha	755.200.000,00
2.17.07.2.01.0012	Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah			
		Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	50 Unit Usaha	50.000.000,00
2.17.07.2.01.0013	Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik			
		Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	0 Unit Usaha	0,00
2.17.07.2.01.0014	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro			
		Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata	620 Unit Usaha	100.000.000,00
2.17.07.2.01.0015	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan			
		Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	595 Orang	654.400.000,00
	UPTD PLUT KUMKM			**1.956.900.000,00**
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**1.956.900.000,00**
2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**			**1.956.900.000,00**
2.17.02	**PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM**	***Persentase Koperasi yang berizin***	**6.38 %**	**50.000.000,00**

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2025	
			TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5
2.17.02.2.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota*	7 %	50.000.000,00
2.17.02.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota			
		Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	652 Unit Usaha	50.000.000,00
2.17.08	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	***Persentase Kualitas Usaha Mikro***	**5,26 %**	**1.906.900.000,00**
2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	*Persentase Usaha Mikro yang difasilitasi menjadi Usaha Kecil*	5,26 %	1.906.900.000,00
2.17.08.2.01.0004	Fasilitasi Pengembangan Inkubasi Secara Terpadu dan Berjenjang			
		Jumlah Inkubator yang Terfasilitasi	1 Lembaga	50.000.000,00
2.17.08.2.01.0005	Fasilitasi Inkubator Usaha Mikro			
		Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	100 Unit Usaha	800.000.000,00
2.17.08.2.01.0006	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi			
		Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	1437 Unit Usaha	1.056.900.000,00
JUMLAH				**23.109.944.904,00**

Sumber : Hasil Analisis Diskop UKM, 2024

4.2. INOVASI TAHUN 2025

Adanya program Inovasi pada Dinas Koperasi dan UKM merupakan salah satu bentuk inovasi pelayanan masyarakat guna merespon terhadap tantangan pembangunan yang ada. Program inovasi ini merupakan sebuah bentuk komitmen Dinas Koperasi dan UKM dalam mengembangkan pelaku koperasi dan UMKM yang ada di Kabupaten Bandung. Diharapkan dengan adanya program inovasi ini akan membantu masyarakat atau pelaku usaha dalam meningkatkan potensi diri. Program inovasi tersebut yaitu:

4.2.1.SIBANGKIT UKM BEDAS

SIBANGKIT UKM BEDAS merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan database UMKM, Promosi, dan Pemasaran Usaha Mikro di Kabupaten Bandung. Melihat kondisi eksisting di Kabupaten Bandung, permasalahan Usaha Mikro yang terjadi adalah:

1. Belum adanya regulasi yang jelas terkait pengembangan usaha mikro
2. Belum tersedianya sarana dan prasarana pengemvangan usaha mikro baik sarana media teknologi informasi maupun outlet pemasaran untuk usaha mikro
3. Belum meningkatnya promosi dan pemasaran usaha mikro
4. Masih rendahnya kualitas SDM pelaku usaha mikro dalam memanfaatkan media teknologi informasi

5. Masih banyaknya pelaku usaha yang belum memiliki perijinan dan sertifikasi produk

Dengan melihat visi Kabupaten Bandung yaitu **"Terwujudnya masyarakat Kabupaten Bandung yang Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis dan Sejahtera"** dan dengan upaya menjalankan misi **"Membangkitkan Daya Saing Daerah"** serta mengantisipasi permasalahan UMKM maka Dinas Koperasi dan UKM membuat sebuah gagasan yang berguna untuk meningkatkan produktivitas usaha mikro terutama untuk meningkatkan promosi dan pemasaran usaha mikro dan pemenuhan pelayanan UMKM dengan membuat **Sistem Informasi Bangkit UKM (SIBANGKIT UKM) Bedas** Kabupaten Bandung.

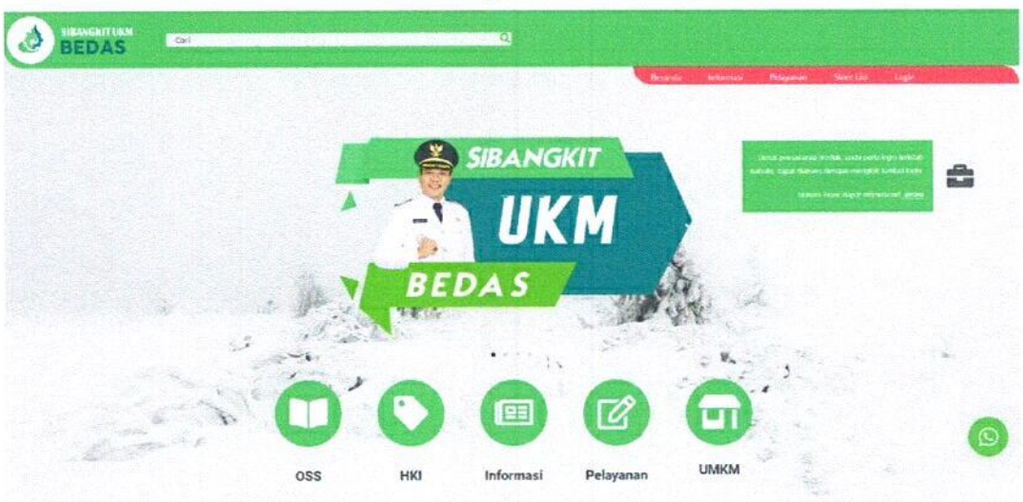
Dengan adanya SIBANGKIT UKM ini terdapat manfaat yang ingin dicapai baik untuk internal maupun eksternal Dinas Koperasi dan UKM, yaitu:

1. **Internal**. Yaitu bagi individu (petugas Pelayanan promosi dan pemasaran), dengan adanya aplikasi ini akan meningkatkan kompetensi, semangat dan tanggung jawab kerja bagi para ASN yang bertugas dalam pelayanan fasilitasi promosi dan Pemasaran Usaha mikro. Dan organisasi yaitu Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang akan memudahkan informasi usaha mikro dan menampilkan data yang ter-update terkait promosi dan pemasaran usaha mikro sebagai bahan evaluasi dan monitoring kinerja organisasi.
2. **Eksternal**. Yaitu bagi stakeholder (masyarakat, Pelaku Usaha Mikro, Komunitas UMKM, KADIN, HIPPMI, Pemerintah Daerah. Kinerja pengembangan promosi dan pemasaran produk usaha mikro menjadi lebih baik dengan memberikan pelayanan dan fasilitasi pengembangan dan pemasaran usaha mikro.

Selain itu, dengan adanya SIBANGKIT UKM BEDAS diharapkan akan tersedianya:

1. Layanan fasilitas promosi dan pameran
2. Layanan perijinan OSS (NIB)
3. Layanan HKI
4. Layanan UMKM lainnya (pelatihan kewirausahaan, kemitraan, intermediasi, sosialiasi, inkubasi bisnis, rekomendasi dan pendampingan)
5. Database UMKM Kabupaten Bandung.

Gambar 4.1 Tampilan aplikasi Sibangkit UKM Bedas



4.2.2.SIMANJUR BEDAS

Sistem Informasi Monitoring Pinjaman Dana Bergulir (SIMANJUR) Bedas yaitu layanan informasi dan monitoring Program Prioritas Bupati Bandung yaitu Pemberian Pinjaman Dana Bergulir berbasis aplikasi untuk memberikan kemudahan bagi pimpinan untuk memantau perkembangan dana bergulir yang telah disalurkan oleh perbankan, serta dapat melihat pinjaman macet sampai ke tingkat RW.

Gambar 4.2 Tampilan aplikasi Simanjur Bedas



4.2.3. SIKOPI BEDAS (INKUBASI KOPERASI BERDAYA SAING)

SIKOPI BEDAS adalah suatu program pembinaan, pendampingan, dan pengembangan intensif yang diberikan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bandung melalui Inkubator terpilih kepada koperasi-koperasi potensial di wilayah kabupaten Bandung sebagai suatu wahana transformasi pembentukan koperasi yang memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif serta memiliki visi dan misi kedepan yang jelas. Inkubasi Koperasi terdiri dari 3 tahapan, diantaranya :

1. Pra Inkubasi
   a. penawaran program Inkubasi;
   b. seleksi peserta Inkubasi (tenant); dan
   c. kontrak tertulis dengan peserta Inkubasi (tenant)
2. Inkubasi
   a. perumusan ide usaha;
   b. pelatihan ide usaha peserta Inkubasi;
   c. pemberian bimbingan dan konsultasi perrgembangan usaha;
   d. pendampingan; dan
   e. pertemuan mitra usaha (business matching)
3. Pacsa Inkubasi
   a. menyediakan jejaring antar peserta Inkubasi (tenant);
   b. memberi peluang partisipasi kepemilikan pada perusahaan peserta Inkubasi (tenant);
   c. melakukan monitoring dan evaluasi perkembangan usaha peserta Inkubasi (tenant) paling singkat 2 (dua) tahun;
   d. memberikan fasilitasi akses sumber pembiayaan; dan
   e. mengarahkan para alumni inkubator membentuk wadah yang legal dalam pengembangan usaha.

Gambar 4.3 Dokumentasi Kegiatan SIKOPI BEDAS



4.2.4. SAKU BEDAS (SOLUSI DAN AKSI UNTUK MENINGKATKAN USAHA MELALUI SINERGITAS KOPERASI DAN PELAKU UMKM UNTUK KABUPATEN BANDUNG BERDAYA SAING)

Program "SAKU BEDAS" merupakan program inovasi yang digagas oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bandung yang terdiri dari rangkaian kegiatan mulai dari pelatihan hingga gelar produk. Masyarakat yang terlibat dalam kegiatan SAKU BEDAS merupakan pelaku usaha Koperasi dan UMKM.

Program inovasi ini diharapkan dapat memperkuat hubungan antara pemerintah daerah selaku pengambil keputusan (Desicion Maker) dengan para pelaku usaha dan para penggerak ekonomi kerakyatan. Program SAKU BEDAS ini berkomitmen untuk dapat langsung membuat rencana tindak lanjut yang dirumuskan, dijalankan, dan dijawab dari program-program yang sudah disiapkan baik dari dukungan APBD maupun Non APBD Kabupaten Bandung.

Gambar 4.4 Dokumentasi Kegiatan SAKU BEDAS



BAB V
PENUTUP

5.1 Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja

Renja Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bandung Tahun 2025 berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional tahunan yang disusun berdasarkan prioritas pembangunan daerah dalam Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bandung Tahun 2025. Selain itu, Rencana Kerja juga sebagai landasan operasional perencanaan taktis tahunan bagi dinas/badan/lembaga yang isinya lebih memusatkan pada arah, tujuan, sasaran, program dan kegiatan jangka pendek.

Renja sebagai dokumen perencanaan, memuat program dan kegiatan prioritas yang harus dijalankan dan diarahkan pada proses perencanaan dalam menentukan arah dan kebijakan pembangunan yang langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat melalui perencanaan pembangunan yang berkualitas dan profesional dengan ditunjang sumber daya manusia yang berpikir sistematik/rasional, produktif, berdisiplin, bekerja efisien dan efektif.

5.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Pelaksanaan penyusunan serta penetapan program dan kegiatan pembangunan didalam Renja Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bandung Tahun 2025 bertujuan untuk meningkatkan perencanaan pembangunan yang berkualitas dan profesional. Program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan Tahun 2025, didalam pelaksanaannya harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi.

Sehubungan hal tersebut, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan yang ditempuh dengan langkah-langkah sebagai berikut :

a. Renja Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bandung Tahun 2025, harus dilaksanakan secara konsisten, tertib dan terpadu melalui kerjasama dan koordinasi antar Sekretariat dan Bidang;
b. Dalam mempercepat perencanaan yang aspiratif upaya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan perlu terus ditingkatkan, mulai dari tahapan perencanaan sampai pelaksanaan pembangunan, sehingga diharapkan mereka mempunyai rasa memiliki dan bertanggungjawab terhadap hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan;
c. Renja Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bandung Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi maupun yang bersumber dari APBN;
d. Rencana Kerja Perangkat Daerah, di dalam proses penyusunannya harus memperhatikan/ mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya diantaranya (RKP, RPJMN, RPJPD Provinsi, RPJMD Provinsi, RKPD Provinsi, RPJPD Kabupaten, RPJMD Kabupaten, RKPD Kabupaten Bandung dan Renstra Perangkat Daerah);
e. Renja Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bandung Tahun 2025 harus menjadi dasar bagi pelaksanaan perencanaan pembangunan tahun berikutnya.

5.3 Rencana Tindak Lanjut

Transparansi dalam proses perencanaan pembangunan merupakan salah satu syarat dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang harus

diikuti, diketahui dan dipahami oleh masyarakat. Agar setiap keputusan/kebijakan publik dapat diterima dan dilaksanakan secara efektif, maka masyarakat harus dilibatkan sejak awal baik dalam proses perencanaan maupun perumusan kebijakannya, sehingga aspirasi dan kepentingannya terakomodasi di dalam kebijakan tersebut.

Berdasarkan hal tersebut di atas, partisipasi masyarakat yang luas dalam perumusan kebijakan publik akan membutuhkan komitmen yang tinggi dalam implementasinya, maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut :

a. Terwujudnya partisipasi aktif masyarakat/swasta dalam kegiatan pembangunan;
b. Perlu peningkatan kapasitas SDM aparatur pengawas koperasi dan pengembang kewirausahaan untuk melaksanakan tugas yang semakin komplek, upaya yang harus ditempuh dapat melalui pendidikan formal, bimtek, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur pengawas koperasi dan pengembang kewirausahaan;
c. Aparatur pengawas koperasi maupun pengembang kewirausahaan saat ini dari sisi kuantitas masih kurang, hal tersebut akan berakibat bertumpuknya suatu pekerjaan pada seseorang. Sehingga perlu menambah pegawai supaya rasio pekerjaan dan jumlah pegawai bisa berimbang;
d. Menerapkan sistem *reward and punishment* terhadap seluruh karyawan dan mengaplikasikannya pada pendistribusian insentif berdasarkan beban kerja;
e. Meningkatkan peran serta masyarakat, baik dalam proses perencanaan maupun penganggaran, sehingga transparansi akan lebih terwujud;
f. Dalam menetapkan dokumen perencanaan harus tepat waktu sesuai dengan amanat peraturan perundangan yang berlaku, hal ini dapat dilaksanakan apabila kita mengacu pada jadwal yang telah ditetapkan.

Demikian dokumen ini kami susun, kami berharap dokumen renja pada Dinas Koperasi dan UKM Tahun 2025 ini dapat dijadikan bahan dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Bandung.

KEPALA DINAS KOPERASI DAN
USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN BANDUNG

Ttd

DINDIN SYAHIDIN

BUPATI BANDUNG

ttd.

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bandung Tahun 2025

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Ketidaksesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah dan Agenda Kerja	√			
2.	Pengolahan data dan informasi	√			
3.	Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah	√			
4.	Mengkaji hasil evaluasi renja- Perangkat Daerah tahun lalu berdasarkan Renstra Perangkat Daerah	√			
5.	Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	√			
6.	Penelaahan rancangan awal RKPD	√			
7.	Perumusan tujuan dan sasaran	√			
8.	Penelaahan usulan masyarakat	√			
9.	Perumusan kegiatan masyarakat	√			
10.	Pelaksanaan forum Perangkat Daerah	√			
10.a	Menyelaraskan program dan kegiatan Perangkat Daerah dengan usulan program dan kegiatan hasi Musrenbang Kecamatan	√			
10.b	Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	√			
10.c	Mensinkronkan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan	√			
10.d	Menyesuaiakan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah sesuai surat edaran Bupati	√			
11.	Sasaran program dan kegiatan Perangkat Daerah disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu	√			
12.	Program dan kegiatan antar Perangkat Daerah dengan Perangkat Daerah lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam forum perangkat daerah	√			
13.	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah telah Menyusun dan memperhitungkan prakiraan maju	√			
14.	Dokumen Renja Perangkat Daerah yang telah disahkan	√			

Soreang, Agustus 2024

KEPALA DINAS KOPERASI DAN
USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN BANDUNG

H. DINDIN SYAHIDIN. S.IP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP.19720308 199101 1 001

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
Jl. Raya Soreang Km. 17 Telp. Tlp/Fax.(022) 85876260 E-mail: diskop-ukm@bandungkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN BANDUNG

NOMOR : 800/013/sekre
LAMPIRAN : 1 (SATU) BERKAS

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH TAHUN 2025

KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN BANDUNG,

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
b. Bahwa dalam rangka penyusunan dokumen rencana kerja (renja) tahun 2025 dipandang perlu menyusun Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bandung Tahun 2025 dengan keputusan kepala dinas;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dan huruf (b) perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bandung Tahun 2025.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam

Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional tahun 2021 – 2024;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

12. Peraturan Daerah Nomor 6 tentang Kemudahan Perlindungan Dan Pemberdayaan Usaha Mikro;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026;
14. Peraturan Bupati Bandung Nomor 24 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan Pengarustamaan Gender dalam Pembangunan di Daerah Kabupaten Bandung
15. Peraturan Bupati Bandung Nomor 119 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026;
16. Peraturan Bupati Bandung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah;
17. Peraturan Bupati Bandung Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 27 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bandung Tahun 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bandung Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA mempunyai tugas :

a. Mengumpulkan bahan/ data kaitan penyusunan rencana kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bandung Tahun 2025;
b. Menyusun dokumen rancangan awal, rancangan, rancangan akhir dan penetapan Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bandung Tahun 2025;
c. Melaksanakan kegiatan pendampingan Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kecamatan Tahun 2024 untuk RKPD tahun 2025;
d. Melaksanakan kegiatan identifikasi usulan Musrenbang Tingkat Kecamatan Tahun 2024 untuk RKPD tahun 2025;

e. Melaksanakan kegiatan Forum Perangkat Daerah Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2024 untuk RKPD tahun 2025;
f. Melaksanakan verifikasi usulan pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Bandung Tahun 2024 untuk RKPD tahun 2025;
g. Menyusun dokumen rancangan akhir dan penetapan Perubahan Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bandung Tahun 2025;
h. Mengkoordinasikan dengan Perangkat Daerah terkait dalam penyusunan rencana kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2025;
i. Melaporkan secara berkala tentang penyusunan rencana kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2025 kepada Kepala Dinas.

KETIGA : Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Soreang
pada tanggal : 02 Januari 2024

KEPALA DINAS KOPERASI
DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH,

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
DISKOP-UKM

H. DINDIN SYAHIDIN, S.IP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19720308 199101 1 001

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : PENUNJUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH TAHUN 2025

SUSUNAN PENUNJUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025

Penanggungjawab : Kepala Dinas
Ketua : Sekretaris Dinas
Sekretaris : Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan
Anggota :
1. Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro
2. Kepala Bidang Kelembagaan dan Pemberdayaan Koperasi
3. Kepala Bidang Penilaian dan Pengawasan Koperasi
4. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
5. Kepala UPTD PLUT KUMKM
6. Kasubag TU UPTD PLUT KUMKM
7. Pengembang Kewirausahaan Ahli Muda
8. Pengawas Koperasi Ahli Muda
9. Pengawas Koperasi Ahli Pertama
10. Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Pertama
11. Bendahara
12. Penata Keuangan
13. Analis Perencanaan Anggaran
14. Analis Koperasi
15. Analis Bimbingan Usaha
16. Penata Laporan Keuangan
17. Pengelola Pemanfaatan BMD
18. Fasilitator Kemitraan
19. Fasilitator Kewirausahaan
20. Fasilitator Sarana Pemasaran
21. Pengelola Dokumentasi
22. Teknisi Sarana dan Prasarana
23. Tenaga Administrasi Perkantoran

KEPALA DINAS KOPERASI
DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH,

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
DISKOP-UKM

H. DINDIN SYAHIDIN, S.IP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19720308 199101 1 001